

Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 04 TAHUN II/MARET 2013



MENCARI SOSOK PEMIMPIN NASIONAL



Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI)

Nilai-nilai atau parameter moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan nasional Indonesia dalam IKNI, dirinci atas dasar empat kategori yaitu:

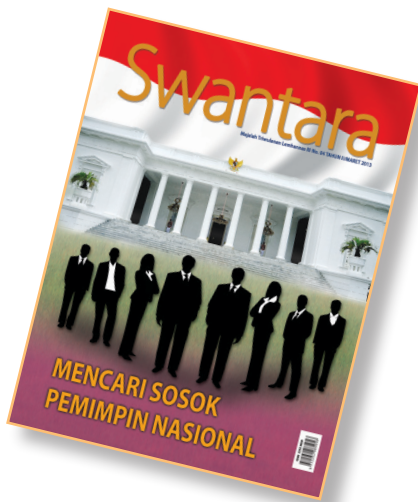
Pertama, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual

Kedua, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Sosial

Ketiga, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Institusional

Keempat, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Global



**Pelindung**

Budi Susilo Soepandji

Pembina

Dede Rusamsi

Pengarah

Chandra Manan Mangan

Penasehat

Syahrul Ansory

Herry Haryanto

Santoso

Kontributor Ahli

Dadan Umar Daihani, Timotius Harsono

Rosita S. Noor, Miyasto, Leonardi

Pemimpin Redaksi

Sahat Aritonang

Redaktur Pelaksana

E. Estu Prabowo

Editor

Adma Bestari

Staf redaksi

Megawarni Simamora, GT. Situmorang,

B. Iman Aryanto, Endah Heliana, Trias Noverdi

Koordinator Fotografer

Ariyanto

Fotografer

Suryadi, Syafrizal

Grafis

PT. Yellow Multi Media

Pemimpin Administrasi

Sumurung

Staf Administrasi

Linda Purnamasari, Gatot

Sirkulasi

Supriyono

Alamat Redaksi

Gedung Lemhannas RI

Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta

Telp. (021) 3832108, 3832105**Fax** (021)-34551926**Email** : humas.lemhannasri@gmail.com**Website** : www.lemhannas.go.id**Dicetak oleh** : PT. Yellow Multi Media

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi

Pembaca yang budiman, tanggal 9 April 2014 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai hari pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden memang masih satu tahun lagi.

Dalam konteks rivalitas para calon, sesungguhnya waktu satu tahun itu cukup pendek dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dapat dipahami jika saat ini media massa bergerak cepat guna mengisi atmosfer pewacanaan politik komponen bangsa.

Berbicara tentang kepentingan segenap bangsa, selayaknya setiap pemilik hak suara menaruh perhatian serius. Pasalnya, kebesaran Indonesia akan semakin nyata jika bangsa ini dipimpin oleh sosok yang memiliki kemampuan yang besar pula.

Bertolak dari premis tersebut, Swantara edisi keempat menurunkan laporan utama perihal mencari sosok calon pemimpin nasional.

Pada laporan utama ini Redaksi mengemas buah pemikiran Gubernur Lemhannas RI, mantan pejabat pada kabinet terdahulu dan menteri yang sedang menjabat. Selain itu juga ada pendapat politisi, dosen sekaligus peneliti, insan pers, sastrawan, pengusaha, tokoh pemuda dan perempuan.

Ragam narasumber laporan utama ini mencerminkan ragam ide dan aspirasi dari berbagai generasi dan profesi, yang semuanya disajikan untuk melengkapi informasi penting bagi pembaca setia Swantara.

Mengikuti Laporan Utama, tentu saja Redaksi memastikan rubrik-rubrik khas Swantara menghampiri pembaca, termasuk Rubrik Serambi Monas.

Besar harapan kami, melalui pewacanaan yang baik, segenap komponen bangsa dapat memberikan partisipasi terbaik demi terwujudnya cita-cita luhur bangsa ini.

Terkait partisipasi pembaca, Redaksi sangat mengharapkan saran-saran yang membangun, agar pada masa mendatang majalah ini dapat bertumbuh sebagai majalah terkemuka, dan menjadi acuan utama dalam bidang ketahanan nasional.

Terima kasih dan selamat membaca.

Salam,

Pemimpin Redaksi

Surat Pembaca

Penyediaan Sarana Pra Sarana Bahasa Inggris

Seiring berkembangnya teknologi informasi, tiap orang kini memiliki kesempatan dan tantangan yang sangat luas untuk berkomunikasi secara internasional. Dalam hal ini Bahasa Inggris sebagai bahasa global dunia digunakan sebagai alat komunikasi di berbagai bidang. Melalui kemampuan komunikasi yang baik, tentunya tiap orang dapat menampilkan kompetensinya masing-masing, termasuk dalam meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan Lemhannas RI.

Namun demikian, tidak sedikit para pegawai Lemhannas mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa ini. Kebanyakan menganggapnya sebagai bahasa yang sulit dipelajari. Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia No . 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam dunia pendidikan, yakni dalam bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas kemampuan (kompetensi) keterampilan guru, siswa serta tenaga pendidikan yang terkait.

Atas dasar tersebut, diharapkan adanya penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten melalui penyelenggaraan kursus atau pelatihan-pelatihan, perkuliahan bahasa inggris, penyelenggaraan MC dalam wacana bahasa inggris, dan penyediaan fasilitas belajar yang mendukung seperti lab bahasa inggris. Visi penyelenggaraan pendidikan bahasa inggris ini yaitu dapat meningkatkan sumber daya manusia di institusi dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi bahasa inggris mampu mendukung baik nasional maupun internasional. Kami berharap, melalui program tersebut dapat mengembangkan SDM dan mendidik para lulusan menjadi tenaga yang kompeten sehingga dapat berperan serta secara profesional di Institusi dalam kemampuan meningkatkan bahasa inggris yang dapat diandalkan, serta menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi dalam bahasa inggris sesuai dengan kebutuhan.

Dari pengembangan pelatihan bahasa inggris ini diharapkan pula para lulusan fasih berbicara dalam berbahasa inggris, mempunyai pengetahuan ruang lingkup dunia kerja, menerjemahkan dengan baik dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris dan sebaliknya, menulis dokumen-dokumen yang dibutuhkan di tempat kerja dengan baik dalam bahasa inggris, mampu berbicara bahasa inggris sebagai protokoler institusi bila dibutuhkan, dan mampu sebagai translator.[]

NI PUTU NALA (Staf Dirjian Hubungan Internasional)

“Mainstream” Lemhannas RI Melalui Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Perpustakaan

Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) dalam mata nasional maupun regional telah ditempatkan sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan di samping pemikiran strategisnya. Sumbangan tokoh-tokoh penting yang lahir darinya telah dicatat dalam sejarah kemajuan Indonesia. Namun demikian, seiring dengan kemajuan zaman, lembaga ini harus tetap menjaga mainstream-nya. Ia menjadi model bahkan icon kemajuan Indonesia. Sikap ini harus dijiwai oleh semua sumber daya yang ada, salah satunya SDM yang ada di Lemhannas RI.

Hal terpenting dalam meningkatkan kualitas SDM, adalah dengan mendorongnya menjadi orang-orang berkualitas dan berintegritas. Pastinya, karakter ini didapatkan dari kuantitas membaca. Semakin sering berinteraksi dengan buku, maka sinergitas antara kemajuan lembaga dan pegawai akan terwujud. Hal tersebut dapat difasilitasi oleh peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan. Sebab, ia adalah bagian penting dalam membangun karakter SDM berkualitas itu. Sebagai pegawai yang gemar gemar baca tulis, saya berharap buku-buku perpustakaan pun harus mampu menjawab tuntutan era modern. Menumbuhkan kecintaan para pegawai dan siswa menjadi para pembaca setia, perpustakaan harus melakukan inovasi dan terobosan yang mampu merangsang kenyamanan dan ketertarikan. Misal, adanya layanan Wi-Fi, perlombaan “pembaca setia” atau bedah buku yang wajib diikuti. Langkah-langkah ini akan semakin menaburkan, bahwa perpustakaan Lemhannas menjadi pionir membangun SDM andal. Semoga apa yang menjadi harapan dan saran kecil ini, merupakan masukan bagi kejayaan Lemhannas RI. Mari membaca, dan menulis.[]

KANA KURNIAWAN (Penata Administrasi Subbag Bangbinkar Bag Peg Lemhannas RI)

Daftar Isi

Sejarah

- 6 Profil Kepemimpinan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

Laporan Utama

- 12 Mencari Sosok Pemimpin Nasional
- 17 Menyiapkan Pemimpin yang Berkarakter
- 19 Peningkatan Potensi Perempuan Dalam Kepemimpinan Nasional
- 22 Sosok Pemimpin Nasional yang Ideal
- 24 Lemhannas RI Perlu Bentuk Kaukus
- 26 Politik Sebagai Alat dan Parpol Sebagai Wadah
- 27 Pemimpin Harus Ciptakan Perbaikan
- 28 Tak Perlu Dikotomi Calon Pemimpin
- 30 Keberpihakan Terhadap Perempuan Kriteria Penting dari Sosok Pemimpin
- 32 Saatnya Pemuda Ambil Posisi Tawar
- 34 Mencari Pemimpin yang Berkarakter
- 36 Indonesia Tidak Butuh Pemimpin Pragmatis
- 38 Pemimpin yang Mampu Menciptakan Bangsa Mandiri
- 40 Kembalinya Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Perlu Sinergitas Elemen Bangsa
- 42 Jenderal yang Baik Adalah Prajurit yang Baik



Opini

- 44 Konsep Ideal Kepemimpinan Pada Pemilu 2014
- 47 Merindukan Kepemimpinan Nasional yang Transformatif

Harapan Peserta

- 49 Pemimpin Bukan Superman
- 50 Kepemimpinan Tangguh
- 51 Efisiensi Proses Politik
- 52 Kepemimpinan Dulu dan Sekarang

Hot Issue

- 53 Polemik Isu Pemukiman Yahudi
- 55 Wacana Pembentukan Pengadilan HAM

Seputar Kita

- 56 Peningkatan Metode Pengajaran Efektif Dalam Upaya Mendukung Pematapan Nilai-nilai Kebangsaan

Profil

- 60 Marsekal Muda Syahrul Anshory
- 64 Bambang Agus Susilo Bagian Penomoran Surat Keluar dan Pengarsipan Lemhannas

Suara Alumni

- 66 Kepemimpinan Antara Omar dan Jokowi
- 66 Sosok Pemimpin Nasional
- 67 Mencari Sosok Pemimpin Nasional
- 68 Moral dan Integritas Pemimpin

Sosok

- 72 PKBM Bina Insan Mandiri, Sekolahnya Para Master

Serambi Monas

- 75 Korupsi





Profil Kepemimpinan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa

Setiap zaman melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhannya, dan cenderung mempunyai kesamaan, yaitu kesamaan mewakili aspirasi rakyat, memperjuangkan kesejahteraan untuk kehidupan yang lebih baik dan beradab. Indonesia sebagai bangsa yang besar mempunyai pemimpin dengan karakter dan gaya kepemimpinan berbeda, pada setiap zamannya seperti Soekarno, Hatta, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati serta Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Berikut sekilas ulasan perjalanan para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia.



KEPEMIMPINAN SOEKARNO

Presiden Republik Indonesia yang pertama, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno menjadi salah satu juru kunci dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, bapak proklamator. Sebagai orator yang ulung, dia bisa membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat disimak dari gaya kepemimpinannya yang dekat dengan masyarakat, baik masyarakat hukum, politik, pendidikan, ekonomi, seniman dan masyarakat pada umumnya. Kecenderungan tersebut dapat

dirasakan dari emosi kedekatan yang tiada batas, baik dari sikap dan kebijakannya dalam menentukan keputusan.

Selain itu, gaya kepemimpinan Soekarno juga berorientasi pada moral dan etika dalam memimpin suatu bangsa ataupun partai, yaitu pada usia 26 tahun telah memimpin sebuah partai yang mempunyai arah perjuangan kemerdekaan. Melalui sikap, kerja keras dan perjuangannya tersebut, tak jarang banyak pengikutnya yang fanatik. Melalui moral, etika intelektualitas dan kecerdasan yang ia miliki, kemudian Soekarno mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Soekarno juga sosok pemimpin yang penuh dengan inisiatif dan inovatif, sehingga gagasannya kerap dijadikan sebagai contoh kepemimpinan yang menjadi panutan, baik dan berkualitas. Kondisi tersebut dapat dirasakan dalam keputusannya untuk tidak bergantung pada bangsa-bangsa barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Sebuah sikap yang sangat menekankan pentingnya persatuan dalam nasionalisme, kemandirian sebagai sebuah bangsa dan anti penjajahan.



KEPEMIMPINAN BUNG HATTA

Lain Soekarno lain pula Moh. Hatta atau yang akrab dikenal dengan sebutan Bung Hatta, wakil presiden RI kedua. Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902, di Bukittinggi, dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Dalam meraih kemerdekaan Bung Hatta memberikan kontribusi yang sangat besar. Yaitu kontribusi yang tidak lekang dari ingatan bangsa yang ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan menjadi panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno menjadi ketua, Hatta sebagai wakil, beranggotakan wakil-wakil daerah seluruh Indonesia.

Mulai sejak itu pulalah, Hatta selanjutnya menjadi wakil Soekarno dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan bangsa Indonesia. Selama jadi wakil presiden dia aktif memberikan ceramah di perguruan tinggi, menulis karangan, menulis buku, aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsep ekonomi yang dimilikinya. Dengan kata lain, Bung Hatta dikenal sebagai ilmuwan yang bisa dan pintar membaca perasaan rakyat serta memberikan jawaban atas kegelisahan rakyatnya. Bung Hatta berprinsip bahwa seorang pemimpin harus bisa menangkap

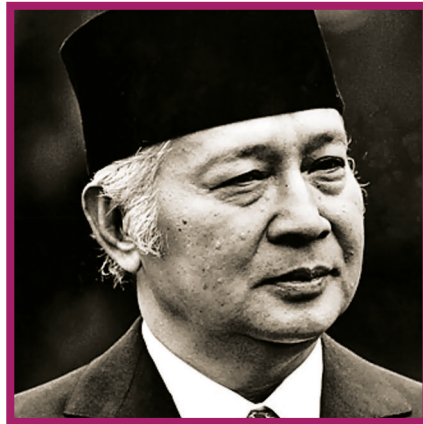


persoalan rakyat dari yang terkecil hingga persoalan besar. Pemimpin harus bisa mengendalikan apa yang dikehendaki oleh rakyat atau menjadi juru bahasa atas perasaan serta kemauan rakyat.

Bung Hatta juga berpendapat bahwa dalam sejarah Indonesia, masyarakat terpelajar, seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan masyarakat terpelajar lainnya banyak terlibat dalam membangkitkan semangat serta gelora perlawanan rakyat terhadap penjajahan, selanjutnya masyarakat terpelajar inilah yang menjadi cikal-bakal pemimpin bangsa. Lebih jauhnya masyarakat terpelajar pulalah yang membuka mata rakyat yang kemudian mengubah *individuale actie* menjadi *massa actie* (aksi perorangan menjadi aksi orang banyak yang tersusun dalam satu badan) yang selanjutnya melahirkan psikologi kolektif (kemauan bersama untuk berdaulat, merdeka, sejahtera dan maju).

Karakter kepemimpinan Bung Hatta sudah terlihat sejak remaja. Pada saat itu, Bung Hatta aktif dalam banyak organisasi. Sejak tahun 1916, lahir perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond menjabat sebagai bendahara. Bung Hatta menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya organisasi,

sehingga selanjutnya ia menerapkan konsep koperasi. Sejak 1926 - 1930, Hatta dipilih menjadi Ketua PI (Perhimpunan Indonesia). Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang memengaruhi jalannya politik di Indonesia.



KEPEMIMPINAN SOEHARTO

Bicara Soeharto tentu tidak hanya bicara sosoknya sebagai presiden di Indonesia, akan tetapi bicara karakter kepemimpinannya selama menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia. Soeharto lahir dari keluarga petani sehingga mengenal betul bagaimana cara membangun bangsa ini melalui pertanian. Dia lahir pada 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombang, Jawa

Tengah. Setelah enam bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombang serta resmi menjadi anggota TNI, pada 5 Oktober 1945.

Salah satu keberhasilan Soeharto dalam 30 tahun memimpin Indonesia adalah mengurangi kemiskinan melalui pembangunan sektor pertanian. Hal tersebut dipilih karena Indonesia adalah Negara agraris, Negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang selanjutnya bisa diberdayakan dalam kesejahteraan bersama, membangun bangsa dan negara menjadi lebih maju pada sektor pertanian. Sehingga, pada masa Orde Baru tersebut sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung mata pencariannya pada sektor pertanian, dan pertanian tanah air menjadi sangat diperhatikan lewat dukungan kebijakan makro dan mikro yang konsisten. Kebijakan ekonomi makro direalisasikan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan anggaran dan kontrol inflasi, serta dari sisi kebijakan mikro, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan tingkat upah untuk menjamin harga pangan dan nilai tukar. 20 persen APBN dianggarkan untuk membangun jalan agar proses penanaman, panen dan distribusi berjalan dengan baik.

Pada saat yang bersamaan harga pangan, terutama beras, dikendalikan dengan baik, petani dijamin mendapat sarana produksi dalam jumlah dan waktu tepat dengan harga stabil dan terjangkau. Di luar beras dan palawija, Presiden RI kedua tersebut juga berhasil membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku pada ternak yang sudah 100 tahun ada di Indonesia, meningkatkan produksi daging dan telur ayam, serta susu.



Sehingga, melalui ketekunan, kerja keras, kekonsistenan serta keteladanan yang dimilikinya itu, pada 1985 Soeharto menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk keberhasilan menjadikan Indonesia dari pengimpor terbesar menjadi swasembada beras tahun 1984. Petani Indonesia bahkan dapat berinisiatif menyumbangkan gabah mereka untuk membantu kelaparan di Etiopia. Soeharto juga dianugerahi UN Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan. Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar di Markas Besar PBB, New York bertepatan dengan ulang tahun Soeharto yang ke-68 pada 8 Juni 1989. Soeharto makin dilirik ketika berhasil menegakkan harkat bangsa Indonesia di latar ekonomi Asia. Di ASEAN, dia dianggap berjasa ikut mengembangkan organisasi regional ini sehingga diperhitungkan di dunia.



KEPEMIMPINAN HABIBIE

Bacharuddin Jusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundur-

kan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Di mata masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, Habibie dikenal sebagai sosok ilmuwan. Sebagai seorang ilmuwan dia menamatkan pendidikannya di jurusan teknik mesin, Institut Teknologi Bandung pada 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Dari sanalah selanjutnya Habibie menerima gelar diplom ingénieur pada 1960 dan gelar doktor ingénieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat, mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Melalui perjalanan kepemimpinannya tersebut, banyak pihak yang berpendapat bahwa kepemimpinan B.J Habibie dikenal sebagai kepemimpinan yang pintar. Gaya kepemimpinan B.J Habibie dikenal sebagai pemimpin yang sangat dedikatif, fasilitatif dan demokratis. Sehingga pada masa pemerintahannya, meskipun waktunya terhitung sebentar kebebasan pers dibuka lebar-lebar, sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Pada saat itu pula peraturan perundang-undangan banyak dibuat. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Habibie sangat terbuka dalam berbicara, akrab dalam bergaul, tetapi tidak jarang eksplosif. Sangat detailis, suka uji coba. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahannya semua orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum, baik dalam bentuk rapat, unjuk rasa atau demonstrasi (tulisan dan lisan).



KEPEMIMPINAN GUS DUR

Selain pemimpin-pemimpin yang telah disebutkan di atas, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur adalah salah satu sosok pemimpin yang fenomenal di tanah air. Dengan cara



[Foto: k2911fm.com]

berpikir, bersikap dan mengambil kebijakan yang ditempuh, cukup memberikan inspirasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Beberapa diantaranya pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa.

Pemimpin yang lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 ini menjadi pemimpin politik dan menjadi presiden Indonesia keempat, merupakan mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam catatan kariernya ia pernah menjadi jurnalis majalah Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton

pertandingan sepak bola, juga aktif pada Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut.

Selanjutnya Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya. Pada 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gus Dur mengajar subyek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi.



KEPEMIMPINAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Megawati Soekarnoputri atau yang akrab dipanggil mbak Mega ini merupakan anak kedua dari Presiden RI pertama dan menjadi perempuan Indonesia pertama yang menjadi presiden. Dengan kata lain, selain karena dukungan nama besar dari ayahnya, Megawati Soekarnoputri mempunyai kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin sekaligus mematahkan prasangka bahwa wanita tidak mampu menjadi pemimpin, apalagi memimpin suatu negara.

Atas kesempatan yang begitu besar dan mulia itulah, selama memimpin Mbak Mega menunjukkan kualitas kepemimpinannya, kualitas intelektual dan kualitas sosial kemasyarakatan. Karier politiknya sesungguhnya dimulai pada 1986, sebagai wakil ketua PDI cabang Jakarta Pusat. Perbedaan yang sangat signifikan sangat kental terasa, dengan kemampuannya dan dengan waktu yang tidak begitu lama, yaitu sekitar satu tahun kemudian ia terpilih menjadi anggota DPR. Lagi-lagi, karier kepemimpinan Megawati semakin berjalannya waktu semakin matang. Pada 1993 lewat kongres luar biasa PDI, Megawati terpilih menjadi ketua umum PDI. Pada

1999-2001 diangkat menjadi Wakil Presiden, selanjutnya pada Pemilu 2001, Megawati terpilih menjadi Presiden RI kelima. Melalui sederet pengalaman kepemimpinan yang ia miliki, seperti menjadi pemimpin partai mulai dari cabang sampai pusat membuatnya dipercaya untuk memimpin sebuah bangsa yang besar.

Jika dilihat dari karakter kepemimpinannya, Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Hal tersebut terbukti dalam pemberian keputusan dalam setiap kebijakannya. Dengan kata lain, sebelum memberikan keputusan terhadap suatu hal, Mega menerapkan gaya kepemimpinan yang penuh kehati-hatian. Melihat kondisi objektif yang terbangun selama pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dia merupakan sosok pemimpin cukup demokratis.

Berhasil menyetatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini yaitu perbankan nasional menjadi relatif sehat. Serta masih banyak lagi kelebihan yang bisa dilihat dari karakter kepemimpinan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, meski dalam waktu yang tidak sedemikian lama.



KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Jendral TNI (Purn) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949. Ia adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Presiden yang akrab disapa dengan tiga huruf kapital "SBY" ini merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun. Ia terpilih kembali dalam Pemilu Presiden 2009 untuk periode kedua bersama Wakil Presiden Boediono.

Kepemimpinan Presiden SBY telah didedikasikan untuk kemajuan bangsa dalam dua masa kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I

(2004-2009) dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2009-2014).

Dalam periode 2004-2009, kepemimpinan Presiden SBY ditandai dengan penataan penanganan masalah dalam negeri. Di antaranya tercatat penuntasan konflik bersenjata dan politis di Aceh, Papua serta gangguan terorisme. Kabinet juga memfokuskan perhatian pada upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa ini menempati urutan kedua terbaik di jajaran G-20 setelah China. Pemerintah fokus mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan landasan pemerintahan yang baik dan bersih (good government dan good governance).

Sebagai komitmen untuk menjalankan kewajiban konstitusi, kepemimpinan Presiden SBY juga menyetuh pentas internasional yang ditunjukkan dengan tetap berpegang teguh pada politik bebas aktif guna memajukan perdamaian dunia.

Dalam satu windu (delapan tahun) masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi dengan diselenggarakannya Pilkada secara langsung.

Di masa ini pemerintah juga semakin meningkatkan komitmen pada pemberantasan mafia hukum, penggiatan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, penanggulangan narkoba dan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis.

Dalam tahun-tahun terakhir ini peran Indonesia di kancah internasional semakin nyata, khususnya dalam upaya mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G-20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G-8 Plus, dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Catatan kepemimpinan Presiden SBY masih akan terus berlanjut hingga masa bakti formalnya sebagai pemimpin nasional, yang menurut konstitusi berlangsung hingga 2014 mendatang.



[sumber: <http://www.tinyurl.com>]



Mencari Sosok Pemimpin Nasional

Kalau diibaratkan sebuah bus, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kendaraan atau busnya, pemimpin (presiden/pemerintah) adalah supirnya, sedangkan pembantu pemimpin, seperti menteri, gubernur, bupati dan jenis-jenis pembantu pemimpin lainnya adalah kondektornya, dan rakyat adalah penumpangnya. Jadi agar bus tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar sampai pada tujuan, semuanya tergantung pada pemimpin (supir) yang

harus menjalin hubungan kerja sama dengan para kondektornya.

Sedangkan rakyat yang diibaratkan sebagai penumpang hanya patuh, membiarkan dirinya dibawa dalam bus yang dikemudikan dan dikoordinasikan oleh para pemimpinnya. Patuh dan nurut selama kebijakan dan rencana untuk kesejahteraan, perbaikan benar-benar berpihak pada rakyat dan kemajuan bangsa. Dengan kata lain, para pemimpin tersebut yang telah diibarat-

kan sebagai supir dan kondektur harus mengerahkan segala kemampuan dan keahliannya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Syarat Menjadi Pemimpin

Mengingat beratnya amanah dan tugas seorang pemimpin, maka tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Ada kriteria yang harus dipenuhi dan berbeda di masing-masing negara sesuai dengan cita-cita luhur dan ke-

butuhan bangsa itu sendiri, sehingga persyaratan kualitas menjadi pertimbangan untuk dipilih menjadi pemimpin suatu negara.

Mengenai syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pemimpin, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menyampaikan, ada empat syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa dinyatakan sebagai pemimpin yang berkualitas. Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai fisik yang sehat dan kuat, baik panca indra maupun motoriknya. Kedua, pemimpin harus punya kompetensi yang dapat ditinjau secara global, regional, nasional.

Untuk hal ini, Lemhannas RI sebagai lembaga kajian negara telah mengeluarkan indeks kepemimpinan nasional sebagai salah satu cara dan alat penilaiannya. Ketiga, harus mempunyai Wawasan Kebangsaan. "Kalau fisik dan kompetensi bagus, tapi rasa kebangsaannya bobrok, maka pemimpin tersebut kerjanya hanya akan menjual negeri saja. Hal itu terjadi karena calon pemimpin tersebut tidak memiliki rasa nasionalisme, yang dipentingkan hanya laba semata," tambah Budi Susilo.

Menurutnya, nasionalisme jangan dilihat sebagai angkat senjata saja, tapi bisa dilihat dari kacamata lainnya, seperti pada sepak bola, pendidikan, seni dan budaya dan lain-lainnya yang juga menjadi bagian dari rasa nasionalisme. "Setelah semuanya itu terpenuhi, syarat terakhir pemimpin harus mempunyai moral yang baik dan kuat," jelasnya.

Mengenai syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, Try Sutrisno menjelaskan, setiap pemimpin Indonesia harus memiliki visi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, karena apabila seorang pemimpin mempunyai visi yang berbeda, maka akibatnya arah pemerintahan akan berbeda dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perjalanan

bangsa dan negara Indonesia mengalami goncangan berat pada saat pemimpin bangsa atau calon pemimpin bangsa ternyata kurang mampu atau kurang memahami visi Indonesia secara baik.

Belajar dari pengalaman selama ini, maka saatnya untuk mempertegas komitmen pemimpin untuk selalu setia pada visi bangsa dan tidak mengedepankan visi organisasi apalagi visi kelompok. Memang perlu di elaborasi visi pada periode tertentu, namun hal itu harus dirumuskan secara bersama dan tidak bertentangan dengan visi yang menjadi cita-cita bangsa.

Dengan mengikuti dan belajar dari perjalanan bangsa dan negara selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosok pemimpin nasional yang ideal bagi bangsa Indonesia, sebagai negara besar, seharusnya dirumuskan dalam suatu undang-undang sesuai dengan visi dan misi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adalah suatu masalah besar, apabila muncul seorang pemimpin nasional yang berdasarkan rekam jeaknya ternyata seorang yang kurang memahami dan menghayati visi, misi bangsa dan negara secara utuh. Untuk itu perlu kriteria umum maupun khusus bagi setiap pemimpin sesuai dengan tantangan zamannya yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila.

Kaderisasi dan Ideologi Pemimpin

Maruarar Sirait, anggota komisi XI DPR RI, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDI-P) memandang, masalah yang tengah dihadapi bangsa saat ini terletak pada masalah ekonomi, hukum dan pluralisme. "Hal yang utama untuk menangani hal tersebut adalah, pemimpin harus memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Ia memiliki semangat pemberdayaan masyarakat, dan bisa memberi suri teladan kepada rakyat. Jangan beli kucing dalam karung, pemimpin yang baik tentunya harus mempunyai rekam jejak yang baik dan berjuang dengan keringat dalam mempersembahkan prestasi untuk rakyat," kata Maruarar.

Permasalahan kepemimpinan saat ini, menurut Maruarar adalah lemahnya kepercayaan masyarakat. Menurutnya kepercayaan hanya bisa dijawab dengan bukti dan kinerja nyata. Terkait kiris kepercayaan tersebut, Maruarar juga menyampaikan bahwa krisis kepercayaan terjadi karena banyak pemimpin yang tidak memenuhi janji-janji yang banyak terlontar saat masa kampanye. Untuk itu, Maruarar menegaskan bahwa pemahaman atas ideologi dan karakter kebangsaan menjadi parameter penting.

Mengenai persoalan pluralisme Yenni Wahid menyampaikan, partai yang memperjuangkan kepentingan kelompok, suku, serta agamanya boleh saja, tapi tidak boleh lepas dari bingkai NKRI. Setelah tumbang-nya kepemimpinan otoriter di masa Orde Baru perkembangan demokrasi di tanah air semakin waktu semakin menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang signifikan tersebut selanjutnya dapat diukur dengan banyaknya partai politik yang lahir pasca reformasi.

Lebih jauhnya tidak sedikit parpol yang berlandaskan atau yang berasaskan agama. Terkait hal tersebut Yenny Wahid menjelaskan, berdirinya sebuah parpol yang berlandaskan agama atau pun suku itu bukanlah persoalan atau menjadi sebuah masalah serius. Yang menjadi masalah sesungguhnya adalah ketika dia (parpol) tersebut melupakan kebhinekaannya. Lebih lanjut aktivis Islam dan politisi Indonesia tersebut menyatakan bahwa politik itu alat untuk memperjuangkan kepentingan, parpol adalah sebuah wadah di mana orang banyak berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Terkait masalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, Politisi Partai Golkar DR. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC menyampaikan, turunnya kepercayaan publik juga disebabkan peran media dalam pemberitaan

yang sering mengambil sudut pandang dari sisi buruk sebuah partai, dan media juga lebih senang memainkan jurus *bad news is good news*, demi kepentingan industri media mereka. Poempida juga menyampaikan bahwa semua orang bisa menjadi tokoh dan pemimpin, akan tetapi untuk menjadi seorang pemimpin tersebut harus melalui proses penempahan yang panjang dan memerlukan sebuah perjuangan. Dan semua itu bisa dicapai melalui pengalaman, diskusi-diskusi, membaca dan berorganisasi.

Selain hal tersebut Poempida juga merespons persoalan kaderisasi. Katanya, kaderisasi sendiri sangat penting karena politik itu memerlukan kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari para kadernya. Mengutip pernyataan Bung Hatta, jika partai tidak menjalankan kaderisasi, maka anggota partai hanya akan

menjadi “pembek” keinginan pimpinannya. Tentu saja hal ini membuat partai menjadi lembek dalam memperjuangkan pergerakannya, malah hal ini kemudian dapat membunuh pergerakan itu sendiri. “Kemerdekaan Indonesia, seperti kata Bung Hatta tidak akan terwujud hanya dari keinginan para pemimpin pergerakan saja, tanpa didukung perjuangan dan keyakinan rakyat banyak dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri,” jelasnya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Pengamat sosial Imam Prasojo. Imam berpendapat bahwa seorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika tidak mampu melakukan hal itu, dia belum bisa disebut sebagai pemimpin. “Pejabat yang hanya berdiam diri, tidak

melakukan apa-apa, bukanlah seorang pemimpin” tuturnya.

Dengan kata lain kaderisasi kepemimpinan juga harus melalui proses panjang dan tahapan-tahapan tertentu, misalnya di organisasi sosial, lembaga pemerintahan. Dan harus dibuktikan kemampuannya dalam menangani permasalahan mulai dari tingkat yang paling rendah, seperti di kabupaten, propinsi, kemudian pada tataran nasional.

Berangkat dari kondisi objektif tingginya keterlibatan pemimpin terhadap korupsi beserta kasus-kasus lainnya, Wahyu Muryadi pemimpin redaksi majalah berita mingguan Tempo ini menyatakan bahwa pemimpin harus mampu mengatakan tidak. “Selain itu, pemimpin juga harus pandai negosiasi ke dalam maupun ke luar, dalam hubungan dunia internasional. Karena dalam beberapa hal,



[Foto: genderwora48.com]

ada banyak faktor yang menyebabkan posisi tawar kita lemah terhadap dunia internasional," katanya.

Akibat dari gelombang persoalan bangsa yang kian besar ditambah lemahnya karakter yang dimiliki, maka pemimpin-pemimpin kita kerap terbawa arus. Ada kalanya kelemahan itu merupakan ketakutan kita. "Siapa pun presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat, harus punya kepercayaan diri yang kuat, bahwa apa yang diambil ini ujung-ujungnya demi kepentingan dan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pun kelompok. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari rumah, ini harus konsisten, menuntaskan.

Bima Arya Sugiarto, Ketua DPP PAN menyampaikan, dirinya percaya setiap masa itu ada pemimpinnya. Dirinya juga meyakini bahwa seorang pemimpin itu lahir dalam konteks tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ada karakter seorang yang pemimpin tepat di zamannya, namun belum tentu tepat di zaman yang berbeda. Bima pun menjelaskan secara singkat mengenai masa dan persoalan kepemimpinan sebelumnya, seperti kepemimpinan Bung Karno.

Menurut Bima, Bung Karno sangat tepat di masa ketika saat itu kita sangat membutuhkan sosok pemimpin yang berani berbicara secara 'keras' terhadap kekuatan asing. Tetapi saat dimasa kita mulai fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, muncullah sosok pemimpin seperti Pak Harto yang lebih sejuk dan telaten dan berperan menjadi stabilisator. Berbeda lagi saat kita berada di era reformasi, kita perlu sosok pemimpin yang benar-benar bisa menjamin pluralisme keberagaman, seperti Pak Habibie yang berani membuka saluran aspirasi politik, kemudian Gus Dur dengan sosok yang begitu demokratis. Pak SBY dengan karakter yang lebih artikulatif dan komunikatif diperlukan sebagai sosok pemimpin saat ini.

Peran Perempuan

Yang tak kalah pentingnya adalah mengenai persoalan perempuan, baik peran dan fungsi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun partisipasi politik perempuan atau minimnya kepemimpinan perempuan dalam suatu pemerintahan. Menyoal hal tersebut Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) menyampaikan bahwa jumlah partisipasi politik perempuan Indonesia saat ini sangat minim, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu, pertama, hambatan budaya yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai superior yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi inferior dan termarginalisasi.

Kedua, hambatan sosial terkait dengan struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai warganegara kelas dua (*sub ordinasi*) atau pelengkap. Ketiga, sumber daya keuangan yang dimiliki perempuan kurang mendukung dalam aktivitas politik, sebab perempuan memiliki daya dukung keuangan lebih sedikit jika dibanding dengan sumber daya keuangan yang dimiliki laki-laki. Keempat, perempuan masih dihadapkan pada struktur politik yang timpang.

Akhir-akhir ini sudah mulai terlihat adanya keberpihakan dan pengakuan akan perlunya peranan kaum perempuan dalam politik, namun kebijakan-kebijakan tersebut masih diberlakukan "setengah hati". Contohnya UU No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilu telah memasukkan *affirmative action* 30% caleg perempuan pusat dan daerah, tetapi belum menjamin kepastian menjadi anggota parlemen, karena masih ada sisi-sisi politik yang mempersempit peluang perempuan menjadi anggota parlemen dan atau tergantung dari kebijakan pimpinan partai politiknya.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Yuniyanti Chuzaifah berpendapat bahwa keikutsertaan

perempuan dalam kancah politik, sampai saat ini dan berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah perempuan dalam partai politik berkisar 18 % atau masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai alasan dikemukakan mengapa ketentuan tersebut belum dipenuhi. Alasan yang paling sering muncul adalah ketersediaan sumber daya perempuan di partai politik yang terbatas.

Namun menurut Yuni yang merupakan lulusan S2 dari Fakultas Teologi dan Seni Bidang Islamologi, Leiden University ini, bahwa sarjana perempuan di Indonesia tidak sedikit, yang berpredikat *cum laude*-pun banyak di sejumlah perguruan tinggi. Ini berarti SDM perempuan itu ada, tetapi yang menjadi masalah adalah kultur parpol yang kurang memberi dukungan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Oleh karena itu, harus ada kesadaran bersama, baik dari seorang suami yang turut mendukung dan seluruh partai politik yang harusnya membuat mekanisme dalam partai agar dapat memudahkan perempuan berkecimpung dalam politik.

Tua Versus Muda dan Sipil Versus Militer

Jenderal TNI (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono. Mantan Kepala BIN di era Kabinet Gotong Royong yang lebih dikenal dengan nama A.M. Hendropriyono menjelaskan bahwa dalam konteks kepemimpinan, pentingnya membangun sistem dan konstruksi sosial, yang didesain pihak yang berkompeten secara bersama-sama. Perubahan sistem secara mendadak yang kontradiktif, dari totaliter menjadi bebas sebeb-bebasnya tidak bisa dibiarkan. Perubahan yang diperlukan bangsa ini sesungguhnya harus didesain dengan baik. "Saya sangat berharap, dalam disain ini rakyat akan melihat di dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Lemhannas-lah yang berada di depan mengibarkan bendera ini" jelasnya.

Tentang calon pemimpin nasional

dari kalangan muda dan sipil yang ia sampaikan baru-baru ini, Hendropriyono menjelaskan banyaknya *handicap* dari tokoh-tokoh tua. "Harus orang muda! Orang tua segenerasi saya sudah tidak tahu lagi apa yang dikehendaki oleh kaum muda" tandasnya, seraya meminta agar bangsa ini tidak terus-terusan berdiri di persimpangan jalan.

Mengenai persoalan kontrol tahu diri yang dimaksudkan, alumnus Kursus Singkat Angkatan (KSA) VI Lemhannas ini membeberkan faktor alami yang tidak bisa dilawan. Menurutnya, di dalam diri orang yang sudah tua, terdapat banyak hambatan. Salah satunya faktor *embolus*, yaitu permasalahan sumbatan dalam aliran darah yang akan banyak mempengaruhi kualitas kesehatan dan pengambilan keputusan.

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua KNPI Taufan Eko Nugroho R. Taufan menyampaikan bahwa faktanya saat ini banyak muncul tokoh-tokoh senior yang selayaknya menjadi panutan. Malah berlaku pragmatis, memandang sesuatu lebih pada sudut manfaat bagi diri atau kelompoknya. Padahal selayaknya sisi ideologi harus terus dipertebal dan diperkaya.

Menciptakan pemimpin bangsa di masa depan yang terbebas dari praktek-praktek korupsi, menurut dia, merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. "Para pemuda menyaksikan sendiri sejumlah tokoh-tokoh senior yang terjerat kasus-kasus korupsi, padahal sebagian dari mereka juga piawai memberi petuah agar pemuda tidak melakukan perilaku tercela tersebut," ujarnya.

Taufan juga menyampaikan, bahwa kiprah pemuda dalam kancah ketokohan nasional sangat penting disiapkan, karena jangan sampai jika telah mendapatkan kesempatan untuk memimpin bangsa ini, ternyata tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Diperlukan pula sikap ke-

dewasaan, walaupun bukan berarti cuma dilihat dari sisi usia. "Saya dorong mereka yang memiliki kapasitas untuk maju pada Pemilu 2014. Sebaliknya, ada juga teman-teman yang memiliki ambisi politik, tetapi kami nilai belum waktunya untuk maju, sehingga kami minta mereka bersabar dulu untuk mempersiapkan diri dan memperkaya pengalaman sampai 2019," jelasnya.

Hal tersebut dilakukannya agar jangan sampai setelah diberi mandat nanti, ternyata tidak mampu memikulnya bahkan hanya membuat masalah. "Saya menyaksikan sendiri, ada sebagian tokoh-tokoh pemuda yang potensial, tetapi belum matang, sehingga jika dipaksakan memimpin, akhirnya terpaksa menelan pil pahit, terjerat berbagai masalah," katanya.

Jika Jenderal TNI (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono dan Ketua KNPI Taufan Eko Nugroho R menyoal tua-muda, Luhut Binsar Panjaitan Mantan Menteri Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional menyampaikan bahwa "Tak perlu ada perilaku dikotomis membedakan calon pemimpin nasional, tua atau muda, sipil atau militer, tapi yang harus dicari adalah ia yang mampu memenuhi kriteria calon pemimpin," kata Luhut.

Luhut menegaskan, pemimpin tidak boleh menjadi raja, ia harus *down to earth*, berani mendengar keluhan dan kritik. *Mindset* yang ada didirinya harus dirubah, bahwa menjadi birokrat bukan untuk mencari uang dan kaya, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan bermimpi menjadi kaya kalau menjadi pejabat. Maka yang perlu dilihat adalah tiga hal yaitu *track record*-nya selama ini, yaitu latar belakang keluarga yang baik, *track record* jabatan yang baik, dan juga bersih dari korupsi," kata Luhut.

Terkait persoalan tua-muda, sipil-militer, budayawan Radhar Panca Dahana menyampaikan bahwa semuanya itu tidak masalah. Dalam artian, kaum muda dan kaum tua memberikan timbal balik yang positif. Dengan kata lain, kaum tua memberikan pendidikan kepemimpinan, sifat dan sikap yang baik, secara teori dan praktik, sedangkan kaum muda menangkap, memahami serta mempraktikkannya dengan baik pula.

"Intinya selama dia melakukan itu untuk mengedukasi dirinya, itu tidak masalah. Kalau mengekor saja, itu bisa kita golongkan sebagai pemuda yang lemah, dan ternyata sistem politik kita saat ini justru melahirkan pemuda yang lemah seperti itu. Pemuda yang tidak berkepribadian, karena iklim, tradisi, kebudayaan serta sistem politik meminta dia untuk menjadi *patron klien*.

Dia hanya mengekor saja pada atasan. Akhirnya melahirkan pemuda yang ABS (Asal Bapak Senang). Kerjanya hanya membuat ketua atau pemimpinnya senang. Itulah yang membunuh ketegaran dan karakter anak muda. Tinggal dibaca sendiri di partai-partai kita, apakah mereka mempraktikkannya. Ini menjadi tumor dalam kehidupan politik kita yang sudah kronis, bahkan penyakit itu juga hadir pada partai-partai yang baru," tandasnya.

Maka untuk bisa sampai pada tempat tujuan dibutuhkan kerja sama yang solid dalam sebuah tim atau lembaga. Kerja sama bisa dilakukan dalam bentuk apapun, seperti saling mengingatkan, saling menegur satu dengan lainnya dan saling membantu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Karena keselamatan perjalanan semuanya berada pada pemimpin sifat, sikap dan gaya pemimpin dalam menentukan keputusan serta kebijakan yang berpihak pada rakyat. (EH/SP/AB).

Budi Susilo Soepandji
Gubernur Lemhannas RI

Menyiapkan Pemimpin yang Berkarakter

Seorang pemimpin tidak hanya laku di dunia internasional, regional atau bahkan nasional saja, juga harus laku di provinsi dan laku bagi masyarakat daerah.

Menjelang pesta demokrasi 2014 suhu politik tanah air semakin hari semakin memanas, bagai bola liar yang sulit dikendalikan. Namun ada hal yang menarik dari kondisi tersebut, beberapa diantaranya adalah bahwa masing-masing orang, kelompok atau bahkan partai politik berlomba-lomba untuk mempersiapkan calon pemimpinnya yang berkaliber untuk menjadi presiden atau jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan atau pun dalam kelompoknya. Yang pasti untuk bisa menduduki jabatan terpenting tersebut atau untuk bisa menjadi pemimpin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mencalonkan atau dicalonkan tersebut.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., ada empat syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa dinyatakan sebagai pemimpin yang berkualitas. Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai fisik yang sehat dan kuat, baik panca indra maupun motoriknya. Kedua, pemimpin harus punya kompetensi yang dapat ditinjau secara global, regional, dan nasional. Untuk hal ini, Lemhannas RI sebagai lembaga kajian negara telah mengeluarkan indeks kepemimpinan nasional sebagai salah satu cara dan alat penilaiannya. Ketiga, harus mempunyai Wawasan Kebangsaan.

"Kalau fisik dan kompetensi bagus, tapi rasa kebangsaannya bobrok, maka pemimpin tersebut kerjanya hanya akan menjual negeri saja. Hal itu terjadi karena calon pemimpin tersebut tidak memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme, yang dipentingkan hanya laba semata," tambah Budi Susilo. Menurutnya, nasionalisme jangan dilihat sebagai angkat senjata saja, tapi bisa dilihat dari kacamata lainnya, seperti pada sepak bola, pendidikan, seni dan budaya serta lain-lainnya yang juga menjadi bagian dari rasa nasionalisme. Keempat "Setelah semuanya itu terpenuhi, syarat terakhir pemimpin harus mempunyai moral yang baik dan kuat," jelasnya.

Untuk menjawab kebutuhan dan syarat kepemimpinan tersebut, Lemhannas RI dalam studi-studinya secara mendalam, membahas kompetensi yang selanjutnya dapat dilihat dari Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) yang dibuat oleh Lemhannas RI. Nah, di sanalah kemudian Lemhannas RI berperan aktif dalam usaha mempertajam kualitas pemimpin baik pada level daerah, nasional, regional, maupun internasional yang cukup memberikan pengaruh.

Hal tersebut dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang besar dan berbhinneka, sehingga sangat jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. "Kalau negara-negara di Eropa dan Amerika, mereka terlebih dahulu menjadi negara bagian, setelah merdeka barulah mereka menyatakan diri sebagai negara kesatuan atau berserikat.



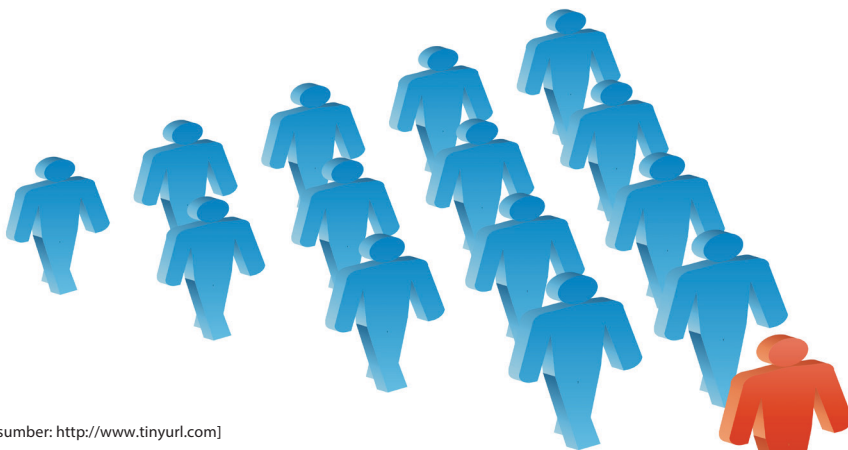
[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Sedangkan Indonesia, bersatu dulu, setelah kuat barulah bersama-sama mengusir penjajah dan bersama-sama mencapai impian. Inilah yang selanjutnya disebut gotong-royong, sehingga dalam menangani persoalan di negeri kita, dibutuhkan penanganan khusus," katanya.

Seorang pemimpin Indonesia, selain laku di dunia internasional, regional ataupun nasional juga harus laku di daerah, sehingga bahasa daerah juga tak kalah pentingnya untuk dimengerti oleh pemimpin. "Kalau ketemu dengan orang Jawa bisa bicara dalam bahasa/tahu adat istiadat Jawa, kalau ketemu orang Biak bisa berbincang/adat bahasa Biak, Manado bisa diskusi dengan bahasa/adat Manado. Kalau seperti ini, masyarakat juga senang melihat pemimpinnya menjadi bagian dari mereka. Artinya, kebiasaan dan keterpahaman bahasa juga dapat dijadikan parameter yang dapat diperhitungkan secara provinsial," ungkapnya.

Bibit Unggul

"Jangan terlalu risau dengan isu krisis kepemimpinan," tutur Gubernur. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak kekurangan pemimpin



[sumber: <http://www.tinyurl.com>]

yang berkualitas, namun yang perlu dilakukan masyarakat adalah harus berpikiran positif dan optimis. Juga jangan terjebak pada popularitas dan isu yang berkembang. "Indonesia punya pemimpin berkualitas yang dapat dilihat melalui proses belajar dan pengalaman. Kompetensi yang baik, tentunya juga harus didukung dengan moral yang baik," jelasnya.

Bukti bahwa negeri ini tidak krisis pemimpin adalah masyarakat bisa melihat atau bahkan menilai beberapa calon pemimpin yang mempunyai karakter dan integritas yang kuat untuk memajukan bangsa dan negaranya. Pemimpin yang ikhlas dalam membangun daerah ataupun bangsanya. Pemimpin-pemimpin tersebut selain melalui proses pendidikan formal seperti yang dilakukan oleh Lemhannas RI juga bisa dilihat di lingkungan kemasyarakatan.

"Disadari atau tidak, calon-calon pemimpin tersebut sesungguhnya ada di dalam lingkungan kerja atau di lingkungan kehidupan kita sendiri. Dengan kata lain, untuk menilai calon pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang bisa menjawab persoalan, masyarakat sendiri pun bisa melihat dan menilainya," kata Budi Susilo.

"Masyarakat juga bisa menilai dan mencari bibit unggul, melalui diskusi dan ide-ide dalam membangun masyarakat, maupun pandangannya terkait dengan masalah internasional seperti Laut Cina Selatan, pertikaian

Kamboja dan Thailand, hingga mengapa sampai terjadi persoalan Sipadan dan Ligitan?" ujarnya.

Partai politik memiliki peran aktif dalam mencari bibit unggul dan kaderisasi pemimpin, baik dari sipil maupun dari militer. Mengacu pada UUD NRI 1945 untuk menjadi seorang pemimpin, (presiden) harus melalui partai politik, tentunya pemimpin harus mempunyai pengalaman kepemimpinan.

Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana memopulerkan calon pemimpin tersebut? "Salah satunya bisa ditempuh melalui jalur parpol, pergaulan dan kemampuan untuk mengekspos diri. Sebab sekarang zamannya adalah tipe pemimpin yang aktif, bukan hanya pemimpin yang pintar. Pemimpin yang punya hati menolong orang miskin, turun ke masyarakat, pedagang kaki lima diajak dialog. Hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai proses alam," terang Gubernur.

Lemhannas RI sebagai tempat penggodokan pemimpin, sebagai tempat untuk belajar dan berlatih, tempat mencari pemimpin yang humanis, sudah mempersiapkan kebutuhan tersebut. Lemhannas RI turut serta memperhatikan kualitas dan memopulerkan kualitasnya, bukan sekadar namanya.

"Persiapan bibit unggul, agar tidak sekadar mengganti pemimpin, baik melalui kemampuan akademik, psikotes, maupun moral dan semangat. Inilah yang selanjutnya

merupakan salah satu ciri-ciri bibit unggul. Kalau sudah tahu punya potensi baik, jangan ditanam di tanah berbatu, (tapi) dididik di Lemhannas RI, diuji kemampuannya dan dipersiapkan, baik secara teori ataupun praktek. Melalui simulasi, masuk dalam laboratorium ketahanan nasional. Inilah yang selanjutnya saya sebut sebagai cara penyemaian, menjaga bibit unggul supaya tidak layu. Selanjutnya saya mengharapkan pendidikan kader parpol jangan terlalu eksklusif, karena salah satu pintu calon pemimpin adalah melalui parpol," terangnya.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan tentang pentingnya pendidikan politik. Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa pendidikan politik ini perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan formal. "Otak anak yang ada di sekolah dan perguruan tinggi harus diisi karena pada akhirnya mereka akan kembali pada masyarakat. Di tubuh ormas dan parpol juga pendidikan politik penting untuk diajarkan. Siapa pun yang duduk di parpol harus mengikuti pendidikan politik, Lemhannas RI menawarkan salah satu bentuk dan sebagai referensi atau model," jelasnya.

Selain pendidikan politik, Gubernur Lemhannas RI yang dosen di Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa organisasi juga tidak kalah pentingnya. Karena organisasi merupakan salah satu pilar dalam mencetak pemimpin. Sebagai tempat latihan, saling kerja sama dalam koridor yang telah ditentukan, tempat untuk mencapai tujuan, karena setiap organisasi punya dasar dan tujuan dalam pencapaian cita-cita. "Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar pengurus, kalau orang tidak pernah berorganisasi, berarti dia tidak pernah latihan kerja sama dan menggalang kekuatan bersama untuk menggalang tujuan," pungkasnya. (AB)



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Linda Amalia Sari

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Peningkatan Potensi Perempuan Dalam Kepemimpinan Nasional

Redaksi Majalah Swantara mewawancarai Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI). Agenda meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta mempermudah akses baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan setidaknya tercatat dalam tiga dari delapan agenda Millenium Development Goals, yaitu Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Bukan hal yang mudah tentunya untuk dicapai, namun mutlak harus dipenuhi oleh calon pemimpin nasional.

Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang membahas mengenai permasalahan mendasar mengenai anak-anak dan perempuan yang harus ditangani oleh calon pemimpin nasional.

Bagaimana pendapat Anda, terhadap proses rekrutmen perempuan dalam partai politik dan parlemen di Indonesia saat ini?

Sesuai dengan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu dalam Pasal 53 berisi daftar bakal calon legislatif disusun oleh partai politik serta Pasal 55 yang menyatakan bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di legislatif pusat dan daerah. Rekrutmen politik bakal calon legislatif masih menjadi domainnya partai politik. Memang ada kecenderungan yang dilakukan oleh partai politik merekrut perempuan hanya untuk memenuhi quota sebagaimana diatur dalam UU, tetapi

tidak menjadi dasar pertimbangan untuk mempromosikan perempuan menjadi anggota legislatif. Pengalaman membuktikan selama dua kali Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, walaupun ketentuan telah mengatur 30% keterwakilan perempuan, tetapi setiap partai politik menempatkan pada nomor urut rentan tidak menarik untuk dicoblos, walaupun sistem pemilunya sudah menggunakan proporsional terbuka dengan suara terbanyak, fakta yang terpilih mereka rata-rata pada nomor 1,2, dan 3, sedangkan perempuan pada nomor urut 4.

Jumlah partisipan politik perempuan Indonesia saat ini sangat minim, bagaimana usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk meningkatkan pendidikan politik untuk perempuan?

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2010 menurun yang meliputi tiga aspek yakni: nilai kebebasan sipil: 82,53, nilai hak-hak sipil: 47,87 dan nilai kelembagaan de-

mokrasi 63,11. Nilai IDI terkait dengan hak-hak sipil paling rendah karena salah satu variabel yang diukur adalah keterwakilan perempuan di parlemen yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang substansial harus didukung oleh keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di parlemen.

Jumlah partisipan politik perempuan Indonesia saat ini sangat minim, karena ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu, pertama, hambatan budaya yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai superior yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi inferior dan termarginalisasi; kedua, hambatan sosial terkait dengan struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai warganegara kelas dua (subordinasi) atau pelengkap; ketiga, sumber daya keuangan yang dimiliki perempuan kurang mendukung dalam aktivitas politik, sebab perempuan memiliki daya dukung keuangan lebih sedikit jika dibanding dengan sumber daya keuangan yang dimiliki laki-laki;



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

keempat, perempuan masih dihadapkan pada struktur politik yang timpang.

Kesetaraan *de jure* sebagaimana tertera dalam konstitusi telah menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi turunan dari konstitusi yang berupa peraturan perundangan yang lebih rendah cenderung bias gender alias tidak sinkron dengan konstitusinya dan ditambah pula praktik politiknya diwarnai rekayasa yang cenderung diskriminatif, akibatnya secara *de facto* melahirkan ketimpangan gender.

Akhir-akhir ini sudah mulai terlihat adanya keberpihakan dan pengakuan akan perlunya peranan kaum perempuan dalam politik, namun kebijakan-kebijakan tersebut masih diberlakukan “setengah hati”.

Contohnya UU No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilu telah memasukkan *affirmative action* 30% caleg perempuan pusat dan daerah, tetapi belum menjamin kepastian menjadi anggota parlemen, karena masih ada sisi-sisi politik yang mempersempit peluang perempuan menjadi anggota parlemen dan/atau tergantung dari kebijakan pimpinan partai politiknya.

Bagaimana dengan potensi perempuan untuk maju dalam Pemilu 2014?

Potensi perempuan untuk maju dalam Pemilu 2014, sesungguhnya dari sisi jumlah perempuan yang berkualitas tersedia dan tersebar di berbagai daerah, walaupun jumlahnya tidak merata. Kalau jumlah perempuan untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2014 relatif cukup memadai karena banyak perempuan yang me-

mimpin organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sosial dan organisasi bisnis, lembaga swadaya masyarakat dan dosen perguruan tinggi dan profesi lainnya.

Potensi dan kekuatan perempuan politik masih dihadapkan pada “*glass ceiling*” budaya patrilineal yang menghalangi perempuan untuk berorganisasi dan berekspresi, sehingga kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di parlemen menjadi keniscayaan. Hal ini menuntut agar para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2014 pada semua tingkatan ikut merealisasikan amanat UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Sebab, keterwakilan perempuan 30% di parlemen bukan semata-mata untuk perempuan itu sendiri melainkan amanat dari RPJMN 2010-2014 dan Tujuan Pembangunan Milenium



Profil perempuan tahun 2012 menunjukkan bahwa dari empat lembaga yudikatif yakni MA, MK, Komisi Yudisial dan KPK memperlihatkan posisi perempuan hanya ada satu orang di Mahkamah Konstitusi.



(Millenium Development Goals/MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015.

Terkait dengan isu-isu/permasalahan mengenai perempuan, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan bagi calon pimpinan nasional?

Siapapun yang akan mencalonkan pimpinan nasional dan menjadi pimpinan nasional harus memahami isu-isu perempuan karena pada intinya permasalahan perempuan adalah permasalahan nasional dan permasalahan kesejahteraan rakyat karena jumlah penduduk perempuan separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Permasalahan krusial yang harus diperhatikan terkait isu perempuan adalah pengurangan angka kematian ibu, peningkatan kesehatan, pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta perlindungan tenaga kerja perempuan.

Hubungan antara angka kematian ibu, angka kematian bayi, HIV/AIDS dan KDRT merupakan akumulasi yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki kaitan yang erat dari produk relasi gender yang tidak adil, sehingga yang menjadi korban perempuan dan anak. Hal ini merupakan reproduksi sosial dari sistem nilai budaya patriarki

konservatif yang beruratarak di tengah masyarakat. Hasil pendidikan yang memberikan aksesibilitas perempuan yang rendah dan aksesibilitas laki-laki lebih tinggi berimplikasi terhadap relasi kekuasaan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Data-data ketenagakerjaan, menggambarkan betapa tenaga kerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, dan hal ini menggambarkan rendahnya kualitas SDM, sehingga masih sulitnya daya saing dalam pasar global.

Profil perempuan tahun 2012 menunjukkan bahwa dari empat lembaga yudikatif yakni MA, MK, Komisi Yudisial dan KPK memperlihatkan posisi perempuan hanya ada satu orang di Mahkamah Konstitusi. Struktur keterwakilan perempuan tersebut menggambarkan bahwa penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan hanya dalam pendekatan prosedural tetapi belum substansial.

Bila mencermati dari kategori pekerjaan, ternyata pekerja sektor formal hanya menyerap sebesar 30,51% dan pekerja informal 69,49%. Secara empiris, pekerja perempuan terkonsentrasi di sektor informal dan jumlahnya sekitar

70% dari keseluruhan pekerja informal. Tenaga kerja perempuan di sektor informal belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, tidak memperoleh perlindungan sosial, dan sebagainya.

Lalu bagaimana dengan peningkatan peran perempuan di kawasan timur Indonesia?

Kementerian PPPA telah berusaha meningkatkan peran perempuan di kawasan timur Indonesia, agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dengan perempuan lain di daerah lainnya. Memang dalam memberdayakan perempuan di kawasan itu menghadapi kendala dan tantangan. Kendala yang dihadapi ialah sumberdaya berupa SDM, dana dan sarana-prasarana lainnya yang sangat terbatas, sehingga kita dapat melakukan dengan cara memprioritaskan yang memiliki daya ungkit strategis yang berdampak refleksi tinggi.

Tantangan yang dihadapi berupa topografi, sosial budaya, dan sosial ekonomi menjadi tantangan yang serius bagi para penentu kebijakan untuk membangun kualitas sumberdaya manusia terutama perempuan Indonesia kawasan timur. Dengan keterbatasan tugas dan fungsi, maka Kementerian PPPA telah melakukan 32 MoU dengan Kementerian/Lembaga dan MoU dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kesemua MoU itu diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di semua wilayah tanpa kecuali wilayah Indonesia kawasan timur.□



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Try Sutrisno

Mantan Wakil Presiden RI

Sosok Pemimpin Nasional yang Ideal

Perlu kriteria umum maupun khusus bagi setiap pemimpin sesuai dengan tantangan zamannya yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila.

Sejarah menunjukkan bahwa tiap bangsa, terutama bangsa besar, harus mampu menentukan sendiri kriteria sosok pemimpin nasionalnya agar bangsa tersebut mampu mengembangkan dan mencapai tujuan nasionalnya secara berkelanjutan. Mereka menyadari resiko yang lebih besar terhadap masa depan

suatu bangsa dan negara, apabila pemimpin bangsa tersebut ternyata kurang memahami jati diri bangsa dan negaranya.

Demikian pula dengan Indonesia yang oleh para analisis strategis digolongkan sebagai negara besar, seharusnya menentukan sendiri kriteria sosok pemimpinnya tanpa harus dipengaruhi bangsa asing dengan berbagai caranya. Memang tidak mudah menemukan sosok pemimpin nasional yang ideal, namun akan mudah untuk memperoleh tokoh yang mendekati ideal, apabila

ada proses kaderisasi yang terencana dengan baik.

Mempertegas Komitmen Pemimpin

Oleh karena itu setiap pemimpin Indonesia seharusnya memiliki visi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, karena apabila seorang pemimpin mempunyai visi yang berbeda, maka akibatnya arah pemerintahan akan berbeda dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perjalanan bangsa dan negara Indonesia me-

ngalami guncangan berat pada saat pemimpin bangsa atau calon pemimpin bangsa ternyata kurang mampu atau kurang memahami visi Indonesia secara baik.

Belajar dari pengalaman selama ini, maka saatnya untuk mempertegas komitmen pemimpin untuk selalu setia pada visi bangsa dan tidak mengedepankan visi organisasi apalagi visi kelompok. Memang perlu elaborasi visi pada periode tertentu, namun hal itu harus dirumuskan secara bersama dan tidak bertentangan dengan visi yang menjadi cita-cita bangsa.

Di masa lalu, rumusan tentang visi pada periode tertentu dapat terlihat pada rumusan yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sedangkan misinya adalah memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada nusa dan bangsa.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa krisis yang berkepanjangan menimpa Indonesia merupakan akibat kurangnya komitmen para pemimpin atau elit bangsa untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan Bangsa. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan UUD 1945, namun apabila masih perlu disempurnakan, maka seharusnya itu ditempuh dengan cara-cara yang konstitusional melalui pengkajian yang mendalam.

Akan tetapi apabila perubahan tersebut cenderung merombak total dan menyimpang dari cita-cita nasional, maka dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi nasional. Untuk itu adalah sangat penting bagi setiap pemimpin nasional agar selalu setia pada UUD dan melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya. Apabila seorang pemimpin kurang mampu mengelola tantangan menjadi peluang, maka akibatnya dapat merugikan terhadap kehidupan

bangsa dan negara pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Akan tetapi seorang pemimpin nasional yang ideal, hendaknya mampu membedakan antara tantangan yang bersifat nasional dan bersifat golongan. Walaupun mungkin mau dipisahkan, tetapi dalam penyelesaiannya haruslah mengedepankan terbukanya peluang bagi tercapainya kepentingan nasional. Mungkin saja tantangan tersebut cenderung sebagai personal, akan tetapi sebaiknya penyelesaiannya dapat membuka peluang bagi perbaikan sistem pemerintahan negara menjadi lebih baik, walaupun harus membawa pengorbanan secara personal.

Perlu disadari bahwa setiap tantangan dapat dengan cepat berkembang menjadi ancaman apabila tidak diantisipasi secara tepat dan memantulkannya untuk menjadi peluang yang lebih baik. Mungkin saja terbuka peluang melaksanakan strategi yang kurang sesuai dengan Pancasila untuk mendapatkan hasil yang lebih besar secara temporer, namun hal itu kurang baik dilaksanakan, karena dapat merugikan secara strategis.

Hal ini jelas terlihat pada pilihan strategi yang mengakomodir cara-cara liberalistik dan kapitalistik yang jelas bertentangan dengan Pancasila, sehingga berakibat rusaknya pencapaian kepentingan nasional maupun tujuan nasional. Di masa depan, pemilihan strategi nasional haruslah dirumuskan secara nasional dan bukan oleh sekelompok partai tertentu, karena mungkin saja kurang mampu merumuskan aspirasi lawan politik mereka, padahal aspirasi tersebut mungkin juga baik bagi masa depan bangsa dan negara.

Kriteria Umum dan Khusus

Untuk itu, maka seorang pemimpin nasional yang ideal diharapkan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki rasa persatuan Indonesia yang tinggi tanpa mem-

bedakan seseorang berdasarkan kepentingan tertentu, mampu mengembangkan semangat musyawarah/mufakat secara baik demi kepentingan bangsa dan negara. Mampu mengembangkan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain kriteria umum, seorang pemimpin juga harus memenuhi kriteria khusus seperti keteladanan, yang dapat menunjukkan bahwa seorang calon pemimpin memang pantas menjadi teladan dalam berbagai hal. Selain itu juga, rekam jejak (*track record*) yang dapat menjadi dasar dan motivasi bagi seorang pemimpin nasional. Terakhir kredibilitas tinggi yang diakui oleh tokoh-tokoh nasional maupun internasional.

Dengan mengikuti dan belajar dari perjalanan bangsa dan negara selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosok pemimpin nasional yang ideal bagi bangsa Indonesia, sebagai negara besar, seharusnya dirumuskan dalam suatu undang-undang sesuai dengan visi dan misi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adalah suatu masalah besar, apabila muncul seorang pemimpin nasional yang berdasarkan rekam jejaknya ternyata seorang yang kurang memahami dan menghayati visi, misi bangsa dan negara secara utuh. Untuk itu, perlu kriteria umum maupun khusus bagi setiap pemimpin sesuai dengan tantangan zamannya yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila.

Sesuai posisi Lemhannas sebagai lembaga yang turut berperan di dalam mempersiapkan calon pemimpin nasional di masa mendatang, diharapkan Lemhannas RI dapat memberi masukan yang tepat bagi lembaga-lembaga tinggi Negara di dalam menyusun kriteria bagi para calon pemimpin.□



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Jendral TNI (Purn) A.M. Hendropriyono

Lemhannas RI

Perlu Bentuk Kaukus

Pemilu 2014 sudah di depan mata. Meski demikian, di permukaan Parpol belum menunjukkan kesibukan yang intens. Beberapa calon yang saat ini digadang-gadang sebagai sosok yang layak tarung juga masih tampak menahan hasrat. Geliat ini ditengarai akan mengalami peningkatan seiring waktu yang semakin mendekat.

Pada lain pihak, atmosfer menuju perhelatan lima tahunan dalam bingkai demokrasi tersebut cukup mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Industri media massa menyambut momentum dengan

cekatan dan menyuguhi anak bangsa dengan berbagai pilihan calon berikut perkembangan grafik elektabilitasnya.

Di antara yang turut bersuara terdapat Jendral TNI (Purn) Abdullah Makmud Hendropriyono. Mantan Kepala BIN di era Kabinet Gotong Royong yang lebih dikenal dengan nama A.M. Hendropriyono ini mengemukakan gagasan baru. Ketika ditemui di kediamannya di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (4/3) lalu, kepada Swantara ia mengungkap gagasan tentang perlunya Lemhannas RI membentuk kaukus.

"Lemhannas bersama-sama alumni perlu membentuk kaukus,

tugasnya mengundang para pemuda, termasuk prajurit TNI dan kumpul di Lemhannas" ujarnya.

Di dalam kaukus itu, para tokoh muda yang berbakat dan brilian akan saling beradu konsep tentang pemecahan problematika nasional dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Menurutnya, kaukus tersebut sebaiknya mengakomodasi semua latar belakang, baik militer maupun sipil.

Mengenai status, Hendropriyono mengatakan, calon dari latar belakang prajurit harus keluar dari TNI dan direstui oleh Panglima TNI

serta Kepala Staf Angkatan supaya statusnya jadi sipil. Untuk meyakinkan alasannya, Hendropriyono menyebutkan negara-negara yang pernah memiliki pemimpin nasional yang keluar dari institusi militer, bahkan beranjak dari pangkat rendah.

Lebih jauh, alumnus Kursus Singkat Angkatan (KSA) VI Lemhannas ini mengatakan, kaukus perlu mendapat dukungan media massa, agar mendapat publisitas yang baik. Doktor filsafat dari Universitas Gadjah Mada ini berpendapat, pembentukan kaukus merupakan sebuah rencana aksi (action plan) dan menjadi jawaban atas besarnya harapan komponen bangsa pada peran Lemhannas RI.

Membangun sistem

Kaukus bentukan Lemhannas RI yang disarankan Hendropriyono itu berawal dari pemikiran tentang kepemimpinan nasional dan perubahan lingkungan strategis nasional yang ia nilai terjadi secara sistemik.

"Kita mengalami perubahan sistemik karena menyangkut Ipolek-sosbudhankam" imbuh pensiunan jenderal yang setiap hari masih aktif berolahraga ini. Terjadi transisi yang mendadak. Dari kontrol pemerintah yang kuat terhadap masyarakat, demikian ia berujar, berbalik 180 derajat menjadi rakyat yang mengontrol pemerintah dengan sangat kuat.

Sebagai mantan pejabat negara yang turut mewarnai kabinet dari era Presiden Soeharto, B.J. Habibie hingga Megawati Soekarnoputri, dirinya menegaskan benar-benar merasakan perbedaan transisi itu.

Dalam tinjauannya, perubahan transisi yang tidak didesain itu memunculkan banyak sekali *war lords*. SARA (Kasus Suku, Ras, Agama dan Antargolongan-Red) terjadi di mana-mana dan dianggap biasa. Organisasi kemasyarakatan yang tidak punya kewenangan sudah mengambil kedaulatan negara.

Dalam konteks kepemimpinan nasional, ia mengatakan dalam kondisi seperti itu pemerintah harus hadir. Kehadiran pemerintah dapat melalui *statement* dan langkah-langkah yang diambil. "Pemerintah harus hadir di tempat yang paling kacau, dan di tempat rakyat yang paling menderita. Itulah permasalahan yang sesungguhnya," katanya dengan suara agak meninggi.

Menyikapi perubahan sistemik, pensiunan jenderal bintang empat ini mengatakan tidak menyalahkan siapa-siapa. Kepemimpinan nasional itu bukan pimpinan nasional. "Presiden hanya salah satu di tengah padang pasir yang begitu luas," imbuhnya. Yang penting baginya, terdapat perbaikan melalui perubahan yang didesain bersama.

Dalam konteks kepemimpinan, berulang kali Hendropriyono menegaskan pentingnya membangun sistem dan konstruksi sosial, yang didesain pihak yang berkompeten secara bersama-sama. Perubahan sistem secara mendadak yang kontradiktif, dari totaliter menjadi bebas sebebas-bebasnya tidak bisa dibiarkan.

Perubahan yang diperlukan bangsa ini sesungguhnya harus didesain dengan baik. "Saya sangat berharap, dalam disain ini rakyat akan melihat di dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Lemhannas-lah yang berada di depan mengibarkan bendera ini" katanya.

Kalau sistem sudah jalan, begitu ia berargumen, siapa pun pemimpinnya tidak jadi masalah besar. Dalam sistem yang berjalan dengan baik, kepiawaian yang berlebihan tidak diperlukan lagi. Tipe pemimpin seperti itu, menurut Hendropriyono, sangat dibutuhkan negara berkembang, dengan keteladanan yang terseleksi. Tidak asal terkenal. Tanpa sistem, pemimpin akan sembarangan.

Di lain pihak, kepiawaian, keteladanan, kecerdasan dan kepopuleran yang di atas rata-rata sangat dibutuhkan di negara-negara

berkembang. Dalam usia negara yang sudah mencapai 68 tahun, seharusnya Indonesia tidak lagi tergolong negara berkembang. Oleh karena itu pemimpin tidak asal terkenal, tetapi harus memiliki kualitas kepemimpinan.

Tentang calon pemimpin nasional dari kalangan muda dan sipil yang ia sampaikan baru-baru ini, Hendropriyono menjelaskan banyaknya handicap dari tokoh-tokoh tua.

"Harus orang muda! Orang tua segenerasi saya sudah tidak tahu lagi apa yang dikehendaki oleh kaum muda," tandasnya, seraya meminta agar bangsa ini tidak terus-terusan berdiri di persimpangan jalan.

Tentang kontrol tahu diri yang ia maksudkan, suami Taty Hendropriyono ini membeberkan faktor alami yang tidak bisa dilawan. Menurutnya, di dalam diri orang yang sudah tua, terdapat banyak hambatan. Salah satunya faktor embolus, yaitu permasalahan sumbatan dalam aliran darah yang akan banyak memengaruhi kualitas kesehatan dan pengambilan keputusan.

Ia pun mengambil sebaris lirik lagu Yesterday yang dipopulerkan The Beatles. Grup musik asal Inggris itu berkata: *Suddenly, I'm not half the man I used to be, there's a shadow hanging over me*. Dengan lirik itu, Hendropriyono ingin menyampaikan pesan tentang keterbatasan kemampuan yang dirasakan para angkatan tua secara tiba-tiba, yang berbeda jauh dari masa mudanya.

Sesungguhnya ia tidak seratus persen *ngotot* dengan idenya mengenai calon pemimpin nasional. Baginya, artis boleh saja asalkan memiliki kualitas. Tua pun tidak mengapa asalkan tahu diri. Pada pamungkas wawancara, lelaki kelahiran Yogyakarta ini menegaskan pentingnya seorang calon memiliki bibit, bobot dan bebet sebagai pemimpin nasional.^[GTS]



[sumber: <http://kapanlagi.com>]

Yenny Wahid

Politik Sebagai Alat dan Parpol Sebagai Wadah

sebagai dasar bernegara kita yang sudah menjadi kemufakatan kita bersama. Artinya bahwa kebhinnekaan itu harus menjadi landasan bagi bangsa Indonesia," jelasnya. Itulah yang menjadi alasan kuat mengapa bangsa yang besar ini memakai slogan bhinneka tunggal ika.

Kesepakatannya adalah perbedaan itu diperbolehkan, justru perbedaan itu membuat kita kuat. "Nah, kita sudah sepakat perbedaan itu harus dikelola dengan baik, karena itu partai yang memperjuangkan kepentingan kelompok, suku, serta agamanya boleh saja, tapi tidak boleh lepas dari bingkai NKRI," jelas putri Abdurahman Wahid tersebut. Terkait partai politik kita saat ini, Yenny menjelaskan bahwa masih ada partai partai yang menggunakan kelompok dengan tujuan politik saja.

Dengan kata lain, mereka mempergunakan isu-isu tersebut secara tidak bertanggung jawab. Nah, hal semacam itu menjadi berbahaya bagi kelangsungan kebhinnekaan dan persatuan kita. Maka, untuk mengatasi persoalan tersebut, setiap parpol harus memberikan pendidikan politik dan kemudian mereka harus diberikan pemahaman bahwa pada saat ini, kalau misalnya partai tersebut hanya memperjuangkan kepentingan golongannya saja, maka mereka tidak akan mendapatkan suara yang maksimal.

Kondisi objektif semacam ini sudah terbukti dari eksperimen politik, yang mana selama ini partai hanya mementingkan kelompoknya saja, suaranya semakin lama semakin menurun. Partai yang mengungus suara kelompok tertentu saja, agama tertentu saja, berdasarkan isu dari agama kelompok tertentu itu turun

suaranya. "Jadi, sesungguhnya kesadaran masyarakat sudah terbangun," ungkapnya. Terkait kesadaran politik masyarakat kita saat ini yang sudah lebih dewasa, mereka memilih berdasarkan perorangan yang rill.

Masyarakat tidak terbuai dengan bungkus-bungkus primordialisme. Jadi isu-isu sektarianisme tersebut tidak menarik kalau partainya tidak memperjuangkan kepentingan rakyat secara mendasar. Sekarang, isu yang diminati masyarakat itu adalah isu tentang korupsi, tentang kemiskinan. "Jadi menurut hemat saya lebih baik partai fokus pada penanganan isu seperti itu daripada mengedepankan isu yang bersyariah misalnya atau yang berbau-bau injili. Lebih baik kita semua mengungus isu-isu yang mempunyai dampak jelas bagi masyarakat, seperti isu korupsi, kemiskinan, pengangguran dan semua agama pasti akan mendukung itu," jelasnya. Mengenai apakah partai sekarang sudah memperjuangkan kepentingan masyarakat minoritas atau belum, Yenny menjelaskan kalau zaman bapak saya, kita yang secara terang-terangan dan secara tegas memperjuangkan kepentingan minoritas.

Kalau sekarang banyak yang malu-malu dan ragu-ragu. Mereka berpikir kalau memperjuangkan minoritas, mereka akan kehilangan suara mayoritas. Padahal kalau minoritas tidak diperjuangkan, maka namanya benang-benang ketuhanan berbangsa dan bernegara ini akan lepas. Jadi partai tidak bisa hanya mengutamakan syahwatnya saja untuk berkuasa dan ingin mendapatkan mayoritas saja," pungkasnya. [EH/AB]

Partai yang memperjuangkan kepentingan kelompok, suku, serta agamanya boleh saja, tapi tidak boleh lepas dari bingkai NKRI. Setelah tumbang kepemimpinan otoriter di masa Orde Baru perkembangan demokrasi di tanah air semakin waktu semakin menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang signifikan tersebut selanjutnya dapat diukur dengan banyaknya partai politik yang lahir pasca reformasi.

Lebih jauhnya tidak sedikit parpol yang berlandaskan atau yang berasaskan agama. Terkait hal tersebut Yenny Wahid menjelaskan bahwa berdirinya sebuah parpol yang berlandaskan agama atau pun suku itu bukanlah persoalan atau menjadi sebuah masalah serius. Yang menjadi masalah sesungguhnya adalah ketika dia (parpol) tersebut melupakan kebhinnekaannya. Lebih lanjut aktivis Islam dan politisi Indonesia tersebut menyatakan bahwa politik itu alat untuk memperjuangkan kepentingan, parpol adalah sebuah wadah di mana orang banyak berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Misalnya perjuangan dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura yang mempunyai parpol tersendiri sesungguhnya tidak persoalan atau bahkan agama Islam, Kristen, Buddha dan Hindu. "Namun tidak boleh kemudian kepentingan golongan tersebut dibandingkan dengan kepentingan nasional. Dengan kata lain tidak boleh melupakan kebhinnekaan

Imam Prasodjo

Pemimpin Harus Ciptakan Perbaikan

Pengamat sosial Imam Prasodjo berpendapat, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, jika tidak mampu melakukan hal itu, dia belum bisa disebut sebagai pemimpin. "Pejabat yang hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, bukanlah seorang pemimpin," tuturnya seraya menambahkan, kaderisasi kepemimpinan juga harus melalui proses panjang dan tahapan-tahapan tertentu, misalnya di organisasi sosial, lembaga pemerintahan. Dan harus dibuktikan kemampuannya dalam menangani permasalahan mulai dari tingkat yang paling rendah, seperti di kabupaten, provinsi, kemudian pada tataran nasional.

Seorang pemimpin, sambung Imam, pertama, ia harus memahami problem utama yang dihadapi rakyat, sehingga saat dihadapkan untuk mengambil keputusan strategis, ia tidak lagi perlu meraba-raba karena ia sudah paham benar apa yang mesti dilakukannya. Sikap seperti itu tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba melainkan sebagai hasil proses pembelajaran dan pengalaman panjang, bukan hanya dari buku-buku, tetapi juga melalui dialog atau interaksi dengan berbagai segmen masyarakat, sehingga ia benar-benar memiliki 'greet' untuk mencari solusi permasalahan.

Menurut Imam, bisa saja seorang pemimpin berasal dari akademisi, tetapi tentu saja bukan berarti sosok yang hanya berkulat di kampus, karena ia harus pula terjun ke lapangan, sehingga memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai ragam

kelompok masyarakat dan juga memiliki pengetahuan serta pemahaman yang luas tentang berbagai aspek permasalahan bangsa. Menyinggung tantangan yang akan dihadapi oleh para pemimpin nasional di masa, mendatang, menurut Imam, adalah menyangkut persoalan struktural dan kultural, mulai dari isu ketimpangan ekonomi, kesemrawutan administrasi, masalah ledakan jumlah penduduk, begitu pula dengan isu-isu segmental, seperti minimnya interaksi antarkelompok yang satu dengan lainnya yang berpotensi menciptakan konflik-konflik, baik berskala kecil maupun besar, katanya mengingatkan.

Pemimpin, menurut Imam Prasodjo, bisa saja difasilitasi dengan kedudukan formal, namun demikian, tanpa kedudukan pun, seseorang bisa juga tetap menjadi pemimpin. Imam pada bagian lain mempertanyakan apakah kader pemimpin yang berasal dari parpol bisa menerima keberagaman, mengingat kedudukan parpol yang sebetulnya merepresentasikan kepentingan-kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah ke-terwakilan di mana partai-partai mengirimkan wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarkan aspirasi mereka. "Yang menjadi masalah adalah saat terpilih, sering ia terus membajak suara rakyat, maksudnya tidak lagi memperjuangkan nasib konstituennya, tetapi malah 'mengejar setoran' atau mengumpulkan uang secara cepat. Ini yang terjadi pada sebagian kader di hampir semua partai," tuturnya.



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Oleh karena itu, Imam berpendapat, ke depan, harus dicari jalan keluar agar yang muncul adalah kader-kader pemimpin yang kredibel, bukan sosok yang hanya menguber jabatan, tetapi tidak berpikir untuk memperjuangkan konstituen atau rakyat yang diwakilinya. Namun demikian, ironisnya, rakyat sering kali disodori dengan calon-calon yang sebenarnya tidak pantas mewakili mereka, tetapi tidak ada pilihan lain, apalagi sistem demokrasi yang berlangsung bisa mengakomodasikan munculnya tokoh-tokoh semacam itu.

"Tetapi perkembangan yang menggembirakan, akhir-akhir ini sudah mulai terlihat, rakyat memilih orang yang bukan berasal dari tokoh partai, tetapi memilih figur yang mereka nilai memiliki kemampuan atau memiliki integritas pribadi, misalnya dalam kasus kemenangan Jokowi dalam Pemilu pada DKI Jakarta. Tokoh yang didukung banyak partai ternyata kalah," kata Imam Prasodjo menambahkan. [EH/AB]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan

Tak Perlu Dikotomi Calon Pemimpin

Untuk memilih seorang pemimpin, masyarakat tak perlu mendikotomikan calon pemimpin, memilih antara tua atau muda, atau sipil dan militer," tutur Luhut Binsar Panjaitan Mantan Menteri Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional. Menurutnya, kriteria utama calon pemimpin Indonesia adalah yang mampu melanjutkan kisah sukses pemerintah sebelumnya.

Indonesia patut diacungi jempol karena telah mampu melewati badai krisis dunia. "Dari aspek ekonomi, Indonesia telah memiliki prestasi yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 6,23 persen," kata Luhut. "Itu artinya, kita telah memiliki *success story* dan mendapat *investment grade* yang baik di mana Indonesia mendapat kepercayaan dunia dalam hal investasi. Pemimpin yang baik adalah yang mampu 'mengkapitalisasi' kesuksesan pemerintah yang sebelumnya, yakni dalam hal memanfaatkan, mendayagunakan, memperbesar *success story* pemerintah yang sudah dibangun sebelumnya," tuturnya.

Pada September 2012, McKinsey Global Institute merilis ramalan bahwa Indonesia akan menjadi negara ke-7 terbesar pada tahun 2030, dengan bonus demografi dan besarnya kebutuhan. Untuk saat ini, Indonesia men-

jadi negara ke-16 terbesar dalam bidang ekonomi di dunia. "Indonesia terakhir mengalami *investment grade* pada tahun 1996. Jarak waktu tersebut hingga tahun ini adalah 17 tahun. Maka jika 2014 nanti, Indonesia tidak mendapatkan pemimpin yang 'pas' untuk menjawab tantangan regional maupun global, tentu ramalan McKinsey tidak akan tercapai. Kalau tidak tercapai, yang rugi adalah bangsa ini. Untuk itu, harus ada kriteria yang jelas mengenai calon pemimpin Indonesia," kata Luhut.

Tua atau Muda? Tak Perlu Dikotomis

"Tak perlu ada perilaku dikotomis membedakan calon pemimpin nasional, tua atau muda, sipil atau militer, tapi yang harus dicari adalah ia yang mampu memenuhi kriteria calon pemimpin," kata Luhut. "Pemimpin tidak boleh menjadi raja, ia harus *down to earth*, berani mendengar keluhan dan kritik. *Mindset* yang ada didirinya harus dirubah, bahwa menjadi birokrat bukan untuk mencari uang dan kekayaan, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan bermimpi menjadi kaya kalau menjadi pejabat," kata Luhut.

Maka yang perlu dilihat adalah tiga hal yaitu latar belakang keluarga yang baik, *track record* jabatan yang baik, dan juga bersih dari korupsi," kata Luhut. Kalau ia

adalah mantan pejabat di sipil atau militer, perlu dilihat bagaimana *track record*, *leadership*, prestasi, dan apa yang dilakukannya saat menjabat, lalu apakah pernah terkait dengan kasus korupsi atau HAM.

Masyarakat saat ini sudah mampu menilai, siapa yang dianggap memiliki kemampuan dalam memimpin Indonesia. Biarlah *'market'* yang menentukan apakah seseorang pantas memimpin atau tidak, sebab ia harus mampu mengayomi semua tuntutan dan kepentingan masyarakat kata Luhut kepada redaksi. Ia menyayangkan, di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi, belum semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampaknya. "Jadi tugas Presiden Indonesia yang akan datang harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 8-9 persen, tapi di waktu yang sama juga harus mewujudkan pemerataan perekonomian," kata Luhut.

"Jangan sampai kita 'menjudikan' masa depan Indonesia, karena itu untuk menjadi Presiden pada 2014 nanti memerlukan persyaratan yang cukup ketat," kata Luhut. Menurutnya, pemimpin masa depan Indonesia menghadapi masa depan yang sangat kompleks. "Ia yang akan maju harus mampu menerjemahkan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya, misalnya apa yang telah dilakukan pemerintah pada MP3EI," kata Luhut.

Luhut Panjaitan merasakan adanya kesulitan mengenai absennya para pembuat kebijakan dalam menerjemahkan target pemerintah seperti Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Saya sebagai pelaku pasar saat ini misalnya, merasakan kesulitan dalam mendapatkan *purchase price agreement* ataupun dalam hal yang paling sederhana, seperti prosedur pemasangan listrik, hal sederhana seperti ini masih mengalami hambatan padahal sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Luhut.

Akan tetapi, Luhut sangat optimis bahwa Indonesia bisa menjadi *Emerging Economy* pada 15 tahun mendatang. Indonesia yang kini juga tergabung dalam negara-negara G-20 diharapkan dapat menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. "Dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan secara komprehensif kepada publik mengenai agenda percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia, termasuk kontribusi teknologi dan inovasi nasional yang diperlukan, yang kemudian menjadi kandungan utama dalam MP3EI ini," kata Luhut.

"Banyak sekali peraturan yang saling bertumbukan dan tidak selaras satu dengan yang lain, menurut saya, harus diluruskan benang merahnya, baik antara pusat maupun dengan daerah," kata Luhut.

Sudah tidak tepat lagi untuk memperlakukan pemimpin berasal dari agama atau suku tertentu, sepanjang ia mampu memberikan hak-hak rakyat dan dengan *track record* yang baik. "Calon pemimpin Indonesia yang akan

memimpin bangsa yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama, maka ia juga harus berpikir pluralis. Seorang pemimpin yang baik tidak mengkotak-kotakkan identitas dirinya dan masyarakat. Sebab tugasnya, adalah melaksanakan amanah *founding fathers* dalam menjaga NKRI," kata Luhut.

Menurut Luhut, masalah yang terjadi di parlemen adalah rekrutmen yang melenceng dari tujuan partai. "Partai belum memikirkan bagaimana membuat pola rekrutmen yang baik, kebanyakan anggota partai hanya 'mencari makan'. Kalau kita lihat di media massa nasional 70- 80 persen adalah berita korupsi, maka keadaan hari ini adalah akibat dari lemahnya pola rekrutmen kita. Pemerintah juga perlu membuat moratorium pajak dan moratorium korupsi, untuk mengembalikan uang negara, juga perlu perbaikan remunerasi para pegawai. Perlu keberanian seorang pemimpin untuk melakukan itu semua," kata Luhut.

Luhut melihat, tak perlu terlalu banyak partai yang mengikuti pemilu. "Maka perlu dibentuk *parliamentary threshold*, dari yang sebelumnya hanya 3,5 persen menjadi 5 persen. Supaya nantinya hanya menyisakan tiga atau empat partai pada ujungnya, sehingga pada akhirnya, pemerintah akan mudah *manage*-nya juga dalam memberikan dukungan anggaran, supaya partai-partai tidak perlu lagi *'cawe-cawe'* cari uang," kata Luhut.^[EH]



[sumber: <http://www.tinyurl.com>]

Keberpihakan terhadap perempuan menjadi salah satu kriteria penting dari sosok seorang pemimpin di Indonesia, begitulah yang dikatakan oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Yuniyanti Chuzaifah.

Komnas Perempuan yang terbentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, merupakan sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Jelang Pemilihan Umum 2014 mendatang, menurut wanita yang akrab dipanggil Yuni ini melihat dan mengapresiasi partai-partai politik



[sumber: http://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2011/07/IMG_43691.jpg]

Yuniyanti Chuzaifah

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Keberpihakan Terhadap Perempuan Kriteria Penting Dari Sosok Pemimpin

yang belakangan ini turut bersuara terhadap isu-isu dan persoalan perempuan. Tetapi menurutnya, besar harapan kepada setiap partai politik untuk memiliki program-program yang lebih substantif terhadap persoalan-persoalan perempuan terutama dalam hal kekerasan terhadap perempuan.

Terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam kancah politik, sampai saat ini dan berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah perempuan dalam partai politik berkisar 18% atau masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai alasan dikemukakan mengapa ketentuan tersebut belum dipenuhi. Alasan yang paling sering muncul adalah ketersediaan sumber daya perempuan di partai politik yang terbatas. Namun menurut Yuni yang merupakan lulusan S2 dari Fakultas Teologi dan Seni Bidang Islamologi,

Leiden University ini, bahwa sarjana perempuan di Indonesia tidak sedikit, yang berpredikat *cumlaude* pun banyak di sejumlah perguruan tinggi. Ini berarti SDM perempuan itu ada, tetapi yang menjadi masalah adalah kultur parpol yang kurang memberi dukungan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Oleh karena itu, harus ada kesadaran bersama, baik dari seorang suami yang turut mendukung dan seluruh partai politik yang harusnya membuat mekanisme dalam partai agar dapat memudahkan perempuan berkecimpung dalam politik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan sebuah *affirmative action* yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam Bab II tentang Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat 5 disebutkan "Kepengurusan Partai Politik tingkat

pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". Undang-Undang ini kemudian direvisi menjadi UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan ketentuan 30% kuota perempuan di kepengurusan tidak mengalami perubahan.

Keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis di sebuah parpol seharusnya didukung oleh lingkungan, baik keluarga, masyarakat, gerakan perempuan dan juga oleh sistem maupun kultur yang ada di partai politik tersebut. Selain itu juga dibutuhkan sebuah kultur maupun *affirmative action* dari partai politik tersebut dalam keberpihakannya terhadap perempuan untuk berpolitik. Namun tidak boleh seorang perempuan karena kepopularitasannya, dieksploitasi dan dipolitisasi

untuk meraih suara dalam Pemilihan Umum.

Pada kesempatan yang sama, menurut wanita yang menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan sejak tahun 2010 lalu, hal yang menjadi sangat penting adalah para pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik mempunyai perspektif yang berpihak terhadap perempuan. Tidak sedikit para pejabat publik mengeluarkan *statement-statement* yang mengabaikan perspektif tersebut, tambahnya.

Diakuinya pula bahwa perkembangan isu-isu dan persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia diamati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW), dan lembaga dunia terkait lainnya. Rekomendasi yang muncul dari PBB ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada seluruh para pejabat publik, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan di institusi negara, serta para calon pemimpin dimasa depan terhadap keberpihakannya terhadap perempuan.

Saat ini, Komnas Perempuan tengah mengawal pakta integritas, tetapi perlu diketahui bahwa pakta integritas yang dimaksud tak hanya sekadar mencakup untuk tidak korupsi, tidak kolusi, dan tidak nepotisme, tetapi lebih cenderung dalam hal etika pejabat publik. Memang, menurut Ibu dari dua orang anak ini, tidak secara eksplisit dijelaskan tentang etika tersebut secara gamblang, tetapi pakta integritas yang diinginkan adalah mereka yang tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan dan juga melakukan poligami. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dibutuhkan kriteria seorang pemimpin yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap keadilan gender dan mempunyai visi ke depan untuk memajukan kaum perempuan.



Diakuinya pula bahwa perkembangan isu-isu dan persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia diamati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)



Dalam persoalan keadilan gender terhadap perempuan, ia menegaskan bukan hanya kaum perempuanlah sebagai pejuangnya. Menurutnya, keadilan gender merupakan isu kemanusiaan, sehingga laki-laki dan perempuan harus bersama-sama mengawal isu gender di Indonesia.

Menurut perempuan yang menyelesaikan S-3 di Amsterdam University, temuan Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan mencapai angka 120 ribu/tahun. Menurut data Komnas Perempuan, selama 10 tahun terakhir terungkap 93 ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan sebesar 70% pelakunya adalah orang dekat dari korban. Hal ini menggambarkan bahwa masih belum dianggapnya isu kekerasan terhadap perempuan ini sebagai persoalan bersama. Sampai sekarang belum ada peraturan hukum yang komprehensif untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Meski sudah ada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), namun implementasinya masih bermasalah seperti ketidaktahuan sejumlah perempuan akan adanya UU PKDRT tersebut, karena selama ini belum adanya akses/*shelter*, tempat berlindung, tempat konsultasi masalah hukum, pemulihan psikis yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sejumlah kementerian terkait sudah

melakukan upaya-upaya dalam persoalan ini, namun apa yang dilakukan dengan tingkat masalah yang terjadi, lebih banyak masalahnya.

Sebagai kaum perempuan, Yuni mengharapkan negara dapat menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan upaya-upaya yang lebih responsif dan cepat terhadap seluruh persoalan yang terjadi. Di sisi lain, Komnas Perempuan selama ini terus mendorong Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan adanya layanan/lembaga yang lebih mudah diakses oleh korban.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pemimpin nasional yang mempunyai keberpihakan terhadap perempuan dari aspek legal dan kebijakannya, memiliki komitmen dan pluralisme, memiliki sosok pemimpin imparisial (melindungi semua pihak), memiliki visi dan solusi serta semangat ber-bhinneka, memiliki komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, Konsistensi Pemimpin, beretika Kenegarawanan, dan sebagainya. Dan menjadi perhatian Yuni adalah sosok pemimpin yang harus bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mengerahkan kekuatan bersenjata, karena akan menimbulkan efek multigenerasi yang nantinya suatu saat akan menjadi permasalahan komunal.^[AB]

Bima Arya Sugiarto
Ketua DPP PAN

Saatnya Pemuda Ambil Posisi Tawar

Saya percaya setiap masa itu ada pemimpinnya,” tutur Bima Arya Sugiarto, Ketua DPP PAN saat ditanya tentang sosok seorang pemimpin. Bima meyakini bahwa seorang pemimpin itu lahir dalam konteks tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ada karakter seorang yang pemimpin tepat di zamannya, namun belum tentu tepat di zaman yang berbeda.

“Bung Karno sangat tepat di masa ketika saat itu kita sangat membutuhkan sosok pemimpin yang berani berbicara secara ‘keras’ terhadap kekuatan asing, tetapi saat di masa kita mulai fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, muncullah sosok pemimpin seperti Pak Harto yang lebih sejuk dan telaten dan berperan menjadi stabilisator. Berbeda lagi saat kita berada di era reformasi, kita perlu sosok pemimpin yang benar-benar bisa menjamin pluralisme keberagaman, seperti Pak Habibie yang berani membuka saluran aspirasi politik, kemudian Gus Dur dengan sosok yang begitu demokratis. Pak SBY dengan karakter yang lebih artikulatif dan komunikatif diperlukan sebagai sosok pemimpin saat ini,” kata Bima Arya.

Hal tersebutlah yang membuat pria kelahiran Bogor ini yakin, bahwa setiap masa itu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu dari sosok seorang pemimpin sesuai eranya. Jadi jangan memimpikan datangnya Ratu Adil yang membuat kita cenderung akan selalu merindukan sosok seorang pemimpin yang sempurna, lanjutnya.

Menurutnya, tentang kedatangan

“Ratu Adil Satria Piningit” hanyalah perspektif yang usang, di sini ia menggarisbawahi tentang apa yang sebetulnya kita butuhkan sekarang, di tengah maraknya kasus korupsi maka yang diperlukan adalah sosok seorang pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Rakyat telah jenuh melihat pemimpin dan tokoh yang gemar beretorika, tetapi ada kesenjangan saat bertindak. Pemimpin yang bersih, adalah bekerja untuk rakyat bukan demi golongan dan kelompok kepentingan. Pemimpin itu harus berani untuk menegakkan apa yang diyakini, tidak boleh tersangkut kepentingan lain, jadi sosok seorang pemimpin seperti inilah yang diharapkan rakyat saat ini.

Terkait dengan pengkaderan pemimpin di partai politik, pria yang meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Australia ini mengakui masih banyak keterbatasan. Saat ini mayoritas partai-partai yang ada masih relatif baru, dan baru memulai kaderisasi tahun 1999 dan baru tiga kali pemilu, sehingga kita masih punya keterbatasan dalam hal stok kader, jelasnya.

Selain itu Bima menambahkan bahwa keterbatasan dana juga menjadi salah satu alasan mengapa pengkaderan pemimpin dari partai politik sulit untuk dilakukan. Diakui pula, masih banyak hal lain yang menyita konsentrasi partai sehingga kaderisasi di partai agak sering di lupakan. Misalkan saja, konsentrasi di pilkada, bayangkan bahwa dalam satu tahun saja ada ratusan pilkada yang diselenggarakan, belum lagi ada dinamika permasalahan partai, jadi kita disibukkan hal yang sifat-



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

nya *power struggle*, di mana hal yang jangka pendek harus diperhatikan dan yang jangka panjang harus dilakukan.

Berkaca dari sistem kaderisasi pada institusi TNI, ia ingin sekali belajar dan membenahi sistem pengkaderan di partai politik yang diusungnya. Namun tidak bisa dihindari juga karena terbatasnya pengkaderan di dalam partai politik, akan muncul pemimpin yang instan dari kalangan selebritis, caleg dari artis, dan lain-lain. Di sisi lain ada keinginan partai politiknya untuk memenangkan “pertarungan”. Hal inilah yang membuatnya, sebagai dosen beserta dengan anak muda kader partai, membangun sayap partai baru yang fokus pada kepemimpinan muda, yaitu MATARA, (Matahari Nusantara).

Ketika ditanya tantangan apa yang dihadapi seorang pemimpin

kedepan? Bima menjawabnya hanya dengan memuaskan harapan publik, dan dapat menyeimbangkan serta menyesuaikan kemampuan yang dimiliki. Dicontohkannya seorang Jokowi, dimana banyak publik menaruh harapan seperti figur Jokowi, tetapi harus disadari pula bahwa Jokowi tetap memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan maupun kewenangan. Contoh lain, dalam forum internasional negara G20, Indonesia dipuji akan kenaikan pendapatan perkapitanya yang drastis dari US\$ 500 menjadi US\$ 3000 perkapita, tapi tantangannya adalah bagaimana angka yang “indah” itu dapat dirasakan oleh rakyat sehari-hari bukan hanya penghargaan pada skala ekonomi saja dalam forum internasional.

Pria yang telah memiliki dua orang anak ini melihat dalam skala nasional, Indonesia tidak mengalami permasalahan yang serius tentang kepemimpinan, menurutnya apabila kita mengalami krisis kepemimpinan seperti apa yang dikatakan banyak orang, ya karena pemimpinnya itu-itu saja. Tetapi ia, menyebutkan beberapa nama potensial seperti Jokowi, Prabowo, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Mahfud MD dan masih banyak pilihan lainnya. Bima berpendapat semua tergantung bagaimana kita menyikapi terhadap kaderisasi pemimpin tidak dengan cara-cara yang mengekspose kejelekan dan keburukannya, tetapi kita harus menggali para calon pemimpin melalui visi dan misi yang tawarkannya sehingga kita dapat menilai siapa calon pemimpin yang mumpuni dan layak untuk memimpin.

Ia juga melihat banyak yang harus dievaluasi tentang keterbatasan rekrutmen politik, misal tentang pencalonan legislatif, haruslah terprogram bukannya hanya saat diperlukan saja. Permasalahan pengkaderan ini menjadi masalah tersendiri yang harus ditangani bersama termasuk dari pihak pemerintah. Menurutnya, bukan hanya Lemhannas saja yang beker-

ja sama dengan partai politik untuk mengirim kadernya untuk di didik, tetapi kementerian/lembaga yang terkait harus ikut berperan serta dengan meningkatkan kualitas kader partai, bukan hanya untuk partainya, tetapi kader partai itu adalah kader bangsa dan aset bangsa.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya koordinasi pengurus partai pusat dan daerah, partai di daerah apakah sudah mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat di daerah atau belum. Menurutnya ironis, jika permasalahan kaderisasi ini akan mengakibatkan proses pilkada diikuti oleh kader pemimpin yang kurang mumpuni dan kualifikasinya jauh dari ideal, padahal mereka akan menempati jabatan-jabatan yang strategis di daerah. Bima juga mengatakan, fokusnya tidak hanya dalam skala nasional, tetapi penting pula partai politik dapat menyiapkan kader yang mumpuni di tingkat daerah untuk mendorong / Walikota berprestasi dan visioner. Ia juga menegaskan bahwa partai politiknya telah mendorong pengurus pusat kembali mengurus daerahnya masing-masing.

Kalau semuanya bercita-cita menjadi anggota DPR, Menteri, terus siapa yang menjadi Bupati, Walikota? Dalam otonomi daerah itukan penting untuk mengamankan kesejahteraan rakyat tingkat lokal, cetusnya.

Berkomentar tentang peluang pemimpin muda menjadi pemimpin nasional, Bima yang dikenal juga sebagai pengusaha itu menuturkan bukan untuk memiliki peluang tersebut harus memiliki modal, tapi jangan cuma diartikan modal uang, tapi harus memiliki modal sosial dan intelektual. Ia menceritakan saat dirinya mulai terjun ke dalam dunia politik, yaitu dengan modal akademisnya, ia berada pada posisi tawar dan saat itulah berani terjun berpolitik. Bima mengingatkan kepada anak muda masuk untuk partai adalah ketika yakin sudah punya posisi tawar yang cukup, karena kalau tidak punya posisi

tawar tersebut, tidak akan berperan, tidak punya arti, bahwa tidak berkontribusi dalam partai. Paling tidak menurutnya harus memiliki pendidikan setingkat S1, S2, atau bahkan S3.

Disisi lain, gerakan-gerakan pemuda sendiri, menurutnya saat ini sedang diuji oleh arus transaksional dan pragmatisme. Bima merasa sedih melihat bagaimana kongres-kongres munas organisasi kepemudaan yang diwarnai dengan politik uang.

Kalau sejak muda saja sudah bermain kotor dengan uang, bagaimana jika mereka nanti menjadi pemimpin yang lebih tinggi dalam konteks nasional. Itulah tantangan berat dan utama anak muda, banyak godaan untuk menjadi pemimpin besar secara instan, tambahna.

Menurutnya, anak muda memiliki kecenderungan lebih gemar berwacana dari pada berkarya, Bima mengingatkan kembali bahwa anak muda itu harus lebih banyak kerja dibanding wacananya. Anak muda harus menghindari pola transaksional dan pragmatis dan jangan sampai menjadi pemimpin instan. Berdasarkan survei LSI ada 70% anak muda enggan berpolitik, dan menurutnya hal ini akan menjadi berbahaya ketika anak muda enggan berpolitik. Kedepan siapa yang akan meneruskan partai politik? bagaimana dengan proses kaderisasi?

Oleh karena itu, Bima dan partainya tertantang untuk merekrut anak muda. Ia telah mengevaluasi selama ini partai politik hanya menjadikan anak muda sebagai lumbung suara saja ketika Pemilihan Umum, setelah selesai anakmuda dilupakan. Jadi Bima berpendapat jika berbicara tentang anak muda, harus berpikir jangka panjang kedepan.

Dengan mendirikan MATARA (Matahari Nusantara) yang disebut-sebut sebagai organisasi sayap partai, ia berhasrat untuk merekrut anak muda yang baik dan hebat untuk masuk ke dalam partai dan sekaligus untuk membenahi partai agar semakin asipratif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat.^[EH/AB]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Wahyu Muryadi
Pemimpin Redaksi TEMPO

Mencari Pemimpin Yang Berkarakter

bagai godaan lainnya. Sehingga bisa memikirkan bagaimana negara dan bangsa ini dicatat oleh sejarah sebagai bangsa yang besar," katanya.

"Republik ini kekayaannya luar biasa, tapi kita tidak bisa memaksimalkan karena banyak dikorupsi, banyak penyelewengan, jadi pemimpin harus punya karakter kepemimpinan, integritas, kredibel, sehingga apa yang dikatakan seorang pemimpin, itu adalah pancaran energi positif yang bisa diikuti oleh seluruh bangsa. Pemimpin itu adalah orang yang mampu menjalankan proses negosiasi yang andal dan baik dengan parpol. Sebab siapa pun presidennya pasti tidak akan terhindarkan dari tekanan-tekanan partai. Yang kemudian minta jatah di kementerian ini, kementerian itu, untuk kepentingan kelompoknya," ungkap Muryadi.

Berangkat dari kondisi objektif tingginya keterlibatan pemimpin terhadap korupsi beserta kasus-kasus lainnya, pimpinan redaksi majalah berita mingguan Tempo ini menyatakan bahwa pemimpin harus mampu mengatakan tidak. "Selain itu, pemimpin juga harus pandai negosiasi ke dalam maupun ke luar, dalam hubungan dunia internasional. Karena dalam beberapa hal, ada banyak faktor yang menyebabkan posisi tawar kita lemah terhadap dunia internasional," katanya. Akibat dari gelombang persoalan bangsa yang kian

besar ditambah lemahnya karakter yang dimiliki, maka pemimpin-pemimpin kita kerap terbawa arus. Ada kalanya kelemahan itu merupakan ketakutan kita. "Siapa pun presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat, apalagi mendapatkan suara yang mayoritas, harus punya kepercayaan diri yang kuat, bahwa apa yang diambil ini ujung-ujungnya demi kepentingan dan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pun kelompok. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari rumah, ini harus konsisten, menuntaskan.

Paling penting pemimpin itu harus mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Memang saat ini kepercayaan tersebut benar-benar mengalami degradasi. Itu celaknya dipicu oleh politik praktis yang terus-menerus mengurus rekening politiknya sendiri," kata Muryadi. Terkait persoalan krisis kepemimpinan, Wahyu Muryadi menjelaskan bahwa itu semua harus dicari solusinya, yaitu figur baru yang masih segar dan tidak terkait dengan suatu masalah, meskipun figur baru tersebut nyaris tidak ada. Orang muda harus menunjukkan kekuatan, tentunya orang muda yang belum terkontaminasi. Bisa masuk dalam sistem atau pun di luar sistem. Sebab yang terjadi saat ini, kebanyakan orang muda yang masuk dalam sistem, malah hanyut

Pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak lagi berpikir untuk memperkaya diri, kerabat, kelompok. Setiap negara atau bangsa di dunia pasti mengidam-idamkan sosok pemimpin yang berkarakter, berpihak pada rakyat, ikhlas bekerja dan selalu berbuat yang terbaik untuk kemakmuran serta kemajuan bangsanya. Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah masih adakah sosok pemimpin berkarakter yang sesuai dengan harapan tersebut di tengah memanasnya gejolak politik kita saat ini?

Wahyu Muryadi (Pemimpin Redaksi Majalah Tempo) menjelaskan bahwa untuk bisa menjadi pemimpin dan dipilih oleh rakyat banyak, maka pemimpin tersebut harus berkarakter, punya integritas; dalam artian dia tidak bisa dibeli oleh kepentingan apa pun, tidak bisa disogok, tidak tergiur dengan hal-hal yang sifatnya hedonistik. Maka dia benar-benar tidak tergoda oleh bujuk rayu dan ber-

terkena tsunami. Nilai-nilai ideal yang sudah ditanamkan luntur. Dia sudah menjadi bagian dari konspirasi jahat. “Jadi rekrutmen kepemimpinan itu harus diawali dari lingkup terkecil” tambah Wahyu.

Agar tidak banyak kader yang lompat pagar, kader pragmatis, kalau perlu harus dari bawah, dilatih benar-benar. Kalau perlu dibiayai oleh negara untuk bisa menjadi pemimpin yang benar. Ke depan, kampanye-kampanye pemimpin itu kalau bisa dibiayai oleh negara. Tidak seperti sekarang, banyak uang-uang siluman beredar yang akhirnya pemimpin tersebut harus terjerat menggadaikan kepemimpinannya,” paparnya. Maka dalam proses pencetakan pemimpin yang berkarakter tersebut semua pihak dan lembaga punya peran serta

fungsinya masing-masing, termasuk media.

Muryadi menjelaskan bahwa media punya peran sebagai penyambung lidah untuk kepentingan publik. “Kita harus mampu mengarahkan seluk-beluk kepemimpinannya, baik-buruknya harus diangkat di media, semuanya itu disebabkan karena kita hanya mengingatkan saja, agar jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jurnalis memang harus wajib terus-menerus untuk mengawasi berbagai proses rekrutmen politik dari daerah sampai pusat dengan teknik jurnalisisme,” jelasnya.

Pendidikan kepemimpinan, pendidikan berkarakter bisa diformalkan, juga tidak harus diformalkan. Hanya jangan terjebak sama formalitas saja. Negara yang harus membuat sistem tersebut itu untuk mencetak

pemimpin-pemimpin dahsyat, dari lingkup terkecil sampai nasional. Namun, proses penyaringan secara alamiah tetap diciptakan. Pendidikan penting untuk mencetak pemimpin berkarakter dan kuat. Harapan untuk Lemhannas RI harus membuka diri seluas-luasnya, terbuka pada seluruh masyarakat dan menjelaskan bahwa Lemhannas RI bukan tempat para tentara untuk menduduki posisi dan jabatan strategis di daerah maupun di pusat saja, tapi juga menjadi *think-tank* nasional yang memberikan masukan pada kebuntuan yang terjadi di tanah air agar atmosfer birokrasinya tidak lebih menonjol, agar tidak berada di menara gading,” pungkasnya. [AB]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Taufan Eko Nugroho R

Ketua KNPI

Indonesia Tidak Butuh Pemimpin Pragmatis



[Foto: Dok. Pribadi]

Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan sejahtera, tidak sekedar mengumbar janji, menebar pesona atau bersikap pragmatis. "Tidak hanya bisa melantunkan lagu kebangsaan, Indonesia Raya atau sekedar bersikap pragmatis, tetapi harus memiliki semangat perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan," sebagaimana dikatakan Ketua KNPI Taufan Eko Nugroho R.

Ia menilai, faktanya saat ini banyak muncul tokoh-tokoh senior yang selayaknya menjadi panutan, malah berlaku pragmatis, memandang sesuatu lebih pada sudut manfaat

bagi diri atau kelompoknya, padahal selayaknya sisi ideologi harus terus dipertebal dan diperkaya. Menciptakan pemimpin bangsa di masa depan yang terbebas dari praktek-praktek korupsi, menurut dia, merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. "Para pemuda menyaksikan sendiri sejumlah tokoh-tokoh senior yang terjerat kasus-kasus korupsi, padahal sebagian dari mereka juga piawai memberi petunjuk agar pemuda tidak melakukan perilaku tercela tersebut," ujarnya.

Indonesia, lanjutnya, memerlukan pemimpin yang dapat meneruskan perjuangan Presiden SBY selama dua periode kepemimpinannya

untuk menjadikan Indonesia yang sejahtera di seluruh pelosok Nusantara dan bermartabat di tengah pergaulan antar bangsa.

Taufan berpendapat, kiprah pemuda dalam kancah ketokohan nasional sangat penting disiapkan, karena jangan sampai jika telah mendapatkan kesempatan untuk memimpin bangsa ini, ternyata tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Diperlukan pula sikap kedewasaan, walaupun bukan berarti cuma dilihat dari sisi usia. "Saya dorong mereka yang memiliki kapasitas untuk maju pada Pemilu 2014.

Sebaliknya, ada juga teman-teman yang memiliki ambisi politik, tetapi kami nilai belum waktunya, untuk maju sehingga kami minta mereka bersabar dulu untuk mempersiapkan diri dan memperkaya pengalaman sampai 2019" kata Taufan.

Soalnya, menurut dia, jangan sampai setelah diberi mandat nanti, ternyata tidak mampu memikulnya bahkan hanya membuat masalah. "Saya menyaksikan sendiri, ada sebagian tokoh-tokoh pemuda yang potensial, tetapi belum matang, sehingga jika dipaksakan memimpin, akhirnya terpaksa menelan pil pahit, terjerat berbagai masalah".

"Kami di KNPI berfungsi sebagai rem, untuk menahan mereka yang memiliki ambisi, tetapi ternyata belum siap".

Pada bagian lain Taufan mengemukakan, bahwa sebagai pemimpin pemuda yang diwadahi KNPI ia berharap, proses Pemilu 2014 berjalan lancar, bebas dari aksi-aksi perusakan dan tindak kekerasan. "Saya bangga, sejauh ini para pemuda masih mampu mengendalikan diri,



[sumber: <http://esq-news.com>]

bersikap dewasa, walaupun disulut oleh aksi-aksi provokasi pihak-pihak tertentu". Ia juga mengaku ikut mendorong para pemuda untuk bergabung ke dalam partai politik, mengingat parpol adalah wadah strategis bagi kader-kader kepemimpinan bangsa. Namun demikian, sebagian dari mereka enggan karena termakan persepsi bahwa parpol bukan tempat yang bersih. "Padahal, arah kebijaksanaan nasional bangsa ini juga ditentukan oleh tokoh-tokoh parpol yang saat ini berkiprah di legislatif atau eksekutif, mulai dari tingkat desa sampai pemerintah pusat" Taufan Menambahkan.

Menjawab pertanyaan, apakah ada yang salah dalam rekrutmen parpol saat ini, menurut dia, proses kaderisasi seyogianya dilakukan untuk membentuk kader yang jelek menjadi baik dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, bukan se-

baliknya. "Sebagai perumpamaan, bagaikan orang minum air di gelas yang bersih, selanjutnya tergantung kualitas air yang diminum, air kotor atau air bersih, jadi bukan gelas yang perlu dibersihkan atau dicuci," tuturnya.

KNPI, lanjutnya, memerlukan lembaga yang mampu menyaring calon kader-kader nya, misalnya saja, melalui Sekolah Strategi Kepemimpinan Organisasi (Sesko) seperti yang diselenggarakan di ibu kota provinsi Papua Barat.

Kader-kader KNPI yang berasal dari tingkat kabupaten diajak mengenali wilayah kabupaten lainnya, mengingat banyak di antara mereka yang belum pernah keluar dari wilayah kabupaten asalnya. "Dengan demikian diharapkan akan terbentuk semangat kebangsaan" kata Taufan.

Ketua KNPI ini juga memandang, persoalan ekonomi merupakan isu

penting di negeri ini karena bisa kait-mengkait dengan isu lainnya.

Misalnya saja ancaman disintegrasi di Papua, tidak murni hanya terkait oleh tuntutan kemerdekaan saja, tetapi lebih banyak akibat isu kesejahteraan.

Indonesia sejauh ini dinilai cukup mumpuni mengelola perekonomiannya, namun demikian, untuk menjawab tantangan ekonomi yang lebih besar di masa-masa mendatang, kita memerlukan pemimpin yang tepat, jika tidak, bangsa Indonesia bisa terpuruk.

Menyinggung masa depan Indonesia, katanya menambahkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi bangsa adalah ketersediaan lapangan kerja, hal ini dapat dilihat dari banyak lulusan S1, S2 bahkan S3 yang menyandang gelar tapi sulit untuk mendapat pekerjaan, sehingga sebagian dari mereka hijrah ke luar negeri. [NS/]



[sumber: http://image.metrotvnews.com/bank_images/actual/138438.jpg]

Maruarar Sirait

Anggota Komisi XI DPR RI

Pemimpin Yang Mampu Menciptakan Bangsa Mandiri

Maruarar Sirait, anggota komisi XI DPR RI, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (F PDI-P), memandang bahwa problem yang tengah dihadapi bangsa saat ini terletak pada masalah ekonomi, hukum dan pluralisme.

“Hal yang utama untuk menangani hal tersebut adalah, pemimpin harus memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Ia memiliki semangat pemberdayaan masyarakat, dan bisa memberi suri

teladan kepada rakyat,” kata Maruarar.

Saat ini, Indonesia patut berbangga diri bahwa ekonomi tumbuh dengan pesat, dan menjadi negara nomor dua dengan perkembangan ekonomi terbaik setelah China dalam konteks negara G-20. Investasi terus tumbuh dan tercatat hingga 11,2 persen, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 persen. Tahun 2013 ini, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,8 persen.

“Pertumbuhan ekonomi secara

makro memang meningkat, tapi hanya di sektor modal saja, namun pertumbuhan itu tidak diimbangi pada sektor mikro seperti sektor padat karya. Selain itu, sektor perikanan dan pertanian tidak bergerak sama sekali. Begitu pula dengan sektor riil, sehingga di masyarakat terjadi ketimpangan sosial, sehingga membuat jurang pemisah antara miskin dan kaya semakin melebar,” tambah Maruarar.

Di sisi hukum, menurut Maruarar,

masih perlu ada perbaikan dan penegakkan hukum yang nyata dan tidak berpihak. Ia melihat pentingnya pemimpin untuk menjadi problem solver, pemecah masalah atas konflik antarmasyarakat. “Di sisi pluralisme, faktanya kini justru masalah kekerasan yang bernuansa suku agama itu meningkat,” tutur Maruarar. Menurutnya, seorang pemimpin yang bertindak sebagai problem solver juga harus mampu dan bisa membawa bangsa ini berkedaulatan, dalam sektor ekonomi, energi, dan pangan.

“Jangan beli kucing dalam karung, pemimpin yang baik tentunya harus mempunyai jejak rekam yang baik dan berjuang dengan keringat dalam mempersembahkan prestasi untuk rakyat,” ujar Maruarar.

Permasalahan kepemimpinan saat ini, menurut Maruarar adalah lemahnya kepercayaan masyarakat. “Kepercayaan itu hanya bisa dijawab dengan bukti dan kinerja nyata,” ujarnya. Bagi Maruarar, krisis kepercayaan terjadi karena banyak pemimpin yang tidak memenuhi janji-janji yang banyak terlontar saat masa kampanye. “Untuk itu, pemahaman atas ideologi dan karakter kebangsaan menjadi parameter penting,” kata Maruarar.

Berdikari dalam Politik, Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia diraih dengan pengorbanan darah dan air mata, hal ini berbeda dengan kemerdekaan yang dicapai oleh negara lain yakni berasal dari pemberian dari negara yang menjajahnya. Partai diharapkan dapat menjadi lembaga politik yang bisa menyatukan masyarakat atas persamaan ideologi, bukan atas persamaan suku dan agama. “Bangsa Indonesia memiliki harga diri, pemimpin harus lebih mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain dengan menghormati perjanjian internasional yang telah dibuat sebagai bentuk pergaulan dengan negara lain,” tutur Maruarar.

Belajar dari perjuangan pendiri atas kemerdekaan bangsa Indonesia, pemimpin dituntut dapat membawa bangsa ini sesuai dengan ideologi Pancasila, berdaulat dalam bidang politik. Meminjam istilah Presiden Pertama RI, Soekarno, Indonesia saat ini juga harus Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri). Politik Berdikari menjadi populer setelah Bung Karno memberi judul pidatonya pada 17 Agustus 1965: “Tahun Berdikari”. Dalam pidato 17 Agustus 1964 misalnya, Bung Karno mengemukakan prinsip Trisakti Tavip -Tahun Vivere Pericoloso- yang berisi tiga prinsip Berdikari, yakni, berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdikari dalam bidang ekonomi artinya tidak bergantung dengan negara lain, namun bukan berarti anti-asing. “Seorang pemimpin harus memiliki visi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara terbesar di ASEAN. Target kita di tahun 2015 harus bisa menguasai ASEAN,” kata Maruarar.

Dalam hal kebudayaan, Bung Karno mengemukakan cara-cara *text-book thinking*, yakni mengambil pemikiran para ahli ekonomi Barat, tanpa memperhatikan kondisi di Indonesia. Kemudian, dalam kaitannya dengan kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Dari kacamata Bung Karno, mahkota kemerdekaan suatu bangsa adalah bukan keanggotaan PBB, tetapi Berdikari.

“Sesuai dengan ucapan Bung Karno, ketiga prinsip berdikari dalam bidang politik, ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan dipreteli satu sama lain. Tidak mungkin akan ada kedaulatan dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdikari dalam ekonomi. Demikian pula sebaliknya, agar bangsa ini tidak didikte oleh bangsa manapun,” tambah Maruarar.^[EH]

“
**Bagi
 Maruarar,
 krisis
 kepercayaan
 terjadi karena
 banyak
 pemimpin
 yang tidak
 memenuhi
 janji-janji
 yang banyak
 terlontar
 saat masa
 kampanye.**”

Poempida Hidayatulloh
Politisi Partai Golkar

Kembalinya Kepercayaan Publik Terhadap Parpol

Perlu Sinergitas Elemen Bangsa

Tingkat kepercayaan publik Indonesia terhadap citra partai politik terutama yang memiliki kursi di parlemen semakin menurun, faktor ini disebabkan karena sejumlah elit dan kader partai tersebut terlitik kasus hukum, juga adanya persepsi jika partai tak lagi menyuarkan aspirasi rakyat tetapi lebih menjadi corong pemerintah, dan ditambah lagi dengan adanya konflik internal dalam memperebutkan posisi jabatan tertentu dalam partai itu.

Menurut Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh sangat disayangkan jika citra partai politik hanya dilihat dari sisi buruk saja, padahal banyak juga sumbangsih partai yang telah diberikan demi menciptakan kesejahteraan dan kemajuan negara ini, begitu juga dengan kader partai, banyak diantara mereka yang memiliki integritas, kapabilitas dan berprestasi namun semua ini tidak pernah terekspos kepermukaan.

"Selain itu, turunnya kepercayaan publik juga disebabkan peran media dalam pemberitaan yang sering mengambil angle dari sisi buruk sebuah partai, dan media juga lebih senang memainkan jurus "bad news is good news" demi kepentingan industri media mereka.

Survei Terkait Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Menyedihkan.

Pada tahun 2012 yang lalu, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Hasilnya sangat mengejutkan dari 2117 responden yang diambil secara acak di 33 provinsi hanya 22,4 % yang menyatakan kinerja parpol baik, sementara sisanya menilai sebaliknya. Dari hasil survei tersebut dikatakan penyebab turunnya kepercayaan publik terhadap partai karena parpol tidak lagi sebagai corong aspirasi publik ke pemerintah tetapi parpol justru menjadi alat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaan dengan menguasai SDA yang ada. "Tentu saja, kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena akan memicu potensi instabilitas sosial politik dimasyarakat,"katanya.

Lebih lanjut Poempida mengatakan jika masyarakat apatis terhadap parpol, mereka akan menjadi frustrasi kemudian memicu kepada ketidakpercayaan lagi pada sistem demokrasi yang ada.

"Kondisi ini ditandai meningkatnya suara golput pada setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada,"ungkapnya



[sumber: <http://anton008.files.wordpress.com/2009/03/pomp15.jpg>]

Perlunya Sinergitas Elemen Bangsa Untuk Memperbaiki Citra Partai Politik Di Mata Publik.

Fenomena ketidakpercayaan publik yang semakin menurun adalah masalah serius yang harus segera diatasi.

"Dalam pemberian solusi terlebih dahulu harus dipahami dengan jelas apa yang menjadi akar dari permasalahannya, apakah problem ideologinya (pemikiran dan metode perjuangan), ikatan antar orang-orang di partai, atau justru kualitas orang-orang yang bergabung di dalamnya,"terangnya. Dia menambahkan, pengembalian tingkat kepercayaan dan citra parpol dimata publik, menjadi tugas bersama bukan hanya tugas satu partai saja. Dan dalam penyelesaiannya, diperlukan sinergitas bersama antar lintas partai, komunitas, dan kalangan agamawan.

Pemimpin Harus Memiliki Jiwa *Strong Leadership* Dan *Grand Design* Masa Depan Bangsa

Poempida mengatakan sosok pemimpin harus memiliki *strong leadership*, dimana gagasan dan pemikirannya bisa diterima oleh semua

lapisan, tanpa memicu timbulnya pertentangan dari kaum oposisi.

Lebih lanjut Poempida mengatakan, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin, yang memiliki sikap *leadership* otomatis akan diikuti dengan sukarela oleh bawahannya.

“Kendati demikian pemimpin itu bukan sosok pemimpin otoriter yang tidak mau mendengar masukan dari bawahannya dan kerap memaksakan kehendaknya,” tegasnya

“Mereka pro kebijakan yang ditawarkan pemimpinnya, dalam pengertian mereka menerima ide, gagasan dan kebijakan sang pemimpin” terangnya. Pasalnya *strong leadership* lanjut Poempida dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk meraih keadilan, dalam pencapaian kesejahteraan. Sosok pemimpin yang baik kata Poempida juga harus bisa membuat *grand design* untuk masa depan negaranya, negara ini mau diarahkan kemana? Apakah menjadi negara agraris atau industri. Tentu saja hal ini didasari dengan alasan tepat ditambah dengan dukungan IPTEK dan adanya kesepahaman bersama dengan seluruh unsur elemen bangsa. “Dan pencapaian keberhasilan juga tidak terpacu secara natural saja tetapi harus melalui target yang telah ditentukan bersama.

Pemimpin Berintegritas Mampu Berantas Korupsi

Sosok pemimpin ideal kata Poempida juga harus memiliki integritas, dalam kesatuan sikap mental, pikiran, tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik, selain itu dalam konsep tentang integritas terdapat kombinasi dari nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat perbaikan. “Nilai-nilai ini bukan hanya berada di dalam sikap mental atau pikiran diri individu tetapi harus muncul dalam bentuk tindakan yang kongkret. Dengan adanya integritas, upaya pemberantasan korupsi akan berhasil, karena pe-



[sumber: https://lh5.googleusercontent.com/-s4_juz1ddWQ/TYhR7Aeczul/AAAAAAAAAE4/7N4G0qNzo0/s1600/T+Jet+-1.jpg]

mimpin berintegritas, setiap langkah dan perilakunya diikuti oleh bawahannya,” tegasnya.

Pentingnya Kaderisasi di Partai Politik

Semua orang untuk menjadi tokoh dan pemimpin kata Poempida bukan didapat secara instant tetapi melalui proses yang panjang dan memerlukan sebuah. Perjuangan untuk mencapainya semua itu didapat melalui pengalaman, diskusi-diskusi, membaca dan berorganisasi.

“Kaderisasi sendiri sangat penting karena politik itu memerlukan kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari para kadernya,” kata Poempida. Kemudian Poempida, menyitir ucapan Bung Hatta, jika partai tidak menjalankan kaderisasi, maka anggota partai hanya akan menjadi “pembek” keinginan pimpinannya, tentu saja hal ini membuat partai menjadi lembek dalam memperjuangkan pergerakannya, malah hal ini kemudian dapat membunuh pergerakan itu sendiri. “Kemerdekaan Indonesia, seperti kata Bung Hatta tidak akan terwujud hanya dari keinginan para pemimpin pergerakan saja, tanpa didukung perjuangan dan keyakinan rakyat banyak dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri,” kata Poempida.

Dia menambahkan, disinilah kemudian terlihat pentingnya kaderisasi, baik secara reguler, te-

rencana, dan intensif, yang berguna untuk menjelaskan apa arti, dan tujuan dari kemerdekaan itu serta hal ini penting untuk menyatukan persepsi perjuangan.

“Bung Hatta, mengatakan tugas untuk mendidik rakyat (kaderisasi) adalah melahirkan semangat merdeka. Semangat merdeka itu tidak bisa dibangun hanya dengan agitasi belaka,” jelasnya. Ada tiga bentuk kaderisasi yang dianjurkan oleh Bung Hatta, lanjut Poempida, Pertama, pendidikan politik untuk memberi rakyat pengetahuan politik.

“Dengan begitu, rakyat menyadari mengapa dia harus berjuang, bagaimana perjuangannya, dan tujuan perjuangannya. Pendidikan politik ini juga harus menanamkan pemahaman yang utuh mengenai Kedaulatan Rakyat sebagai dasar dari Daulat Rakyat,” terangnya. Kedua, lanjut Poempida, pendidikan soal ekonomi untuk memberi pemahaman kepada rakyat mengenai azas perekonomian Indonesia nantinya, yakni kolektivisme (milik bersama). “Dan yang terakhir, pendidikan sosial untuk memberi pemahaman kepada rakyat mengenai sistem sosial agar mereka mengerti penyakit sosial yang menggerogoti kehidupan nasional,” terangnya. Sebagai organisasi kader, lanjut Poempida partai kami selektif dalam menerima anggota, dan terus melakukan pembinaan kepada kader agar para kader dapat mempunyai persepsi yang sama dalam menjalankan arah kebijakan yang telah digariskan partai. [EH]

Radhar Panca Dahana
Budayawan

Jenderal Yang Baik Adalah... **Prajurit Yang Baik**

Di tengah gonjang-ganjing politik, hukum, ekonomi saat ini seolah-olah semua orang merasa mampu menjadi pemimpin. Namun ketika mereka berhasil menjadi pemimpin, mereka hanya bisa mengatasi permasalahan dengan capaian-capaian singkat. Lantas jika dilihat dari kaca mata budaya, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah seperti virus tersebut. Virus yang menyerang sampai ke organ-organ vital sebuah bangsa.

Terkait hal tersebut, budayawan Radhar Panca Dahana menjelaskan bahwa melihat kondisi saat ini, beberapa pengamat dan rakyat merasa sangsi, karena tidak punya latar belakang yang kuat, bahkan ada beberapa calon pemimpin yang *record*-nya terbalik. "Boro-boro mampu mengatasi masalah, malah menambah masalah. Nah, dalam pandangan kita sebenarnya yang mampu itu seperti apa. Kalau saya, ada lima kriteria untuk menjadi seorang pemimpin," katanya.

Pertama harus jujur. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada rakyat yaitu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Kedua, punya visi seperti gagasan, taktik, strategi untuk membawa dan membenarkan negeri. Ketiga punya kekuatan dan bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk menjadi pemimpin yang kuat. Keempat, Napoleon Bona Parte

mengatakan, bahwa, "Jenderal yang baik adalah prajurit yang baik." Artinya penguasa yang baik adalah bawahan yang baik. Minimal dia pernah menjadi bawahan yang baik melalui proses dari bawah. Kelima, harus memahami kebudayaan bangsa, karena kalau tidak mengenali kebudayaan, maka tidak akan mengenali bangsanya. Bangsa dikenal dari kebudayaan. Bagaimana dia mengenali bangsanya kalau tidak mengenali kebudayaan secara keseluruhan. Tidak bisa bangsa (rakyat) dikenali lewat sisi ekonomi, politik, agama semata.

Mengenai posisi kaum muda di tengah-tengah kaum tua Radhar menjelaskan bahwa semuanya itu tidak masalah. Dalam artian, kaum muda dan kaum tua memberikan timbal balik yang positif. Dengan kata lain, kaum tua memberikan pendidikan kepemimpinan, sifat dan sikap yang baik, secara teori dan praktik, sedangkan kaum muda menangkap, memahami serta mempraktikkannya dengan baik pula. "Intinya selama dia melakukan itu untuk mengedukasi dirinya, itu tidak masalah. Kalau mengekor saja, itu bisa kita golongkan sebagai pemuda yang lemah, dan ternyata sistem politik kita saat ini justru melahirkan pemuda yang lemah seperti itu. Pemuda yang tidak berkepribadian, karena iklim, tradisi, kebudayaan serta sistem politik meminta dia untuk menjadi patron klien.

Dia hanya mengekor saja pada



[sumber: <http://3.bp.blogspot.com>]

atasan. Akhirnya melahirkan pemuda yang ABS (Asal Bapak Senang). Kerjanya hanya membuat ketua atau pemimpinnya senang. Itulah yang membunuh ketegaran dan karakter anak muda. Tinggal dibaca sendiri di partai-partai kita, apakah mereka mempraktikkannya. Ini menjadi tumor dalam kehidupan politik kita yang sudah kronis, bahkan penyakit itu juga hadir pada partai-partai yang baru," jelasnya.

"Anak muda harus menjadi pemimpin yang egaliter, karena pemimpin itu hanya amanah, titipan kekuasaan, yang sebenarnya tidak memberikan kuasa apapun. Dia tidak punya alasan untuk bersikap sewenang-wenang. Itu bukan kekuasaan kenabian, tapi kekuasaan yang diberikan oleh mayoritas. Untuk menjadi pemimpin jangan patron, tapi harus egaliter. Menciptakan tradisi baru, bergerak di luar atau di dalam sistem. Membuat kaderisasi politik yang baru, memperjuangkan apa yang diyakini benar dan baik sampai muncul ditingkat nasional, agar tidak selalu dipotong oleh elit-elit tua," ungkap Radhar.

Melihat kondisi objektif politik, perekonomian, dan hukum kita saat ini Radhar Panca Dahana menjelaskan



{sumber: <http://jurnalpatrolinews.com>}

harus segera dicari jalan ke luarnya agar tidak berlarut-larut. Jalan ke luar yang harus dilakukan harus sekapasitas dengan persoalannya. Persoalannya berat, maka jalan ke luarnya juga berat, tidak ringan. Kalau dilakukan dengan kesungguhan hati, jujur tanpa pamrih. Kalau ada yang bisa memegang itu, maka hati rakyat bisa direbut. “mengenai hal tersebut, saya melihat tidak ada calon pemimpin yang seperti itu saat ini. Ini bukan jalan instan. Ini harus dilakukan secara bertahap, mungkin satu dua generasi, ini persoalan sudah sangat kompleks. Kita harus sabar,” katanya.

Basis Kebudayaan

Setiap bangsa-bangsa di dunia pasti memunyai jalan ke luar atau cara dan strategi dalam melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang

membelenggu. Untuk itulah, Budaya-wan Radhar Panca Dahana menjelaskan, bahwa generasi sekarang tugasnya bukan mengganti kekuasaan, tapi menyiapkan fundamen-fundamen untuk lahirnya pemimpin yang lebih bisa diterima masyarakat, bukan sekedar mengganti kekuasaan. “Nah, fundamen itu menurut saya basisnya adalah kebudayaan.

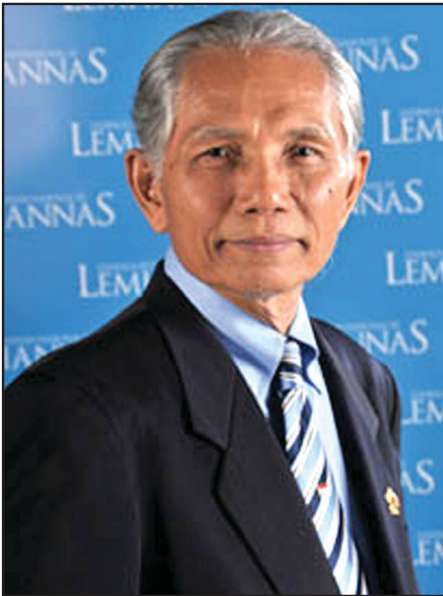
Barulah selanjutnya kita membentuk tradisi politik, budaya politik dan sistem politik. Mungkin baru generasi kedua, membuat fundamen kebudayaan untuk menyusun semuanya. Barulah muncul pemimpin-pemimpin yang bisa menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Kalau sekarang, memangnya kita seperti buat nasi liwet. Intinya, kita jangan terjebak pada paradigma lama, hanya sekedar mengganti kekuasaan,” jelasnya.



Dengan kata lain, kaum tua memberikan pendidikan kepemimpinan, sifat dan sikap yang baik, secara teori dan praktik, sedangkan kaum muda menangkap, memahami serta mempraktikkannya dengan baik pula.



Meskipun demikian Radhar menjelaskan untuk membuat fundamen baru tersebut, tidak perlu diformalkan, karena kebudayaan berjalan dengan sendirinya. Menjadi generasi baru, membuat fundamen baru, dibutuhkan minimal dua generasi, dua puluh tahun ke depan. “Kalau tidak segera dibenarkan cara berpikirnya, maka kita akan tambah parah. Segeralah buat fundamen baru. Lemhannas tugasnya menyiapkan semuanya. Bukan mengurus elit, terlalu mahal sebuah lembaga besar untuk mengurus elit. Lemhannas punya tugas kerakyatan untuk menjadi lembaga ketahanan nasional berbasis rakyat. Pembekalan harus diimplementasikan pada rakyat, harus masuk pada rakyat,” pungkas Radhar.□



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Adi Sujatno

Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional

Konsep Ideal Kepemimpinan Pada Pemilu 2014

Dalam catatan sejarah Nusantara, adalah Prabu Jayabaya (murid dari seorang ulama Islam yang bernama Maulana Ali Samsu Zein) memiliki konsep pemikiran tentang Kepemimpinan ideal untuk masyarakat Nusantara. Konsep pemikiran Prabu Jayabaya tentang bait-bait tutur Jawa dan Sunda, kemudian disempurnakan oleh R. NG. Ranggawarsita, adalah pujangga besar Nusantara yang hidup di Kasunanan Surakarta sekitar 15 Maret 1802 sampai dengan 24 Desember 1873 (± 71 Tahun Usia Beliau).

Konsep pemikiran “pemimpin nusantara yang ideal sama dengan pemimpin sejati sama dengan Satria Piningit, yang memiliki ciri-ciri berhati putih, keturunan Waliyullah; berbudi luhur, hormati budaya leluhur bangsanya; bergelar Pangeran perang yang memiliki senjata trisula weda yaitu benar, lurus, jujur; adil, hidup bersahaja dan sederhana, adil terhadap sesama, menghormati per-

bedaan agama dan keyakinan, taat aturan dan hukum. Selain itu, pemimpin juga harus mempunyai rasa kasih sayang, tidak mencari ketenaran atau jabatan. Dengan kata lain, kekuasaan adalah amanah, mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan diri dan keluarganya.

Sejalan dengan kondisi bangsa kita saat ini, guna memberikan solusi politik atau jalan keluar maka dibuat dalam bentuk *Rescue Program* (jalan alternatif untuk menyelamatkan bangsa) sebagai langkah strategis untuk mengatasi beberapa permasalahan aktual dimaksud. Untuk melaksanakan *rescue program* dan langkah strategis yang *feasible, applicable and workable* dalam rangka membangun bangsa ini menjadi bangsa besar dituntut adanya “*strong leadership*” yang mampu berperan sebagai *solidarity maker and administrator maker* yang baik, komunikatif, bersih dan berani bersikap tegas, mempunyai visi ke depan,

serta memiliki kharisma yang dihormati dan disegani rakyat.

Pada gilirannya hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional guna mengharmonisasikan situasi dan kondisi masa lalu dengan masa sekarang serta mengharmonisasikan semua aspek-aspek kehidupan nasional. Sejatinya, pemilu adalah media bagi rakyat untuk mendapatkan sosok kepemimpinan yang representatif bagi bangsanya. Oleh karena itu Pemilu merupakan agenda yang sangat penting dalam upaya mendapatkan sosok Pemimpin Nasional yang berkualitas. Untuk itu kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihan sangat dibutuhkan, sehingga pada akhirnya rakyat tidak salah memilih pemimpinnya.

Tiga Kriteria

Sekarang ini dan ke depan Indonesia memerlukan pemimpin dan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan



<http://www.tinyurl.com>

bangsa. Sosok Pemimpin Nasional yang kuat terdiri dari tiga kriteria, yaitu pimpinan nasional yang dipercaya dan diterima masyarakat (*social trust*). Hubungan yang erat antara pemimpin dan yang dipimpin merupakan syarat utama bagi tercapainya tujuan kepemimpinan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemimpin akan dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan efektif apabila ia diterima, dipercaya, didukung serta dapat diandalkan.

Agar dapat memperoleh kepercayaan rakyat, seorang pemimpin harus memiliki reputasi yang baik, kinerja yang optimal terutama

dalam mengantisipasi tantangan ke depan dan keberhasilannya mengatasi berbagai permasalahan krusial serta membawa kemajuan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Pemimpin yang diinginkan rakyat adalah pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena menurut hukum. Pemimpin yang demikian itu adalah pemimpin yang kuat karakternya, yang tidak ragu untuk membenarkan dan menyalahkan, tidak ambivalen.

Selanjutnya adalah sosok pimpinan nasional yang memiliki kecerdasan intelektual (*intellectual quality*), emosional (*emotional quality*) dan spiritual (*spiritual quality*). Pemimpin dituntut mempunyai kemampuan

untuk memilih prioritas sasaran pembangunan, serta memimpin negara agar tetap tegak dan kokoh menuju tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan emosional. Kesalahan pemimpin dalam membaca dan menerjemahkan emosi lawan bicara, termasuk emosi rakyat, dapat berakibat fatal dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang strategis. Di samping kedua kecerdasan di atas, yang tak kalah pentingnya adalah, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual, pemimpin perlu mengasah kerohaniannya dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya secara benar. Hal ini dilakukan agar tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya keduniawian.

Kepemimpinan Nasional yang Integratif dan Negarawan

Kepemimpinan Nasional Indonesia yang integratif harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai negarawan. Seorang negarawan tidak perlu harus menduduki jabatan kenegaraan walaupun ia berada pada tatanan kehidupan kemasyarakatan maupun tatanan politik nasional yang harus memiliki sifat dan ciri kenegarawanan yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan/kelompoknya. Berpikir sebagai negarawan memiliki ciri "SATRIA", yaitu mampu menyatukan kesatuan berpikir yang meliputi masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Landasan berpikir sebagai negarawan adalah Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara, UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara, karsa nasional yaitu cita-cita nasional—negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan nasional meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan Nasional Utama (*Main National Interest*), tetap tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, identitas dan integritas nasional, berhasilnya pembangunan nasional.

Bersikap sebagai negarawan harus berlandaskan pada nusantara yang merupakan wawasan nasional Indonesia yaitu mawas ke dalam, mengutamakan persatuan dan kesatuan dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup bangsa. Mawas ke luar, menjamin kepentingan nasional Indonesia dan ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Negarawan hendaknya dapat bersikap meletakkan kepentingan



<http://www.tinyurl.com>

nasional di atas kepentingan pribadi kelompok daerah, disertai kesadaran bela negara dan patriotisme/jiwa dan semangat juang yang tinggi.

"Leadership" merupakan "*a learned skill and competence*", yang dibutuhkan. Dalam hal ini ada dua yaitu *vision*, untuk memprediksi apa yang diharapkan oleh organisasi di masa depan dan bagaimana untuk mencapainya secara lebih cepat/efisien. Untuk bisa memprediksi, maka dibutuhkan beberapa teori dan konsep yang merupakan hasil kontemplasi dan memiliki fungsi-fungsi "*to Describe*"; "*to Explain*"; dan "*to Predict*"; dengan demikian untuk kepentingan organisasi dan manajemen yang prima, harus terjadi kombinasi antara teori atas dasar *a sound, knowledge; action and skill*; dan *sympathy*, di era yang penuh turbulensi ini, dikatakan bahwa "*leadership is very critical*" (genting).

Hal tersebut disebabkan karena seorang pemimpin harus bekerja secara efektif dalam kompleksitas permasalahan yang lintas sektoral dan global, "*Statesmanship*" sebaliknya hanya dimiliki oleh manusia perkecualian atau manusia istimewa yang merupakan "*a great man*", yaitu seorang yang memiliki karakter khusus, yang lebih dari sekedar seorang pemimpin (*leader*).

Dalam menghadapi Pemilu 2009, baik Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 Lemhannas RI telah merumuskan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) atau *Indonesian National Leadership Index* (INLI) yang mengandung 4 kategori Cita

Susila dan Akuntabilitas, (juga untuk menghadapi pemilu tahun 2014) yaitu indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual, indeks Moralitas dan Akuntabilitas Sosial, indeks Moralitas dan Akuntabilitas Institusional, indeks Moralitas dan Akuntabilitas Global.

Dengan harapan semoga bangsa ini segera mendapatkan calon-calon pemimpin nasional yang tidak saja pemimpin yang kuat (*Strong Leader*) sebagai perpaduan karakter manager pemimpin (*Leader*) dan negarawan (*Statesman*) dengan standar internasional tetapi juga merupakan personal "*good leader*" yang berwawasan kebangsaan. Pilpres 2009, telah berakhir dengan aman, lancar dan sukses meskipun ada beberapa catatan, yang telah menghasilkan pasangan SBY-BOEDIONO dengan perolehan suara 73.874.562 suara setara dengan 60.80% yang telah mendapat kepercayaan dan mandat rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014.

Oleh karena itu, semoga pemilu 2014 mampu memilih Pimpinan Nasional yang berkualitas, *self leadership*, *strong leadership*, memenuhi kriteria negarawan, memenuhi persyaratan IKNI, dan memenuhi syarat sebagai *servant leadership* (Pemimpin yang melayani masyarakat bangsanya) yang juga sebagai *visioner leadership* (Pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan), dan mampu membaca tanda-tanda zaman (*situational leadership*), yang juga memenuhi kriteria konsep Pimpinan Nusantara yang ideal yaitu satria piningit di tahun 2014? □



[sumber: <http://berita.upi.edu/files/2011/02/uwi.jpg>]

Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si

Penulis, Dosen Politik Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Merindukan Kepemimpinan Nasional Yang Transformatif

Menjelang 2014, suhu politik nasional sudah mulai memanas. Kepemimpinan SBY akan segera beralih. Peralihan kepemimpinan ini bermakna strategis. Bisa terjadi peralihan generasi atau malah melanggengkan kekuatan kaum senior bangsa ini. Mesti tidak harus mendiametarkan persaingan antar-generasi, tetap saja nuansa politik dalam perebutan kekuasaan selalu terasa.

Suksesi kepemimpinan nasional akan selalu menyelimuti kehidupan politik bangsa kita. Persoalannya adalah model kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini ke depan? Banyak teori yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Namun, khusus bagi bangsa kita nampaknya diperlukan kepemimpinan yang

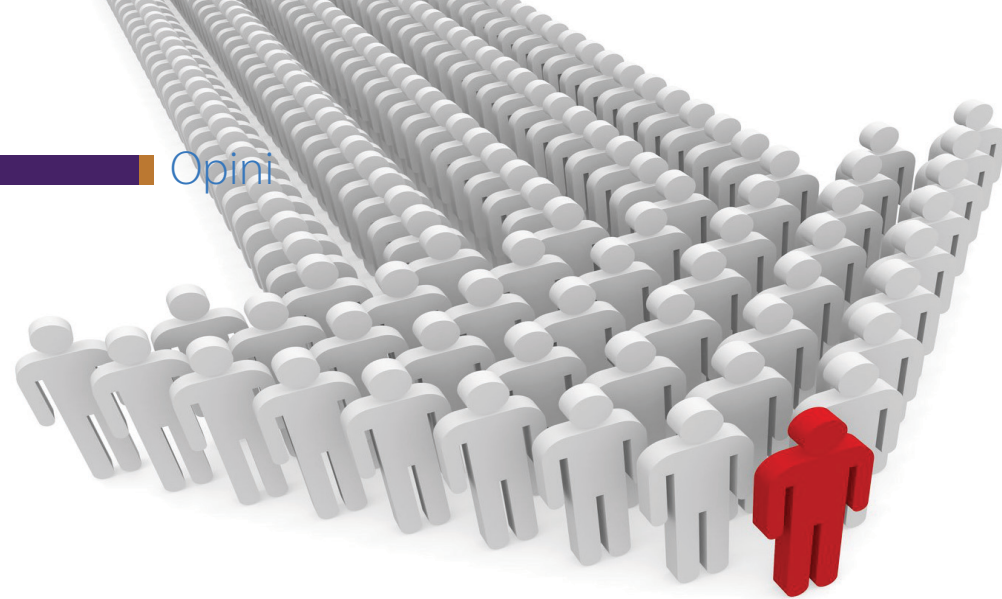
transformatif. Kepemimpinan *transformatif* dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang menyandarkan pada kekuatan kharismatik yang kemudian ia mampu melakukan transformasi institusi negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Di sini harus dibedakan kepemimpinan kharismatik gaya Weberian dengan kepemimpinan *transformatif* gaya James MacGregor Burns. James MacGregor Burns menolak pengkultusan pribadi dan "memaksa" seluruh kekuatan sumber daya organisasi untuk melakukan transformasi berbasis moralitas dan etika untuk kesejahteraan seluruh *stakeholder*-nya.

Kepemimpinan *transformatif* pun lebih manusiawi tetapi tetap berwibawa atas "kharisma rasional-*transformatifnya*", untuk mengajak

rakyatnya menghadirkan ke-maslahatan bersama. Jadi, pola kepemimpinannya adalah demokratis, mementingkan arus bawah dan bersedia berkorban demi bangsanya.

Kepentingan pribadi, keluarga, golongan, partai, dan lain-lain "dikorbankan" untuk kepentingan bangsa dan negara demi kesejahteraan lahir batin warga negaranya. Ia menjadi bagian solusi bangsa, bukan bagian dari masalah bangsa. Ia pun melakukan pendidikan politik bagi warganya agar terjadi *capacity building*, yang pada gilirannya bangsa akan kuat. Warga negara yang mandiri, cerdas, dan kuat akan membantu akselerasi bangsa untuk menjadi bangsa yang maju. Bahkan bagi seorang pemimpin *transformatif*, ia ingin menjadi orang pertama mendapatkan penderitaan jika rakyatnya menderita, dan ia akan



[sumber: http://www.youwall.com/papel/the_leader_wallpaper_6fbc9.jpg]

menjadi orang terakhir bahagia jika rakyatnya mendapatkan kebahagiaan.

Pemimpin bangsa ke depan harus tahu karakter warga bangsa dan harus mencintai dan dicintai rakyat. Namun sayangnya lingkungan partai politik belum melahirkan pemimpin yang *transformatif*, baru sebatas kepemimpinan dalam arti formal legal. Padahal yang kita butuhkan selain seorang politisi juga adalah ia seorang negarawan, yakni seorang pemimpin yang mengayomi dan melayani semua kepentingan rakyat, bukan hanya melayani dan mengayomi kepentingan golongan tertentu saja.

Solusi untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan bisa diterima oleh rakyat adalah diawali dengan mekanisme rekrutmen pemilihan pemimpin di lingkungan parpol yang lebih transparan, berkualitas, bersih, jujur, dan tidak melakukan praktik politik transaksional.

Kita rindu gaya kepemimpinan Soekarno yang tegas, lugas, dan mencintai rakyatnya. Bahkan mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Kesulitan yang timbul dalam melahirkan pemimpin bangsa saat ini adalah setiap kepentingan lebih mengedepankan kepentingan golongannya sendiri. Alhasil proses seleksi dari masyarakat belum tentu sama harapannya dengan pilihan parpol. Kepentingan parpol terlalu dominan, untuk tidak menyebut *oligarkhis*.

Padahal selayaknya seleksi ke-

pemimpinan nasional harus membaca dan mencermati hati nurani rakyat. Kondisi bangsa seperti ini membutuhkan figur seperti apa? Parpol seyogyanya tidak memaksakan kehendak dan terjadi kondisi yang mengarah pada tirani partai dalam mengusung pimpinan nasional. Terkadang parpol pun melakukan politik "daur ulang". Tokoh-tokoh senior yang masih "layak jual" dalam Pemilu Presiden diusung kembali, melalui kemas dan pencitraan yang luar biasa lewat media masa. Seolah partai politik kita kehabisan "stok" pemimpin muda yang layak diusung. Atau memang kepemilikan parpol layaknya seperti perusahaan swasta, dimana para pendiri, ketua umum, dan elite lainnya menguasai seluruh "aset-aset politik" termasuk kebijakan politik partai dalam pencalonan presiden, tanpa harus melihat kebutuhan konstituen, rakyat, dan bangsa.

Maka tidak mengherankan bila terjadi tirani parpol yang berakibat mandegnya proses kaderisasi parpol. Sehingga dapat dikatakan regenerasi bangsa saat ini tidak ada perubahan yang signifikan bagi perubahan bangsa ke depan.

Wacana tentang munculnya kaum muda untuk menjadi Presiden, seperti hanya sebatas wacana tanpa sebuah gerakan sistematis. Parahnya beberapa oknum politisi muda pun malah terjerat kasus-kasus korupsi, sehingga merusak citra kaum muda. Ke depan kaum muda juga tidak boleh memaksa dan mendesak kaum tua

untuk legowo tanpa ia sendiri dapat menampilkan diri yang lebih elegan dan memerankan diri sebagai pemimpin yang transformatif seperti terurai di atas.

Semoga di tengah hingar-bingarnya demokrasi kita hari ini, tetap terlahir pemimpin bangsa yang dapat segera membawa bangsa ini ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, adil, makmur, aman sentosa di bawah lindungan dan ridho Illahi Robbi. Aamiin.[]



[sumber: <http://berita.upi.edu/files/2012/01/Uwie.jpg>]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Dame Ria Munthe

Karo Ren Kum Peg dan Humas Lembaga Sandi Negara RI
Peserta PPRA XLIX

Pemimpin Bukan Superman

Dalam Survei LSI pada Juni 2011 disebutkan bahwa jaminan mendapat hidup layak di Indonesia belum dapat terwujud. Saat ini, masalah sosial yang menduduki skala prioritas untuk diselesaikan yaitu adalah tingginya tingkat pengangguran serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan,” kata Dame Ria Munthe salah satu peserta PPRA XLIX Lemhannas RI.

Menurutnya, setiap calon pemimpin nasional tentunya harus waspada dan mampu mengenali kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. “Ia yang mampu memahami dengan baik serta mampu memberikan solusi dan alternatif pemecahannya maka layak ditokohkan sebagai pemimpin nasional,” kata perempuan yang bekerja sebagai Karo Ren Kum Peg dan Humas Lemsaneg RI.

Dame Ria berpendapat bahwa yang layak disebut sebagai pemimpin nasional yaitu mereka yang mampu

membawa rakyat Indonesia dalam kehidupan yang adil, sejahtera, dalam lingkungan hidup yang harmonis, serta mampu mengatasi semua permasalahan bangsanya. “Namun demikian, pemimpin bukan superman. Walaupun sulit mencari sosok pemimpin nasional yang ideal, bukan berarti sudah tidak ada lagi warga negara Indonesia yang pantas ditokohkan sebagai pemimpin nasional,” kata Dame Ria.

“Setiap masa, tempat dan bidang masing-masing mempunyai tokohnya sendiri-sendiri. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menyatu dalam Pancasila harus menjadi ukuran/kriteria untuk menentukan pemimpin nasional, antara lain harus visioner dan memiliki visi bersama, memahami nilai-nilai kebangsaan dan jati diri bangsa, serta memiliki integritas moral yang tinggi,” tutur Dame Ria Munthe. □



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Arya Rezavidi

Kapus Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan BPPT RI
Peserta PPRA XLIX

Kepemimpinan **Tanggung**

Kepemimpinan Nasional Indonesia, selalu dikaitkan dengan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Sultan Agung, Soekarno-Hatta, Soeharto, karena mempunyai kualitas kepemimpinan tangguh, bermoral, visioner serta seorang negarawan yang kharismatik dan *transformatif*.

“Keseriusan sebuah negara untuk menyiapkan kadernya tidak lepas dari visi para pemimpin tentang masa depan yang diinginkan untuk negaranya,” kata Arya Rezavidi yang saat ini menjadi peserta PPRA XLIX Lemhannas RI. Ia melihat, keberhasilan sebuah negara untuk menjadi besar bila memiliki program pembangunan jangka panjang, dan secara bersamaan menyiapkan kader-kader yang akan meneruskan program jangka panjang tersebut secara berkelanjutan.

“Syarat mutlak yang wajib dimiliki pemimpin nasional kita adalah memiliki visi pembangunan jangka panjang di bidang iptek serta berupaya membuat program untuk memperkuat konsep Wawasan Nusantara,” Arya melanjutkan.

Program jangka panjang seorang pemimpin nasional harus berwawasan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Arya melihat, Kekayaan sumber daya alam bukanlah satu-satunya penentuan kemajuan suatu negara. “Banyak negara maju namun minim sumber daya alamnya namun menguasai teknologi, mampu menjadi negara modern dan makmur. Kalau negara kita mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka niscaya kita juga akan menjadi negara adidaya dan mampu mengalahkan negara Jepang atau Singapura yang minim sumber daya alamnya,” tutur Arya dengan optimis.

Selain itu, menurut Arya, persoalan yang penting untuk diselesaikan adalah ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa serta, antara Indonesia bagian Barat dan bagian Timur. “Program jangka panjang untuk pembangunan di luar Jawa harus segera dimulai dari sekarang,” kata Arya. Dengan tumbuhnya perekonomian di luar Jawa, maka akan terjadi perpindahan penduduk secara sistematis ke luar Jawa dan ini secara signifikan akan mengurangi beban kependudukan di Jawa. Keseimbangan populasi ini akan memberi nilai positif bagi keutuhan NKRI dan akan makin memperkuat konsep Wawasan Nusantara. □



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Muhammad Badaruddin

Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie

Efisiensi Proses Politik

Kepemimpinan Indonesia saat ini cenderung mengakomodasi kepentingan politik, seringkali mereka tidak fokus pada visi yang harusnya dicapai yaitu untuk membawa negara pada cita-cita bangsa," tutur Muhammad Badaruddin, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie yang kini menjadi peserta PPRA XLIX Lemhannas RI. Menurut pria yang menjadi anggota Kopertis Wilayah III/Jakarta tersebut, tidak fokusnya kepemimpinan nasional saat ini disebabkan karena proses demokrasi liberal yang ada sekarang, dimana tiap pemimpin politik selalu berakomodasi bahkan melakukan konsultasi mendapat persetujuan dari berbagai macam pihak.

"Tugas ke depan adalah bagaimana mengefisienkan proses politik juga dalam aspek waktu, agar apa yang dilakukan dapat fokus dan mampu menghasilkan rumusan kebijakan politik, bukan sekadar akomodasi politik atau 'politik dagang sapi', untuk itu bangsa ini membutuhkan tiga kriteria pemimpin nasional, yaitu visi yang kuat dalam menerjemahkan cita-cita bangsa, integritas tinggi yang mendorong berkepribadian yang kokoh, serta *public acceptance*."

Menurutnya, seorang pemimpin harus memahami kondisi strategis Indonesia yang terjadi dalam konteks

global. "Dalam sistem pendidikan, Lemhannas banyak membahas mengenai geopolitik. Tidak cukup itu saja, saya kira saat ini kita juga harus bicara dalam aspek geoekonomi, lalu peran dari aktor non-negara, pembahasan kejahatan trans-nasional, juga pengaruh tokoh publik global," Badaruddin mengungkapkan.

"Saat ini banyak calon pemimpin dan pemimpin instan, tidak diketahui rekam jejaknya tiba-tiba maju dalam kancah pemimpin nasional, padahal kita tidak pernah melihat rekam jejaknya selama sepuluh atau dua puluh tahun terakhir," tutur Badaruddin. Ia melihat besarnya peran media dalam mengorbitkan pemimpin nasional, beberapa yang dianggap populer hanya karena menguasai media informasi atau mampu membeli *space* iklan. Seorang pemimpin harus memiliki rekam jejak yang jelas, ia harus diterima oleh berbagai macam kekuatan politik, ekonomi, dan kelompok kepentingan. Aksetabilitas tersebut kemudian akan membawa pada elektabilitas, dimana penerimaan rakyat merupakan syarat utama calon pemimpin nasional. "Lebih jauh lagi, kita harus mendidik rakyat untuk mampu menyeleksi, mengenali, kemudian memilih calon pemimpin yang betul-betul tepat," kata Muhammad Badaruddin. □



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Kolonel Inf. Iwan Barley

Kasubdit Matra Darat Ditkomcad Ditjen Pothan Kemhan RI

Kepemimpinan Dulu dan Sekarang

Setiap pemimpin punya pengalaman, masalah dan sejarahnya masing-masing, baik itu pengalaman dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat merubah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan menghadapi ancaman ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti memiliki pandangan yang sama untuk ingin merdeka, ingin mengembangkan ideologi yang diyakini kebenarannya atas keputusan dan kebutuhan bersama.

Seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri, harus mempunyai tim kerja yang baik dan yang memiliki kompetensi yang tinggi, serta memiliki komunikasi atau diplomasi yang bagus. Perbedaan yang sangat mendasar kepemimpinan yang terdahulu dengan saat ini adalah tuntutan kebutuhan kehidupan si pemimpin sangat berbeda termasuk pula yang dipimpin. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan arti rela berkorban, bekerja tanpa pamrih, prioritas kepentingan, pemanfaatan waktu dan prioritas cita-cita dan tujuan. Situasi dan kondisi ini merupakan tanggungjawab negara terhadap bangsanya, agar bangsanya tetap dapat mencapai cita-cita dan tujuan bersama.

Kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang kepala negara pada tingkat pusat dan kepala daerah pada tingkat daerah, harus memihak pada kepentingan rakyat untuk semua keputusan atau peraturan-peraturan yang dibuat agar dapat mempercepat pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Secara spesifik kepemimpinan yang dibutuhkan oleh bangsa ini pada era globalisasi adalah seorang pemimpin yang negarawan (memiliki sifat, tutur kata dan perilaku negarawan). Memiliki ketakwaan yang tinggi dan tercemrin dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan arif dan bijaksana, berani mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara, memiliki Wawasan Nusantara. Sehingga prioritas pembangunan nasional dapat terwujud dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Selain itu, pemimpin juga harus mampu untuk memilih dan menentukan orang-orang sesuai kompetensinya, setia dan mempunyai loyalitas tinggi untuk membantu dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan negara. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan diplomasi yang tinggi serta didukung para diplomasi yang baik, memiliki kharisma sehingga dihormati dan disegani.□



[sumber: <http://www.dyn.politico.com>]

Polemik Isu Permukiman Yahudi

Dalam kunjungan empat harinya ke Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung ke Israel dan Palestina, dua negara yang hingga kini tengah berkonflik. Dalam kesempatan tersebut, Obama memiliki peran yang penting dalam menentukan sikap AS dalam polemik permukiman Yahudi antara Palestina dan Israel.

Dalam pernyataan Barack Obama usai saat jumpa pers usai bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah Tepi Barat, menunjukkan dukungannya terhadap terbentuknya negara Palestina merdeka (21/3). "Rakyat Palestina layak mendapatkan negaranya sendiri. Amerika Serikat sangat berkomitmen untuk melihat sebuah negara Palestina yang independen dan berdaulat," ujar Obama dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat.

Meski demikian, seperti yang

dilansir oleh Kompas, keduanya terlihat berbeda pendapat dalam isu permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Israel. Di hadapan media, mereka juga tidak menjelaskan mengenai nasib perundingan damai antara Israel – Palestina yang terhenti sejak 2010.

"Rakyat Palestina hanya ingin meraih hak-hak minimalnya dalam wujud berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Jerusalem timur," kata Mahmoud Abbas usai melangsungkan pertemuan dengan Obama. Sejak saat itu, Israel terus membangun puluhan permukiman Yahudi di Tepi Barat



[sumber: <http://www.pesatnews.com>]

dan Jerusalem Timur yang kini didiami sekitar 560.000 warga Israel. Jumlah ini meningkat 60.000 orang sejak Obama menjadi Presiden Amerika Serikat empat tahun lalu.

Presiden Abbas menyampaikan kepada Obama bahwa Palestina tidak bisa membicarakan masalah perbatasan dan masa depan negara ini selama Israel menciptakan sendiri garis perbatasannya dengan terus membangun permukiman Yahudi.

Di sisi lain, dalam kunjungan Obama ke Israel sehari sebelumnya, ia mendapat sambutan skeptis, baik dari pihak Palestina maupun warga Israel (20/3). Mengutip laporan *Voice of America*, sebagian warga

Israel menyangsikan komitmen pemerintahan Obama terhadap Israel, karena Presiden Obama terus menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Sementara itu, Menteri Perumahan Israel Urie Ariel mengatakan bahwa pemerintahan baru Israel di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu akan terus memperluas permukiman Yahudi sama seperti halnya pemerintahan sebelumnya, seperti dilansir Aljazeera.net (18/3). Dalam sebuah wawancara dengan Stasiun Televisi 10, Ariel menegaskan bahwa permukiman di tanah-tanah pendudukan akan

Menteri Perumahan Israel Urie Ariel mengatakan bahwa pemerintahan baru Israel dibawah pimpinan Benjamin Netanyahu akan terus memperluas permukiman Yahudi sama seperti halnya pemerintahan sebelumnya,

terus dibangun sesuai dengan kebijakan politik pemerintah hingga saat ini (17/3). Menyikapi hal tersebut, Obama berpendapat bahwa terus berlangsungnya pembangunan permukiman Yahudi itu tidak menolong upaya mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina hanya akan menggagalkan opsi solusi dua negara Israel dan Palestina.

Obama, yang berbicara setelah Abbas, menegaskan komitmen AS mendukung berdirinya negara Palestina yang berdaulat dalam konteks solusi dua negara. Namun, masalah pembangunan permukiman Yahudi tidak bisa diselesaikan secara spontan. "Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan berusaha keras menjembatani perbedaan antara Israel dan Palestina itu," Obama menambahkan.

Presiden AS juga meminta Israel dan Palestina sama-sama bersedia memberi konsesi. Menurut Obama, jika kedua pihak segera kembali ke meja perundingan, jalan menuju kesepakatan sangat terbuka.



Wacana Pembentukan Pengadilan HAM

Sejak tahun 2009, dalam Rapat Paripurna DPR telah mengeluarkan amanat pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan ini diharapkan dapat mengusut tragedi penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis di tahun 1997-1998.

Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara paksa yang diketuai oleh Effendi Simbolon periode 1997-1998 merekomendasikan empat hal kepada Presiden, yakni rekomendasi kepada Presiden untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang, rehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.

Meski langkah Pembentukan Pengadilan HAM pada 2013 ini jauh diambil dari tahun 2009 setelah diputuskan dari DPR, Indra Anggota Komisi II DPR menilai langkah ini perlu diambil sebagai jawaban dan ketidakpastian para korban (21/3). "Secara prinsip peradilan HAM itu harus disegerakan, karena banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Saya mendukung peradilan HAM, cuma saya menyesalkan kenapa baru sekarang," kata Indra. Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto berpendapat masih ada celah untuk membentuk peradilan HAM Adhoc. Untuk itu diperlukan revisi Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Djoko menilai sampai saat ini masih terjadi kebuntuan soal syarat pembentukan peradilan HAM. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM tidak mencantumkan nama terduga pelaku pelanggaran HAM. "Pembentukan peradilan HAM oleh Komnas HAM, harus melakukan penyelidikan sampai siapa yang menjadi terperiiksa. Pasalnya 'barang siapa', bukan institusi," jelas Djoko di Istana Negara Jakarta, Kamis (21/3).

Djoko berpendapat, saat ini wewenang peradilan HAM ada di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. "Jaksa Agung belum melihat terperiiksa dan tersangkanya siapa. Sementara sampai saat ini prosesnya belum sampai kepada penyidikan. Sebab penyelidikan belum sampai menemukan terduga pelaku," kata Djoko.

S e p e r t i yang di-lansir dari

BBC Indonesia, Pemerintah dan DPR sepakat menunggu proses penyelidikan Komnas HAM untuk menindak-lanjuti rekomendasi panitia khusus peristiwa penghilangan orang secara paksa kepada Presiden dalam membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Rekomendasi DPR itu harus didasari oleh undang-undang yang berlaku dan undang-undang tentang HAM itu mensyaratkan bahwa yang melakukan penyelidikan itu adalah Komnas HAM. Penyelidikan harus sampai pada tahap siapa yang menjadi tersangka, siapa yang harus diselidiki, korbannya siapa dan di mana," kata Djoko Suyanto kepada sejumlah wartawan usai rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan DPR.



pada akhirnya para peserta pelatihan akan memiliki daya pikat pribadi dalam memengaruhi, menginspirasi dan memotivasi peserta didiknya dalam menciptakan dan menjalani perubahan ke arah yang lebih baik.

Disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI Budi Susilo Soepandji, dalam sambutan pembukaan pelatihan metode pengajaran (*sharing session program effective learning methods*) tersebut pada Rabu, 13 Maret 2013 di Lemhannas RI, bahwa materi yang bagus dan lengkap dengan gagasan-gagasan yang baik belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tenaga pengajar atau fasilitator yang hebat dan sukses bila semuanya itu belum disinergikan dengan pemahaman yang benar mengenai kebutuhan peserta didik dan kesanggupan untuk mendampingi mereka dalam proses belajar secara aktif.

Pelatihan metode pengajaran yang diselenggarakan Lemhannas RI tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu awal, isi (pengolahan) dan akhir. Bagian awal merupakan tahap pengenalan untuk membantu peserta pelatihan agar tidak merasa terasing sekaligus juga merupakan *ice breaking* bagi peserta yang sudah saling mengenal. Sedangkan bagian tengah merupakan metode pengolahan kegiatan pelatihan yang berisikan sesi-sesi materi, antara lain sesi informatif, partisipatif, partisipatif-eksperiensial dan eksperiensial. Bagian akhir merupakan metode penyimpulan kegiatan pelatihan dan evaluasi. Pada tahap akhir ini, semua sesi dalam pelatihan telah diolah bersama sedemikian rupa, dan semua kemungkinan tindak lanjut (*follow-up*) serta harapan peserta telah dibicarakan untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi.

Dalam pelatihan tersebut dibahas antara lain tentang cara membawakan peran sebagai fasilitator dengan sepenuh hati (totalitas) yang disampaikan oleh

pakar komunikasi Dr. Leila Mona G. Materi tentang jenis metode belajar dan praktik metode pembelajaran diberikan oleh pakar *living values* Waruwu yang juga menyampaikan presentasi tentang Keterampilan Presentasi yang Berdampak Besar dengan Menggunakan Teknologi. Selain itu, Teknik melakukan *Training Need Analysis* (TNA) juga dibahas oleh Silverius Sonny Y. Soeharso dan Maharani Ardi Putri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh F. Waruwu, membangun kepercayaan (*trust*) adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kerja sama dengan peserta didik. "Dengan *trust*, peserta didik makin merasa yakin dan senang sehingga mereka akan berpartisipasi dan memetik manfaatnya, sehingga pada akhirnya mereka akan berniat untuk menindaklanjutinya", ungkapnya.

Selain itu, kunci sukses untuk belajar yang bernilai menurutnya adalah bahwa kita harus memahami kekuatan diri sendiri, memahami peserta didik dan kebutuhan mereka, menguasai materi dan teknik penyampaian yang holistik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengajar dengan badan sehat dan hati tulus. Sedangkan menurut Dr. Leila Mona G, mengajar dengan hati berarti kita harus mengoptimalkan seluruh potensi agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pengoptimalan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan nonverbal. Sementara itu, penggunaan teknologi secara optimal guna menghasilkan presentasi efektif yang berdampak dahsyat bagi peserta didik merupakan faktor teknis yang diangkat dalam sesi F. Waruwu.

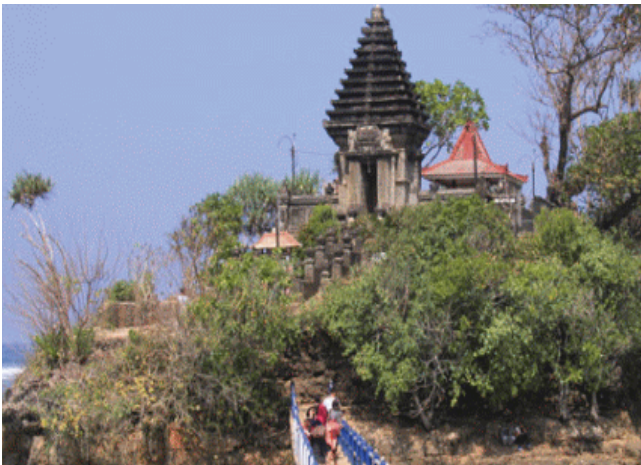
Dengan demikian, selain sebagai penyegaran (*refreshment*) tentang prinsip-prinsip belajar pada orang dewasa dan tentang pentingnya peran mengajar dengan sepenuh hati, pelatihan tersebut juga menjadi sarana tukar-menukar pengalaman,

pengetahuan dan keterampilan antara para peserta sehingga pada akhirnya dapat tercipta visi dan persepsi yang sama dalam hal mekanisme penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang lebih baik bagi peserta didik di masa mendatang.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, para peserta pelatihan dalam jangka pendek diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengaplikasikan metode belajar yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga berdampak pada perubahan perilaku peserta didik dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dalam rangka membangun karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan atau pun empat konsensus nasional.

Dengan pelatihan metode pengajaran ini, diharapkan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam proses penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, baik yang diselenggarakan di Lemhannas RI, maupun di daerah-daerah dengan sasaran yang telah diprogramkan. Penyelenggaraan tersebut diharapkan akan mengurangi gap (kesenjangan) antara kenyataan saat ini dengan standar kompetensi yang diharapkan serta mengurangi kesenjangan antara target pribadi dengan target lembaga.

Sebagai tenaga pengajar atau pun sebagai fasilitator, para peserta pelatihan memainkan peran yang sangat penting. Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Lemhannas RI, di masa mendatang Lemhannas RI akan membentuk empat tim fasilitator pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang nantinya anggotanya akan terdiri dari unsur operasional dan unsur tenaga pengajar. Terkait dengan itu, nantinya para peserta pelatihan metode pengajaran ini akan menjadi bagian dari tim yang direncanakan.^[TN]

Pura Amerta [Foto: <http://3.bp.blogspot.com>]

Keindahan Tanah Lot di Malang

Ada sebuah pemandangan yang mengingatkan kita di Bali, Sebuah batu raksasa di tepian pantai dengan bangunan Pura Hindu yang menghadap samudera luas. Namun siapa sangka, pemandangan ini terdapat di Pulau Jawa, tepatnya di Pantai Balekambang yang berada di Desa Srigoco, Kecamatan Bantur, 70 kilometer arah selatan Kota Malang, dan ini menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Balekambang di sebelah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pantai Balekambang ditandai dengan tiga pulau batu yang dinamai sesuai karakter pewayangan, yaitu Pulau Anoman, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Ismaya. Pulau Wisanggeni terhubung ke Pantai dan Pulau Ismaya oleh jembatan beton sepanjang 100 meter. Di Pulau Ismaya inilah berdiri sebuah pura bernama Pura Amerta Jati atau juga dikenal sebagai Pura Ismaya. Pura ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pura-pura Hindu di Bali. Keindahannya semakin terlihat saat matahari terbenam.

Pura Amerta Jati atau Pura Ismaya ini dibangun tahun 1985 atas prakarsa Bupati Malang Edi Slamet. Didesain mengikuti Pura Tanah Lot yang terkenal di Bali, Pura ini juga merupakan tempat suci bagi umat Hindu dan sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan. Saat hari-hari besar umat Hindu, pura ini akan terasa sangat ramai.

Letak pantai ini memang dapat dikatakan terpencil. Walaupun begitu, Pantai Balekambang memiliki semua fasilitas yang diperlukan wisatawan, mulai dari warung makanan, restoran, penjaga pantai, toko souvenir, toilet umum, hingga penginapan sederhana. Pantai ini memang layak dikunjungi. Bentang pantai berpasir putih sepanjang dua kilometer berpadu dengan ombak yang menggulung.□

[Foto: http://www.beritaunik.net/wp-content/uploads/2013/02/ban_pesawat2.jpg]

Alasan Kenapa Ban Pesawat Kecil

Ban pesawat terbang dirancang secara khusus untuk mampu menahan beban yang berat, memberikan rasa nyaman pada penumpang, dan bertahan ketika pesawat bergerak di landasan dengan kecepatan yang cukup tinggi.

Sebenarnya, ukuran ban pesawat terbang hampir sama dengan ukuran ban mobil. Memang ukuran ini tampak kecil bila dibandingkan dengan ukuran pesawat. Mengapa dipilih ban kecil, sebab ban dengan ukuran yang terlalu besar menyulitkan ban tersebut menahan torsi berat pesawat.

Ban pesawat bukan ban yang padat. Di dalamnya ada gas/udara dengan tekanan yang cukup besar, sekitar enam kali lebih besar dari tekanan ban mobil penumpang. Tekanan sebesar ini dibutuhkan untuk menahan berat pesawat yang besar. Kelenturan atau *deflection* (perbedaan tinggi ban sebelum dan sesudah dipasang) ban pesawat sekitar 2-3 kali lebih besar dari ban mobil.

Kelenturan yang tinggi ini membuat penumpang pesawat lebih nyaman ketika pesawat hendak mendarat. Ban pesawat juga diharapkan mampu bertahan ketika pesawat bergerak dengan kecepatan sekitar 340 km/jam atau sekitar dua kali kecepatan maksimum mobil. Jadi, jangan lihat kecilnya, tapi lihat kemampuannya.□



Tahun Kerjasama Air Internasional

Pada bulan Desember 2010, Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/65/154 telah mendeklarasikan tahun 2013 sebagai Tahun Kerja sama Air Internasional. Sehubungan dengan deklarasi itu, maka pada peringatan Hari Air Sedunia 2013 (22 Maret 2013) akan didedikasikan untuk kerjasama air internasional.

Tujuan dari Tahun Kerjasama Air Internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, baik pada potensi untuk meningkatkan kerjasama, dan tantangan yang dihadapi pengelolaan air semakin terang dari peningkatan permintaan untuk akses air, alokasi dan jasa. Tahun 2013 akan menyoroti sejarah inisiatif kerjasama air yang sukses, serta mengidentifikasi isu-isu tentang semangat pendidikan air, diplomasi air, pengelolaan air lintas batas, kerjasama pembiayaan, nasional / kerangka kerja hukum internasional, dan hubungan dengan Tujuan Pembangunan Milenium.

Hari Air Dunia sendiri digelar setiap tanggal 22 Maret, sebagai wadah untuk menyatukan fokus perhatian dunia kepada peran penting tersedianya air bersih dan mengupayakan tata kelola sumber daya air segar yang berkelanjutan. 22 Maret dipilih sebagai satu hari dari satu tahun untuk merayakan ketersediaan air segar, sebagaimana direkomendasikan oleh Konverensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED).^[1]



“Filateli” Koleksi Berharga Sepanjang Masa

Filateli merupakan sebuah kegemaran (hobby) mengoleksi ataupun mengumpulkan benda-benda pos seperti perangko, sampul surat, kartu pos, ataupun benda pos lainnya. Desain yang unik dan beragam dari benda pos tersebutlah yang membuat para filatelis gemar mengumpulkan dan menyimpan benda-benda pos tersebut menjadi bagian dari koleksi mereka. Namun tahukah anda, jika filateli tersebut bisa menjadi koleksi berharga sepanjang masa?

Hal itu seperti yang tertulis dalam Museum Mini Soekarno di Blitar Jawa Timur. Di dalam salah satu bagian museum mini tersebut juga terdapat koleksi filateli yang berkenaan dengan mantan presiden RI pertama tersebut. Selain menjadi koleksi berharga sepanjang masa, filateli juga bisa membuka cakrawala pengetahuan dan investasi.

Selain membuka cakrawala pengetahuan, filateli juga bisa menjadi investasi. Perangko yang unik dan langka bisa menjadi incaran para filatelis dan akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Misalnya untuk seri perangko pertama dan sebagainya.

Dan tahukah anda, ternyata Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga Rp.20 miliar yang dicetak sejak Hindia Belanda dan jadi incaran para kolektor. Perangko kuno era Hindia Belanda bernilai Rp 20 miliar karena sangat langka. Perangko tersebut bergambar Raja Willem III asal Belanda ini dirilis pada 1 April 1864 dengan harga 10 sen.^[1]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Marsekal Muda TNI Syahrul Anshory
Deputi Pendidikan Lemhannas RI

Penyiapan Kader Pimpinan Tingkat Nasional

Dalam konteks pendidikan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia disingkat Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematangan pimpinan tingkat nasional yang berfikir integrative dan professional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal (Perpres RI Nomor 67 tahun 2006 tentang Lemhannas RI). Untuk menghadapi dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis (nasional, regional, global) saat ini dan kedepan, pada tahun 2013 Lemhannas RI telah melakukan penajaman tugas tersebut

diatas menjadi: mempersiapkan para kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan/wawasan strategis serta trampil dalam memecahan masalah-masalah strategis lingkup nasional, regional dan global. Karena itu kurikulum dan komponen pendidikan lainnya di Lemhannas RI terus dibenahi, ditumbuhkembangkan sesuai dengan tuntutan zaman kearah terlaksananya tugas Lemhannas RI dan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal sebagaimana amanat rakyat melalui Perpres RI tersebut diatas.

Lalu seperti apa/bagaimana karakter pimpinan tingkat nasional yang diharapkan dalam tujuan

pendidikan di Lemhannas RI? Banyak teori tentang kepemimpinan dan banyak contoh kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh negarawan, pemimpin didunia pada zamannya, demikian juga di Indonesia, banyak pahlawan nasional sebagai seorang pemimpin yang kita kenal, kita hormati, dan kita banggakan, bahkan pada zaman Rasul, Nabi-Nabi contoh contoh itu sudah menjadi teladan dan pedoman hidup oleh sekelompok besar manusia di dunia sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman.

Berdasarkan berbagai teori kepemimpinan dan karakter para pemimpin yang telah dipraktikannya pada zamannya, peserta Program

Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLII Tahun 2008 telah melaksanakan seminar nasional dengan judul “Peningkatan Kualitas Sistem Kepemimpinan Nasional Guna Mendukung Penyelenggaraan Negara Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Nasional”.

Salah satu wujud konkret dari hasil seminar tersebut adalah rekomendasi rumusan tentang Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) atau *Indonesian National Leadership Index (INLI)*. Dari berbagai literature tentang “Pemimpin” dan “Kepemimpinan” yang pernah saya pelajari, saya berpendapat dan meyakini bahwa IKNI merupakan suatu “model” ideal yang komprehensif yang dapat dijadikan standar/acuan bagi Lemhannas RI dalam mempersiapkan para kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional saat ini dan dimasa yang akan datang. Mengacu kepada konsep IKNI, maka karakter pemimpin dimasa datang diharapkan merupakan perpaduan antara karakter seorang manajer, pemimpin, negarawan (*Manager, Leader, and Statesman*) dan memiliki “*wisdom of a statesman, quality of a commander, courage of a hero, and endurance of a martyr*”. Indeks Kepemimpinan Nasional di suatu negara, disamping kemungkinan mengandung persamaan persepsi dan parameter dengan indeks semacam dari negara lain karena proses globalisasi, juga selalu mengandung karakter yang berbeda-beda di masing-masing negara. Hal tersebut disebabkan secara spesifik diantara negara-negara terdapat perbedaan falsafah, ideologi, sistem politik, sejarah, religi, letak geografis, kondisi sosial budaya dan sebagainya yang disebut sebagai aspek partikularistik dalam kerangka

apa yang dinamakan “*geoleadership*” (*culturally relevant leadership*). Kembali menurut IKNI, moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan nasional Indonesia, nilai-nilai atau parameternya dapat diperinci menjadi 4 (empat) kategori yaitu: Pertama. Indeks moralitas dan akuntabilitas individual; Kedua. Indeks moralitas dan akuntabilitas sosial; Ketiga. Indeks moralitas dan akuntabilitas institusional; dan Keempat, Indeks moralitas dan akuntabilitas global. {dipetik dari IKNI. Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (konsep & implementasi) Lemhannas RI 2009, halaman 15, 19 s/d 26}.

Mengacu kepada nilai-nilai atau parameter indeks kepemimpinan nasional tersebut diatas, saya berpendapat bahwa nilai-nilai atau parameter yang bersifat universal sama dengan negara lain, yang membedakan pimpinan nasional Indonesia dengan pimpinan nasional negara lain adalah terletak pada pemahaman nilai-nilai dasar tentang komitmen bangsa-bangsa di nusantara yang mengkrystal ingin bersatu karena perasaan, harapan dan cita-cita yang sama seperti yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apa nilai-nilai dasar yang harus dipahami oleh setiap pimpinan nasional Indonesia pada setiap tingkatan?

Sungguh kita harus bersyukur bahwa para pendahulu bangsa kita (*founding fathers*) sangat visioner, pemikiran mereka tentang masa depan negara kita jauh melampaui masa mereka sendiri. Pendahulu kita telah menyusun komitmen yang menjadi nilai-nilai dasar yang sangat funda-

mental bagi negara bangsa ini, struktur kata-katanya, kalimatnya bahkan paragrafnya sangat kuat dan visioner hingga menjadi perekat untuk menjadi bangsa yang tangguh bila benar-benar dipedomani oleh seluruh anak bangsa ini terutama para penentu kebijakan yang disebut sebagai para pimpinan nasional. Karena itu nilai-nilai dasar tersebut harus benar-benar dipahami, untuk dijadikan pedoman oleh para pimpinan nasional Indonesia dalam mencapai cita-cita bersama anak bangsa ini. Nilai-nilai dasar tersebut adalah intisari dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Pertama. Pimpinan nasional Indonesia pada seluruh strata apapun profesi dan bidang pengabdianya harus paham betul bahwa nilai-nilai dasar nasionalisme Indonesia itu terbentuk dari ratusan etnis dan budaya, kemudian menjadi bangsa Indonesia (*multi ethnic + multi culture to be nation*). Proses (sejarah) menjadi bangsa itu dimulai dari pergerakan Boedi Oetomo 1908, sumpah Pemoeda 1928 dan puncaknya proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 secara *de-facto dan de-jure* Negara Bangsa Republik Indonesia ini terbentuk. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Hal itu penting dipahami karena proses (sejarah) pembentukan negara bangsa ini adalah merupakan pengorbanan kerajaan-kerajaan tradisional, kesultanan-kesultanan, yang merupakan “negara”, kelompok-kelompok masyarakat etnis tradisional lainnya diseluruh wilayah nusantara waktu itu. Bukan hanya peleburan kerajaan, kesultanan tradisional,



pelepasan atas hak tanah ulayat, penanggalan gelar dengan segala kehormatannya, pengorbanan harta, benda bahkan jiwa raga demi menyatukan diri menjadi bangsa Indonesia. Karena itu keragaman etnis dan budaya serta bahasa harus dipahami dan dikelola dengan baik oleh setiap pimpinan tingkat nasional.

Kedua. Pada paragraf pertama pembukaan UUD 1945, diungkapkan nilai-nilai/pemahaman dasar bangsa Indonesia tentang kemerdekaan/anti penjajahan, kemerdekaan, kemanusiaan dan keadilan harus ditegakkan dimuka bumi ini. Pemahaman bangsa Indonesia itu bahkan lebih tua dari Deklarasi HAM PBB.

Pada paragraf kedua, nilai dasar yang harus dipahami adalah cita-cita/visi bangsa yaitu Negara Indonesia, yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur**.

Pada paragraf ketiga, nilai dasar yang harus dipahami adalah bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia itu adalah atas dasar keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Pada paragraf Keempat, nilai-nilai dasar yang harus dipahami adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. **Itulah tujuan dari pembentukan Pemerintah Negara, itulah tugas dari Pemerintah Negara, itulah sebenarnya kepentingan nasional yang harus diperjuangkan**

kan, dipertahankan dan diamankan dalam rangka mencapai cita-cita/visi bangsa Indonesia..(perhatikan tiga strata kepentingan nasional Indonesia dalam Perpres RI nomor 41 tahun 2010 tentang Jakumhaneg 2010-2014).

Selanjutnya Syahrul Ansory mengatakan, pemimpin nasional harus paham bahwa Pemerintah negara itu terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945. Karena itulah pemimpin nasional harus paham betul bahwa pemerintah negara dalam menjalankan tugasnya yang merupakan amanat kedaulatan rakyat untuk mencapai cita-cita/visi negara harus berdasarkan dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945. Karena itulah walaupun Pancasila itu merupakan ideologi terbuka dan

pasal-pasal dalam UUD 1945 dapat diubah, akan tetapi konsensus dasar bangsa Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah, bersifat tetap karena merupakan kesepakatan dasar/konsensus dasar bangsa Indonesia. Karena itu tidaklah tepat kalau ada yang mengatakan bahwa kita, bangsa Indonesia ini mungkin perlu mencari atau membuat konsensus dasar yang baru.

Saya berpendapat bahwa yang perlu diperbaiki oleh para pimpinan nasional dan oleh kita semua adalah “cara-cara yang baik dan benar” untuk mencapai cita-cita/visi bangsa ini berdasarkan konsensus dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945

Oleh karena itu penyiapan pemimpin-pemimpin tingkat nasional tidak boleh lepas dari nilai-nilai dasar NKRI yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Syahrul Ansory juga menjelaskan bahwa cara yang terbaik untuk mempersiapkan pimpinan nasional yaitu harus sedini mungkin, melalui kurikulum pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang sistematis dan massif khususnya dalam sub system/aspek pembentukan karakter bangsa, berlaku diseluruh Indonesia, namun harus disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi social budaya dan kemampuan lokal dst, jangan disamakan anak muda di Jakarta dengan anak muda di daerah, karena mereka memiliki kemudahan dan akses kesehatan dan pendidikan yang berbeda sejak balita. Dipaparkan pula oleh Syahrul Ansory walaupun dalam UU-RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 (tujuan pendidikan nasional) tidak tersurat kata-kata “memper-

siapkan anak bangsa **sejak dini** agar mereka memiliki tanggung jawab terhadap dirinya pribadi (tanggung jawab individu), tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga orang tuanya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dilingkungannya, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya”, saya berpendapat akan lebih baik kalau tersurat dalam pasal itu, maka pembentukan karakter bangsa (nasionalisme) dapat kita tuangkan dalam kurikulum pendidikan nasional secara bertingkat dari strata TK/SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Kalau saja pembentukan pendidikan karakter bangsa (nasionalisme) seperti yang saya jelaskan masuk dalam kurikulum Sisdiknas, saya pikir dan saya yakin masalah-masalah sosial yang kita hadapi tidak separah sekarang dan disisi lain akan lahir banyak sekali kader kader pimpinan nasional yang berkarakter Indonesia, dan sebagian besar anak bangsa ini setidaknya akan menjadi pemimpin atas dirinya sendiri sebagai warga negara Indonesia dalam tatanan negara demokrasi dengan karakter Indonesia-nya. Indonesia adalah Indonesia dengan segala nilai dasar dan karakternya, ideologi kita terbuka selama nilai-nilai asing itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ditambahkan oleh Syahrul Ansory, kalau saja produk Sisdiknas dalam aspek pembentukan karakter bangsa sudah seperti yang diuraikan diatas, saya yakin kontribusinya akan sangat signifikan terhadap ketahanan nasional pada semua aspek.

Ketika ditanya obsesinya, Syahrul Ansory menjawab: yaaa itu dalam kurikulum Sisdiknas ada subsistem

pembentukan karakter bangsa secara sistematis dan massif sesuai strata pendidikan dan yang kedua Lemhannas harus dapat meyakinkan Presiden bahwa pejabat birokrasi Indonesia pada eselon I, II dan pada waktunya nanti eselon III baik TNI, Polri dan PNS harus lulusan PPRA atau PPSA Lemhannas RI, demikian pula jabatan setara diluar kementerian dan Lembaga pemerintah.

Biografi

Marsekal Muda TNI Syahrul Anshory lahir tahun 1957 di Mentok, Pulau Bangka.

Setelah tamat dari AAU 1980, Marsda Syahrul mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan di lingkungan TNI, TNI-AU dan US Airforce. Marsda Syahrul, lulusan PPRA 41 tahun 2008 dengan predikat “Seroja”.

Mendapatkan kepercayaan menduduki berbagai jabatan di lingkungan TNI-AU, TNI, BAIS TNI, Kemenpolhukam, Kemhan RI dan Kemenlu RI, Asisten Atase Pertahanan RI di London Inggris, Atase Pertahanan RI di Singapura dan Atase Pertahanan RI di Australia.

Saat ini Marsda Syahrul Ansory menjabat sebagai Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Bambang Agus Susilo

Bagian Penomoran Surat Keluar dan Pengarsipan Lemhannas

Harapan paling penting, adalah Lemhannas RI menjadi lembaga strategis yang bermanfaat untuk pembangunan karakter, kader pemimpin bangsa yang lebih baik dan lebih berpihak pada rakyat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan atau lembaga banyak faktor pendukung yang membuat lembaga tersebut maju dan menjadi panutan bagi masyarakat atau bahkan bagi lembaga lain. Selain pimpinan atau pejabat tentu ada faktor pendukung kemajuannya, yaitu beberapa diantaranya adalah semangat dan kerja keras para pekerja (karyawan) yang ada dalam lembaga tersebut. Dengan kata lain, pemimpin dan karyawannya bekerjasama, saling mendukung, saling menguatkan

satu sama lainnya demi pencapaian tujuan dan cita-cita.

Bambang Agus Susilo misalnya. Dia bekerja di Lemhannas RI sudah cukup lama. Bambang bekerja pada bagian penomoran surat ke luar dan pengarsipan. Sehari-harinya dia bertugas memberikan nomor surat ke luar seperti surat keputusan, surat rahasia, surat konfidensial dan surat biasa (tidak rahasia), dan jenis surat-surat lainnya sebelum di keluarkan (diedarkan), namun sebelum di keluarkan biasanya surat-surat tersebut terlebih dahulu digandakan untuk kemudian diarsipkan.

"Saya mulai bekerja pada Maret 1987 dengan pendidikan SLTA. Mulai dari gedung lama (bangunan Belanda) sampai dengan sekarang (bangunan modern ala gedung perkotaan).

Banyak pengalaman dan pergaulan yang sudah saya dapatkan selama bekerja di Lemhannas. Terlebih, mulai masuk sampai dengan sekarang, saya masih tetap pada bagian penomoran surat ke luar dan pengarsipan. Bisa jadi itu karena pimpinan masih menginginkan saya untuk tetap bekerja dibagian penomoran surat ke luar dan pengarsipan yang berada dibawah naungan TU Lembaga. Mungkin itu jugalah yang menjadi salah satu alasan kenapa saya tetap dipertahankan," katanya.

Pintu Surat Ke Luar

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, tentu ada suka dan duka yang harus dijalaninya. Kepada wartawan Majalah Swantara, bapak dua anak ini mengaku

pernah merasa bosan dan jenuh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun hal tersebut segera ditepis dari pikirannya, karena dia harus bekerja dengan senang hati, tekun serta bertanggungjawab, karena dirinya adalah satu-satunya pintu untuk surat ke luar dan pengarsipan. Dalam pikirannya, sesulit atau semudah apapun pekerjaan, kalau tidak dijalankan dengan senang hati, tentu segala tugas yang diberikan tidak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dia mengaku, bahwa pekerjaannya menuntut ketelitian dan kehati-hatian dalam menetapkan jenis surat serta nomor-nomorinya.

Sebagai pintu surat ke luar, kepada Bambang diberikan fasilitas motor dinas. Dirinya juga tak jarang harus pulang malam. Kadang-kadang pekerjaan datang di sore hari, biasanya itu terjadi kalau pimpinan menghendaki surat harus jalan sore itu juga, maka penomoran dan pengadministrasian harus dijalankan juga. Pekerjaan tersebut semuanya saya kerjakan dengan senang hati, meski tidak dihitung lembur,” jelasnya.

Pria kelahiran 30 November 1964 ini tinggal di daerah Papan Mas Tambun, Bekasi Timur, setiap harinya berangkat pukul 05.15 WIB pagi, pulang pukul 20.00 WIB atau bahkan pukul 23.00 WIB. Pria paruh baya ini mengaku, kalau dirinya pulang larut malam itu terjadi hanya waktu-waktu tertentu saja, seperti kalau ada pendidikan, atau mendekati tutup buku (akhir tahun). Meski terdengar sederhana, pekerjaan yang ia jalankan sedikitnya juga mempunyai resiko selayaknya pekerjaan lainnya. Selain dituntut ketelitian dan keuletan dalam penomoran dan pengarsipan juga harus menjaga kerahasiaan lembaga.

Dengan kata lain dirinya harus menjunjung tinggi setiap perintah pimpinan, siap kapan saja ketika dibutuhkan. Meskipun demikian, dirinya mempunyai masukan, terutama untuk ruangan atau tempat pengarsipan. “Ruang pengarsipan tempat saya bekerja saat ini masih



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

sangat sempit, sehingga kesannya tidak tertata karena banyaknya kertas yang menggunung,” paparnya.

Meski hari-harinya habis di Lemhannas dan tidak bisa menambah pemasukan dengan memanfaatkan waktu luang untuk bekerja di luar Lemhannas, namun Bambang tetap menyerahkan rezeki pada Tuhan yang Maha Pengasih. Meski tak jarang perekonomiannya kerap gali lobang dan tutup lobang. “Istri sebelum punya anak bekerja di swasta, setelah punya anak menjadi ibu rumah tangga. Pernah berencana untuk buka usaha, seperti usaha buat kue pesanan, namun itu hanya berjalan ketika menjelang lebaran saja. “Kebetulan istri sabar dan menerima apa adanya. Prinsip saya menjalankan pekerjaan dengan baik, yang namanya pelayan harus tahu takaran kerjanya, yaitu mendukung pimpinan, apa perintah pimpinan harus siap kapan saja, meski tengah malam maupun hari libur. Dan saya tetap meyakini, bahwa rezeki sudah diatur yang di atas, sehat saja sudah alhamdulillah,” ungkapnya.

“Dalam melaksanakan tugas, saya bekerja sendiri. Alhasil, mulai

tahun 2000 saya tidak pernah cuti. Tadinya berdua, yang satu sudah pensiun tiga tahun yang lalu. Sehingga tak jarang, kalau saya sakit, harus bekerja lewat telepon untuk mengarahkan penomoran dan pembagian surat. Prinsipnya surat harus tetap jalan. Hal tersebut karena penomoran mempunyai kode tersendiri (tata naskah) sehingga tidak semua orang bisa memahami,” jelasnya.

Harapan saya untuk komunikasi antar satuan kerja harus lebih ditingkatkan. Apabila surat-suratnya harus sangat segera, mohon dikomunikasikan dengan cepat dan baik, agar tidak terjadi salah paham. Untuk Lemhannas RI karena kita orang bawahan kesejahteraan bawahan mohon diperhatikan, karena tidak ada penghasilan tambahan untuk mengasapi dapur. Harapan paling penting, semoga Lemhannas menjadi lembaga strategis yang bermanfaat untuk pembangunan karakter, kader pemimpin bangsa yang lebih baik. Lebih berpihak pada rakyat. [AB]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Kepemimpinan Antara Omar dan Jokowi

H. Mursyid Sonsang

Alumni PPSA XVIII Lemhannas RI
Ketua PWI Cabang Jambi

FILM “Omar” yang ditayangkan oleh sebuah stasiun TV swasta selama Ramadhan tahun lalu, banyak menarik perhatian pemirsa di tanah air. Film tersebut tak hanya menyuguhkan fakta sejarah tentang penyebaran Islam dan sukses penaklukan kezajirah di luar Arab, juga bercerita banyak tentang model kepemimpinan. Film tersebut secara khusus menggambarkan sosok Omar alias Umar bin Khattab, khalifah kedua paska kenabian Muhammad SAW.

Dalam menjalankan amanah sebagai Amirul Mukminin, Omar menempatkan dirinya sebagai pelayan bagi rakyatnya, tidak membedakan agama, suku dan primordial lainnya. Bagaimana Omar menyelesaikan masalah antara seorang kakek Yahudi yang rumahnya tergusur untuk pembangunan masjid di Mesir oleh Gubernur Mesir Amr Bin Ash.

Banyak lagi contoh teladan yang diperlihatkan Omar selama kepemimpinannya. Di antaranya tentang kejujuran, keadilan, kesederhanaan, turun kelapangan, mau dikiritik, satu kata dengan perbuatan, tegas dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Pengalaman lain juga dicontohkan oleh Gubernur DKI, Joko Widodo.

Bagaimana Jokowi dalam mengatasi banjir besar baru-baru ini, tiap hari mengunjungi daerah-daerah yang banjir sambil memetakan persoalan dan mencari pemecahannya. Begitu juga dalam menyelesaikan kemelut rumah susun, ketika Jokowi turun langsung kelapangan sehingga kelihatan sekali masalahnya dan langsung di atasi. Bagi bangsa Indonesia sebenarnya nilai-nilai Pancasila kalau dihayati dan diamalkan sudah mengandung ciri-ciri kepemimpinan yang kita harapkan saat ini. Semoga. □



Sosok Pemimpin Nasional

Riri Fitri Sari

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Alumni PPRA XLVIII Lemhannas RI

Sosok kepemimpinan nasional dengan pengejawantahan sikap seorang pekerja keras, mau turun kelapangan, bersedia mengeluarkan segala energi dan daya upayanya untuk menyelesaikan masalah yang berhimpitan untuk diselesaikan, belakangan ini muncul dan menjadi wacana baru ketika mendiskusikan kepemimpinan. Saat ini masyarakat merindukan pemimpin yang cerdas, prima, kuat, tegas, berani, dan tegar menghadapi berbagai situasi. Sementara itu era demokratisasi dan kebebasan berpendapat terkadang menjadi berlebihan dan kontraproduktif pada munculnya individu yang dapat diunggulkan.

Seorang pemimpin nasional yang diharapkan masyarakat adalah pemimpin yang memiliki integritas, dapat diterima, dan merupakan pribadi yang bersih. Sementara itu kepemimpinan negarawan yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memecahkan berbagai masalah riil dan sumbatan-sumbatan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah harapan ideal masyarakat.

Di bidang pendidikan misalnya, seorang pemimpin nasional harus dapat mempertimbangan tantangan yang datang dari luar untuk mewujudkan pendidikan nasional yang dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang dapat berkontribusi dan dihargai dalam perekonomian global. Disamping itu kepemimpinan nasional juga perlu melihat ancaman, gangguan, dan hambatan yang muncul dari reaksi masyarakat yang berbeda-beda persepsi dan kemampuan dasarnya untuk bergerak maju dan menjadi bagian dari perubahan menuju yang lebih baik.

Seseorang pemimpin nasional harus mampu menjadi katalisator dalam menyelesaikan masalah nasional dan memberi semangat serta inspirasi untuk terus bekerja keras. Potensi sumberdaya manusia yang tersebar di seluruh nusantara adalah kekuatan demografi besar yang harus diisi dengan keunggulan kompetitif untuk memberikan kontribusi terbaik bagi peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sementara itu seorang pemimpin nasional juga diharapkan memahami dinamika hukum dan perundangan yang berlaku. Tantangan berupa kompleksitas masalah hukum dan perundangan yang ada menjadi faktor yang dapat melemahkan semangat untuk maju dan melakukan transformasi dalam berbagai kehidupan bangsa.

Pemimpin harus tanggap menganalisa kondisi objektif masyarakat, yang masih dalam masa transisi, sering diliputi kecurigaan pada perubahan, dan kekhawatiran untuk tidak mampu mengikuti perubahan. Untuk dapat memahami kompleksitas permasalahan di Indonesia, diperlukan pemimpin yang bermoral dan berkepribadian Indonesia yang utuh dan kokoh, arif, bijaksana, dan tanggap. Etos kerja, disiplin, dedikasi, yang terus menerus diperlukan untuk dapat mampu mempercepat penyelesaian masalah yang ada di masyarakat secara bertanggung jawab.□

Mencari Sosok Pemimpin Nasional

M. Hermawan Eriadi

DPP PKS

Alumni PPRA XLVIII Lemhannas RI



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Tahun 2013 ini diprediksi akan menjadi tahun yang sangat menentukan wajah kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2014. Karena itu pembicaraan publik terkait politik dan pemimpin nasional akan marak, baik membahas kriteria maupun personal. Meskipun jika membicarakan sosok pemimpin nasional tidak berarti melulu hanya menyangkut calon Presiden. Karena pimpinan nasional lainnya seperti Menteri, Panglima TNI, Kepala POLRI, Pimpinan MPR/DPR, Ketua Ormas Nasional hingga informal leaderpun dapat dikategorikan sebagai pimpinan nasional.

Untuk menjadi pemimpin nasional diperlukan kemampuan-kemampuan yang khusus dan melebihi kemampuan orang-orang biasa. Kriteria-kriteria

husus yang relevan dan diperlukan bagi seorang pemimpin nasional dengan kondisi bangsa dan perkembangan lingkungan strategis saat ini telah diperkenalkan oleh LEMHANNAS RI dengan memunculkan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI), yaitu suatu sistem untuk menemukan informasi secara cepat, mudah, dan kategoris tentang standarisasi kualitas kepemimpinan nasional.

IKNI mengandung 4 kategori moralitas dan akuntabilitas (rasa tanggung jawab) sebagai "key variables", yaitu: Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sipil atau Individual, Sosial Kemasyarakatan, Institusional atau Kelembagaan, dan Global. IKNI dibuat dengan telah mempertimbangkan dan mengambil manfaat dari perkembangan kajian tentang kepemimpinan seperti Kepemimpinan Kontemporer, Kepemimpinan Negarawan, Kepemimpinan Visioner dan mempertimbangkan lingkungan strategis dan konteks Indonesia saat ini.

Celakanya, karena kepentingan partai dan kelompok yang sangat kuat untuk menang dan meraih kekuasaan. Maka sering popularitas calon menjadi pertimbangan utama, sedangkan kompetensi hanya dijadikan pelengkap

semata. Akibatnya, yang bermunculan dalam pencalonan Kepala Daerah, bahkan calon Presiden adalah para pesohor dan pemilik modal. Dengan sedikit dikarbit plus politik pencitraan, maka orang yang tidak punya pengalaman atau bahkan punya track record buruk sekalipun bisa menjadi pemimpin lokal bahkan nasional.

Karena itu, menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat lebih rasional dan berpikir jangka panjang dalam menentukan pilihan politiknya di Pemilu, Pilpres maupun Pilkada, bukan hanya dari ketenaran calon. Selain itu, secara khusus menjadi tantangan bagi Partai Politik maupun lembaga pencetak pemimpin nasional seperti Lemhannas RI untuk dapat mencetak sosok pemimpin nasional yang memiliki kapasitas dan kreadibilitas namun sekaligus juga populer di masyarakat umum.□



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Moral dan Integritas Pemimpin

Makmun Halim Thohari

Pengurus Harian DPP PPP

Alumni PPSA XVIII Lemhannas RI

Fenomena kepemimpinan nasional saat ini sedang dalam masalah besar, dimana tengah terjadi surutnya moral dan integritas seorang pemimpin. Hal ini disebabkan oleh empat masalah, pertama adalah belum profesionalnya seorang pemimpin. Hal ini tercermin dari efektifitas kepemimpinannya yang belum mampu menyelesaikan masalah hingga keakarnya.

Masalah kedua adalah kepemimpinan saat ini masih berorientasi pada kepentingan individu seorang pemimpin dan golongannya diatas kepentingan bangsa dan negara. Hal ini terbukti dengan terjadinya berbagai praktek-praktek korupsi “berjamaah”, kolusi dan nepotisme besar-besaran. Masih rendahnya kinerja serta masih suburnya praktek – praktek “upeti” Yang juga masih dilakukan oleh para pemimpin yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung dari praktek tersebut.

Masalah ketiga adalah rekrutmen pemimpin yang kurang selektif yang dilakukan partai politik dan hanya menjadi kendaraan untuk meraih kekuasaan. Partai politik belum mampu melahirkan kepemimpinan nasional yang unggul dan menjadi tauladan bangsa dan negara. Rekrutmen calon pemimpin harus mewakili aspirasi rakyat dan mampu menjadi tauladan bagi bangsa dan negara Indonesia. Masalah keempat adalah penegakan hukum yang masih belum maksimal dan masih perlu pembenahan agar tidak terkesan tebang pilih dan penegakan hukum merupakan gerakan progresif yang berlandaskan atas dasar hukum yang berlaku. Yang terjadi adalah hukum dianggap sebagai obyek yang mudah dibuat dan dimainkan oleh sebagian para pelaku dan penegak hukum.

Barangkali Sosok Pemimpin Nasional yang akan datang menurut hemat penulis akan lebih ideal seandainya berasal dari generasi muda.. Tentu generasi muda yang mempunyai kapabilitas sebagai pemimpin nasional dikarena kita tahu bahwa generasi muda merupakan potensi bangsa yang kemudian hari harus disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukankah para generasi muda adalah pewaris utama negeri ini.□



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI saat meninjau Rumah Anggota Lemhannas RI dilanda Banjir di Perumahan Graha Prima Tambun Bekasi, Jumat (18/1).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI memberikan bantuan secara simbolis kepada PNS Lemhannas RI Ibu Kadarasih di Perumahan Graha Prima Tambun Bekas, Jumat (18/1).



Kepala Biro Humas Settaga Lemhannas RI Brigjen TNI Sahat Aritonang tukar menukar cenderamata dengan Mahasiswa IKIP – PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam rangka kunjungan ke Lemhannas RI di Gd. Tri Gatra Lt. III Timur, Selasa (22/1).



Menhan RI Purnomo Yugiantoro didampingi Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., beserta para Dirjen Hankam Jumpa Pers dengan Wartawan Media cetak dan Media Elektronik dalam rangka Kunjungan Secretary of State for Defence of UK di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gd. Jend. Sudirman Kemhan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (16/1).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima laporan Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Santoso, M. Sc pada Pembukaan Pemantapan Nilai - Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemda Angkatan XXXV Lemhannas RI di Gd. Auditorium Lemhannas RI, Senin (18/3).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., memberi ucapan selamat kepada Deputy Pendidikan Marsekal Muda TNI Syahrul Ansory dalam rangka Pembukaan Outbound PPRa XLIX Lemhannas RI T.A 2013 di Gd. Panca Gatra Lt. III Timur, Rabu (13/3).



Dialog Kebangsaan LPP, RRI dengan Lemhannas RI dengan Narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Menteri PAN RB RI Azwar Abubakar, Dirut LLP RRI Niken Widyastuti, Kepala Badan Kepegawaian daerah DKI Jakarta Ir. I Made Karyoga, SE, dan Anggota Komisi II DPR RI dari F.P Golkar Agung Ginanjar di hadir Oleh Peserta PPRA LIX dan P3DA VII Lemhannas RI dengan Topik “Lelang Jabatan Cara Menjaring Pejabat Publik yang Bersih Kompeten dan Melayani” di Studio Jusuf Ronodiputro LPP RRI Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (15/2).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., sebagai Narasumber dalam acara “Tokoh Bicara” di Sindo Radio 104.6 FM Jakarta bersama pembawa acara Fadli bertempat di Gd. Bimantara Lt.II Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu (9/1).



Pembukaan PPRA XLIX : Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., memberikan ucapan selamat kepada Perwakilan Peserta pada saat pembukaan Pendidikan PPRA XLIX Lemhannas RI Tahun 2013 bertempat di Gd. Dwi Warna Purwa Lt. I, Selasa (5/2).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menjabat Tangan dengan Menteri Pertahanan Spanyol Pedro Morenes Eulate di Lobby Depan Gd. Tri Gatra Lt. I, Rabu (13/2) dalam rangka kunjungan ke Lemhannas RI.



Pembukaan P3DA VII :Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.,menyematkan Tanda Peserta kepada perwakilan Peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan VII Tahun 2013 pada acara Pembukaan Peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan VII Tahun 2013 di Gd. Dwi Warna Purwa Lt. I, Selasa (12/2).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., tampil sebagai narasumber dalam Talk Show LPP TVRI bersama Sosiolog Dr. Imam B. Prasadjo dan Peneliti LIPI Jaleswary, Senin (18/2).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., memberikan sambutan pada Seminar Nasional Korpri dalam rangka HUT Ke-41 Korpri dengan Materi "Membangun Birokrasi Kelas Dunia Yang Berwawasan Kebangsaan" di Gd. Dwi Warna Lt. I Lemhannas RI, Senin (20/2).



Wagub Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE memimpin Rapat Intern Pejabat Lemhannas RI, Senin (4/3).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima DPP Partai Nasdem di ruang tamu Pimpinan Lemhannas RI, Selasa (5/3).



Sestama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, M. Sc (kanan tengah) didampingi Karo Humas Brigjen TNI Sahat Aritonang dan Narasumber dari KemenPAN RB RI Noviana Andrina, SH. MAP membuka Sosialisasi UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik di Gd. Asta Gatra Lt.III Timur, Rabu (13/3).



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., membuka pelatihan metode pengajaran (Sharing Session Program Effective Learning Methods) bagi para Tajar, Taji, Taprof, Direktur serta para Kasubdit di lingkungan Kedepuitan Taplai di Gd. Tri Gatra Lt.III Timur, Rabu (13/3).

U dara siang itu mampu membuat siapa saja berkeringat di Terminal Depok. Deru debu dan suasana bising kendaraan mewarnai tempat itu. Namun itu semua tak melemahkan semangat warga belajar PKBM Bina Insan Mandiri untuk mengikuti pendidikan. Sebuah kubah masjid berwarna hijau terlihat dari belakang bangunan Terminal Depok, dikelilinginya ada container bersusun tingkat dua, dicat warna warni yang disulap menjadi ruang kelas. Riuh suara anak-anak bermain, belajar, dan belajar-sambil-bermain. Sehari-hari, anak-anak tersebut bekerja sebagai pemulung, pengasong, dan pengamen di Sekolah Master, singkatan dari Masjid Terminal.

Awalnya, Sekolah Master dirintis oleh remaja masjid yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid Al Muttaqien (Ikrima) pada tahun 2001 yang memberikan pendidikan informal pada anak-anak sekitar Masjid Al Muttaqien Depok. Berawal ikut serta dalam kepengurusan Remaja Masjid Al Muttaqien, Nurrochim berusaha mengembangkan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Kini, Sekolah Masjid Terminal, atau disingkat Sekolah Master adalah nama lain dari PKBM Tematik Bina Insan Mandiri.

Sekolah Master saat ini sanggup menampung 5.000 anak yang



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Nur Rochim Zamroni
Ketua PKBM Bina Insan Mandiri

PKBM Bina Insan Mandiri Sekolahnya Para Master

belajar sampai gratis, mulai dari PAUD, Paket A, B, C, dan D. Pendidikan diselenggarakan dari pagi hingga malam hari. “Untuk mereka yang masih anak-anak sekolah pagi hingga siang, sementara kalau malam mulai

pukul 20.00-22.00 adalah kelas malam diikuti mereka yang sudah berkeluarga dan harus bekerja di siang hari, ada pekerja rumah tangga, pelayan toko, pengasong, hingga tukang sapu,” kata Nurrochim. Saat

ini, sekolah Master memiliki 30 ruang kelas yang terbuat dari container bekas. Sekitar empat kelas akan ditujukan bagi pelajar berprestasi yang berpotensi untuk masuk ke universitas negeri dan di luar negeri.

“Harapan kami, anak-anak yang lulus dari sini akan menjadi ‘master-master’, ahli dari berbagai bidang, dapat menempuh pendidikan sarjana, tidak hanya di dalam negeri bahkan hingga luar negeri,” kata Nur Rochim Zamroni (ketua PKBM Bina Insan Mandiri). Pria yang sering dipanggil Bang, Abah, Bapak, itulah yang mengajarkan anak jalanan di sekitar Terminal Depok untuk berani bermimpi. Memberikan kepercayaan diri yang hilang seiring putusnya pendidikan mereka di tengah jalan.

“Mereka adalah anak-anak marjinal, ketika mereka sudah lemah karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan untuk mereka, termasuk memberikan pendidikan dan skill secara gratis. Mengharapkan pemerintah saja untuk menangani hal ini, rasanya sangat sulit, harus ada kepedulian dari masyarakat juga untuk membina mereka,” tuturnya

Rumah Para Master

Tutor di Sekolah Master berjumlah 115 orang, dengan tutor tetap 90 orang. Para tutor berasal dari Alumni Master itu sendiri atau relawan dari berbagai universitas. Banyak dari para tutor yang masih menempuh pendidikan di universitas baik negeri maupun swasta, seperti Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Gunadarma dan lainnya.

Di PKBM ini, para tutor tidak hanya mengajarkan mata pelajaran yang akan diujikan pada ujian akhir seperti ilmu eksak dan ilmu alam. “Kami ingin menghasilkan masternya Master yang memiliki akhlak baik,” lanjut Nurrochim. Di Sekolah Master juga diajarkan pendidikan agama, bahasa Arab dan Inggris, ilmu sosial, keterampilan otomotif, servis handphone dan AC, percetakan, berbisnis, kerajinan tangan, dan jahit-menjahit. “Mereka yang saat ini bekerja sebagai wiraswara, wiranada nantinya bisa jadi wirakarya, wiraswasta, dan wirausaha,” Nurrochim melanjutkan.

Sampai saat ini, warga belajar yang telah menginjak bangku kuliah telah mencapai 30 orang, mereka kuliah di UI, UNJ, UNDIP, bahkan ada yang saat ini menempuh pendidikan di luar negeri, di Al Azhar Mesir, Kairo, “Tahun depan ada alumni di sini akan kuliah di Jerman,” kata Nurrochim. Untuk menyiapkan para ‘Master’, Nurrochim meminta kepada kenalannya untuk memberi informasi mengenai kemampuan minimal apa saja yang dibutuhkan. “Dari prasyarat dan kemampuan dasar itu, kami melatih anak-anak agar bisa mengejar minimal syarat untuk kuliah baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Nurrochim.

Kehidupan anak-anak tersebut sebelumnya sangat keras, sebagian tidak mengenal orang tua, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan harus menghidupi dirinya sendiri. Untuk menangani anak-anak tersebut tentunya bukan usaha yang mudah. “Saat kena razia Dinas Sosial maupun Satpol PP





misalnya, kami menjadi tempat berlindung sebagaimana 'orang tua' mereka, bahkan saya harus 'nebus' mereka," kata Nurrochim. Saat awal berdiri Sekolah Master, tak jarang, Nurrochim malah dicurigai sebagai orang yang mempekerjakan anak-anak jalanan.

"Dulu tak ada yang percaya dengan kami, bahkan lingkungan terminal sendiri, perlahan-lahan kami membuat tempat ini sebagai rumah mereka. Ada di saat susah, ada di saat senang, lima tahun pertama adalah masa yang sulit," Nurrochim menambahkan. Bahkan di tingkat pemerintah, nama Sekolah Master tak tercatat.

"Kami mengajarkan mereka untuk berani bermimpi dan meraih cita-cita menjadi sosok yang hebat. Kami

yakin sukses tak dapat diraih dengan cara instan. Orang-orang yang sukses melalui proses yang panjang dan penuh kerjakeras, ibarat sebuah barang yang berkualitas, mereka melalui proses yang rumit dan melalui proses panjang. Maka untuk menghasilkan warga belajar yang berkualitas dan menjadi calon pemimpin di masa depan, kami sebagai pendidik tentunya harus bekerja keras," kata Nurrochim.

Mencontoh kuliah umum di universitas, Sekolah Master mendatangkan sosok-sosok sukses untuk membagi ilmunya dengan anak-anak, ada tentara, pemerintah, guru besar, dokter. "Pada mereka, kami bertanya apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi sukses," tutur Nurrochim. Menurutnya, warga belajar akan banyak belajar dari sosok-sosok

yang nyata ada di hadapan mereka.

"Kamu nanti masih mau jadi pengamen?" tanya Nurrochim tiba-tiba pada salah seorang anak saat wawancara berlangsung, namanya Lintang, "Nggak Pak, saya mau pensiun, habis lulus nanti saya mau mengajar disini," jawab Lintang dengan yakin. Keyakinan dan keberanian untuk mengejar cita-cita ditanamkan begitu dalam di tempat ini. Seolah telah melihat arah, anak-anak yang saat ini bekerja sebagai pengamen, bercita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, ada yang ingin kuliah, mengajar di Sekolah Master, membuka bengkel, atau kembali ke kampung untuk membuka usaha.

Bekerjasama dengan Berbagai Pihak

"Kami berusaha membuat sekolah pinggiran menjadi unggulan, sekolah yang biasa menjadi luar biasa, sekolah yang gratis tapi tidak murahan. Kami sadar biaya itu tidak sedikit, maka kami bekerja sama dengan berbagai pihak, supaya mereka mau membagi ilmu yang bermanfaat untuk kami," kata Nurrochim.

Biaya operasional Sekolah Master cukup tinggi yaitu Rp 20 juta - Rp 25 juta sebulan, tidak hanya untuk masalah pendidikan serta peningkatan beragam skill. Sekolah Master juga memberikan pengobatan gratis kepada 600-700 orang di sekitar Terminal Depok.

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Sekolah Master menggandeng beberapa mitra baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dari sektor swasta dan pemerintah, salah satunya Kementerian Pendidikan. "Dengan adanya bantuan dari Kementerian Pendidikan, tentunya ada penguatan dan percepatan atas program yang telah dijalani oleh Sekolah Master," kata Nurrochim.^[EH]



[Foto: Dok. Lemhannas RI]

Korupsi

Oleh : Dede Rusamsi, Wakil Gubernur Lemhannas RI

Pada sekitar tahun 80-an, tahun-tahun awal saya masuk dan bertugas di skuadron udara, Komandan skuadron kami di sela-sela tugas sering memberikan wejangan atau bahasa tentaranya shanti-aji, salah satu wejangannya adalah: bahwa kita jangan pernah **korupsi** ! karena katanya selain hal itu merupakan melanggar hukum, juga ada hal lain yang memalukan yaitu suatu ketika kita akan malu sendiri bahwa nilai yang kita korupsi adalah kecil sekali nilainya dan juga merendahkan “harga diri kita”, bahkan katanya, suatu ketika kita bisa memberikan senilai yang kita korup tersebut kepada orang lain. Setelah beberapa belas tahun kami berdinis, ternyata ucapan beliau terbukti, selain memang sampai kapanpun korupsi itu adalah pelanggaran hukum juga nilai uang yang dianggap besar beberapa belas tahun lalu itu, saat ini kita bisa memberikannya kepada orang lain.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, **Korupsi** atau **Rasuah** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Di dalam kenyataannya korupsi itu bisa saja prakteknya adalah mengambil properti milik negara atau pihak lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik atau dengan kata lain adalah disebut **Pencuri**.

Apabila dilihat dari sejarahnya, korupsi di dunia ini memang sudah berlangsung lama, konon sudah sejak zaman Mesir Kuno, dan sampai saat ini terus berlangsung terjadi diberbagai Negara, tak terkecuali Negara-negara maju sekalipun. Di Amerika Serikat, negara yang sudah begitu maju, masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya pada masyarakat primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang masih efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembang-

nya perekonomian dan politik serta semakin majunya pembangunan dengan pembukaan sumber daya alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Di Indonesia, memasuki abad baru tahun 2000an, dan saat ini menginjak triwulan pertama 2013 ini setiap hari masalah korupsi menjadi bahan pembicaraan. Dari mulai masalah *bailout* Bank Century, Kasus pembangunan Wisma Atlet, juga kasus Hambalang sampai dengan masalah pengadaan Simulator SIM, penyalahgunaan impor daging sapi, bahkan Astagfirullahaladziiiiim!!.....korupsi pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an pun adalah merupakan asupan berita menit permenit ke telinga kita. Pemain atau pelakunpun sudah melibatkan semua lapisan, dari kalangan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan juga dari kalangan swasta. Semuanya sudah ada yang pernah menjadi tersangka dan sudah dijatuhi hukuman. Media massa baik cetak maupun visual selalu meng-*update* perkembangannya. Hal tersebut menandakan bahwa korupsi di Indonesia sudah semakin marak, berkembang secara sistemik (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/19/opi01.htm>). Bagi banyak orang korupsi bukan lagi menjadi pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/04/0901.htm>). Makanya kita tidak heran kalau hasil survey *Transparency International* tahun 2012, negara kita berada pada Rangkings ke 118 dari 176 negara, atau naik dari peringkat 100 pada tahun 2011. Artinya, perilaku korupsi masih sangat memprihatinkan, juga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dipandang buruk oleh dunia.

Lebih menarik lagi, adalah kita sudah sulit membedakan antara pelaku korupsi dengan para Selebrity. Karena tersangka pelaku korupsi tetap berani tampil didepan publik, mengadakan *pers conference* dengan mengundang wartawan sebanyak mungkin. Koruptor sudah sama dengan para selebriti yang seolah-olah tidak memiliki dosa apapun. Bahkan pendukungnya banyak, pada mendatangi kerumahnya, pada menyalami, berpelukan cipika-cipiki, termasuk keluarganya banyak yang tidak segan dan sungkan untuk tampil didepan publik. Walaupun demikian ada juga akhirnya masyarakat menjauhi keluarga tertuduh korupsi. Namun secara umum masyarakat dibuat rancu



[Foto: www.hariansumutpos.com]

dan bingung tentang **Tata-Nilai**, bahwa seolah-olah korupsi bukan pelanggaran hukum, seolah-olah korupsi bukan suatu kejahatan, bahwa seolah-olah korupsi adalah suatu tindakan kewajaran dari suatu zaman. Kita dibuat bingung, apakah makna kedatangan kerumahnya, arti salamannya dan tidakan cipika-cipikinya dengan tersangka korupsi itu adalah dukungan terhadap teman yang dilanda musibah atau dukungan terhadap pembenaran korupsi? Hal ini menjadi tanda-tanya besar. Hal tersebut juga karena apabila ada salah satu keluarga, yang menjadi tersangka korupsi atau terindikasi korup, maka keluarga tersebut membelanya dengan keras bukan mencari kebenaran secara pembuktian atau mencari penyelesaian secara hukum, namun penyangkalan dengan mencari peluang dan celah kelemahan hukum, bahkan kadang ada yang menyembunyikan.

Menurut Merican (1971), sebab-sebab terjadinya korupsi adalah: budaya peninggalan pemerintahan kolonial, gaji yang rendah, kemiskinan dan ketidaksetaraan, persepsi yang populer, pengaturan yang bertele-tele dan pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Namun saya pernah mendengar suatu "kisah nyata" yang terjadi di dunia Barat sana bahwa: ada seorang ayah yang mendongkrak mobil di garasinya, secara terus-menerus semalaman "memutar roda depannya diputar kebelakang atau mundur", hal ini sangat mengundang penasaran anak gadisnya yang masih berusia 6 tahunan. Kemudian bertanya, "Ayah kenapa rodanya diputar terbalik? sang Ayah menjawab: "Iya Nak, mobil ini mau Ayah jual besok, supaya kelihatan penunjukkan kilomernya sedikit, harus Ayah putar". Sungguh diluar dugaan si Anak bereaksi dan memberikan teguran kepada ayahnya: "Ayah tidak boleh melakukan itu, karena hal itu sama dengan menipu, sama dengan mencuri dan membodohi orang yang akan membeli mobil Ayah, Ayah harus kembalikan kepada penunjukkan yang sebenarnya". Hal ini tentunya sangat menarik, anaknya yang sekecil itu sudah mengerti tentang **Nilai Kebenaran**, bahwa membohongi orang lain itu adalah salah, yang sama nilainya mengambil hak orang lain.

Kalau kita lihat teori Maslow, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, Pertama: Kebutuhan Fisologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti makan dan minum dsb. Kedua: kebutuhan rasa aman, yaitu aman secara

ekonomi, aman secara fisik, tidak mendapat terror dsb. Ketiga: Kebutuhan bersosialisasi yaitu diterima dalam kelompok, menjalin persahabatan dsb, Keempat: Kebutuhan akan harga diri yaitu dihargai, diapresiasi, diakui kontribusinya oleh orang lain dsb. Kelima: Kebutuhan aktualisasi diri yaitu mengaktualisasikan diri menjadi apa yang diinginkan. Menyimak teori Maslow ini dikaitkan dengan para pelaku korupsi, baik dari kalangan legislatif, yudikatif, eksekutif maupun swasta, mereka bukan dari kelompok yang masuk dalam golongan pertama yaitu untuk mempertahankan hidup maupun ke golongan kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan rasa aman ekonomis, rasa aman fisik, bahkan sangat terbalik dengan golongan ke empat yaitu kebutuhan harga diri. Perilaku korupsi lebih merupakan symbol dari kebutuhan yang berlebihan yaitu **keserakahan**, sehingga mereka ingin menguasai harta dan uang sebanyak mungkin secara cepat dan dengan cara-cara illegal, tanpa melihat Tata nilai, harga diri dan norma aturan yang ada.

Perenungan kita telah sampai pada bahwa, ternyata penyebab korupsi bukan hanya karena gaji yang kecil, bukan karena budaya tinggalan kolonial yang buruk atau bukan hanya karena tidak mengerti aturan, tetapi juga kurangnya pemahaman terhadap nilai harga diri. Harus ada perbedaan sikap yang jelas antara teman, saudara atau keluarga yang baik dan tidak bermasalah dengan hukum, dengan teman atau saudara yang berperilaku korupsi. Bagaimana menimbulkan pengertian bahwa Korupsi itu selain melanggar hukum juga akan merendahkan martabat kita.

Kita harus bisa belajar dari sejak kecil seperti pemahaman "gadis kecil" di Barat sana, walaupun baru berusia 6 tahunan, tetapi sudah memiliki pemahaman tentang salah atau benar, bahwa korupsi itu sama dengan menipu dan mencuri. Namun demikian pada kenyataannya, pelaku korupsi justru dilakukan oleh orang dewasa, yang pernah mendapat pengetahuan di sekolah atau madrasah atau bahkan pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, berarti semua pernah mendapat ajaran-ajaran untuk budi pekerti dan ilmu-ilmu kebaikan.

Dalam hal ini nampaknya, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Tuntutan sosial dan pergaulan serta gaya hidup hedonisme tentunya sangat berpengaruh terhadap niat berperilaku korupsi. Maknanya Tata-nilai kebenaran yang sebenar-benarnya, ketaatan terhadap aturan dan norma perlu ditanamkan, dikembangkan dan dibudayakan sejak usia dini secara terus menerus. Pandangan masyarakat jangan ada yang salah, tidak terjadi perubahan opini terhadap perilaku korupsi, bahwa mendukung dan bergaul dengan tertuduh koruptor itu adalah hal yang memalukan, berperilaku korup adalah aib yang harus dihindari, bukan untuk didekati, karena **Koruptor** juga sama dengan **Pencuri**.

Kegiatan Penting Lemhannas RI April – Juni 2013

April 2013

April

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Parpol Angkatan I.

April

Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa-Mahasiswa di Unair Surabaya.

April

Evaluasi Dampak Pelaksanaan Nilai-Nilai Kebangsaan di Riau.

1–24 April

Kajian Aktual–2 “ASEAN Framework on Equitable Economic Development (EED) dalam rangka Ketahanan Nasional”.

2 April

Rapat Koordinasi Studi Strategis Luar Negeri Program Pemantapan Pimda Angkatan VII.

7–10 April

Pelaksanaan Studi Strategis Luar Negeri Program Pemantapan Pimda Angkatan VII.

9 April

Direktif Badan Konsultan Seminar Program Pemantapan Pimda Angkatan VII.

9–10 April

Kajian Aktual–2: “Pemanfaatan Sumber Daya Laut guna Meningkatkan Perekonomian Bangsa dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional”.

17 April

Kajian Berlanjut: “Penguatan Demokrasi dan Tata kelola Pemerintahan guna Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”.

18 April

Penutupan Program Pemantapan Pimda Angkatan VII.

24–25 April

Pelaksanaan pengenalan Obyek Strategis PPRA XLIX.

Mei 2013

4 Mei

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Wartawan Angkatan I.

1–2 Mei

Kajian aktual–2: “Penguasaan, Pemanfaatan dan Pemajuan Iptek Guna Kejayaan Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional”.

2–31 Mei

Kajian Aktual–2: “Penguatan Etika Politik guna Peningkatan Patisipasi Publik dan Proses Demokrasi dalam rangka Ketahanan Nasional”.

13 Mei

Kajian Berlanjut: “Meningkatkan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Komunal guna Mencegah Disintegrasi Bangsa dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

16 Mei

Rapat Koordinasi Studi Strategis Luar Negeri PPRA XLIX.

26 Mei

Kajian Aktual–3: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Papua Melalui Pembentukan Perspektif Internasional dalam rangka Ketahanan Nasional”.

27–30 Mei

Pelaksanaan Studi Strategis Luar Negeri PPRA XLIX.

Juni 2013

Juni

Kursus Dosen Kewarganegaraan (5 Minggu)

Juni

Dialog Kebangsaan Pimpinan Lemhannas di Jateng.

Juni

Evaluasi Dampak Pelaksanaan Nilai-nilai Kebangsaan di Sumut.

9–14 Juni & 23–28 juni

Kajian Berlanjut “Meningkatkan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Komunal guna Mencegah Disintegrasi Bangsa dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

25 Juni

Kajian Berlanjut “Pemberdayaan Peran Tokoh Masyarakat Informal guna Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama dalam rangka Ketahanan Nasional”.



Kepemimpinan Transformatif ala SBY

Judul : Memimpin di Era "Politik Gaduh : Jika Kinerja Nyata Presiden SBY Dianggap Pencitraan
 Penulis : Zaenal A. Budiyo
 Penerbit : DCSC Publishing
 Tahun Terbit : 2012
 Tebal : xxi, 204 hlm

Buku Memimpin di Era Politik Gaduh merupakan kumpulan opini dan kolom penulis, Zaenal C. Budiyo dari sejumlah media cetak dan online mengenai kebijakan dan isu seputar kepemimpinan SBY. Buku ini mengungkap banyak fakta dan data aktual mengenai capaian-capaian kinerja SBY dalam memimpin pemerintahan yang telah dilakukan selama tujuh tahun terakhir baik pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I maupun pada KIB II yang sudah berjalan selama tiga tahun.

Visi pemerintahan SBY adalah *clean government* (pemerintahan yang bersih). Dalam upaya pemberantasan korupsi, SBY memiliki komitmen untuk memberikan intervensi secara positif terhadap berbagai kasus korupsi. Selain itu, SBY melakukan berbagai upaya seperti menandatangani izin pemeriksaan 138 kasus korupsi bagi penyelenggaraan negara, yang merupakan rekam jejak tertinggi dalam sejarah republik.

Menurut Zaenal, terkadang gerak cepat pemerintahan SBY tidak diimbangi kemampuan aparat di lapangan, yakni kepolisian dan kejaksaan. Kenyataan ini diperburuk dengan adanya *corruptors strike back* (serangan balik para koruptor), dimana para koruptor mencoba mempreteli kewenangan KPK dan satgas pemberantasan mafia hukum.

Suburnya perilaku korupsi dalam birokrasi disebabkan munculnya niat dan kesempatan secara bersamaan. Di luar itu, ke depannya generasi muda Indonesia harus memiliki *the new consensus* untuk menolak korupsi. Caranya, melalui pendidikan anti-korupsi yang sistematis dan terukur. Selain itu, dalam jangka menengah, konsep kepemimpinan harus memperhatikan aspek

SBY konsisten mengedepankan *soft power diplomacy*, yaitu diplomasi yang mengandalkan dialog dan cara-cara non perang. Kegagalan pendekatan militer Amerika Serikat di Afganistan dan Irak, misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat dunia perlu disadarkan mengenai adanya elemen *power* (kekuatan) lain selain kekuatan militer. *Hard power* dapat mengakibatkan persaingan negatif, sedangkan *soft power* dapat menghasilkan sinergi positif.

Realisasi dari diplomasi *soft power* di antaranya adalah SBY menjadi aktor di balik dua terobosan penting dalam KTT ASEAN di Jakarta Tahun 2011. Pertama yaitu adanya jalan maju terkait konflik perbatasan yang melibatkan Thailand dan Kamboja. Kedua, makin terbukanya kemungkinan penerapan demokrasi di Myanmar. Dalam merealisasikan sejumlah visi mengenai perdamaian dunia di masa depan, SBY mengajukan konsep *triple track solution* terkait masa depan Irak, yakni rekonsiliasi nasional seluruh pihak yang bertikai, pengurangan bantuan pasukan yang terdiri dari berbagai negara, serta rekonstruksi dan rehabilitasi Irak.

Buku ini juga mengupas berbagai permasalahan mendasar di bidang ekonomi. Di tengah eksistensi dua kutub nasionalisme ekonomi di Indonesia, pemerintah kerap dianggap mendukung ekonomi terbuka, menjadi sasaran tembak para penganut dalil kontrol negara atas ekonomi. Padahal, pembangunan ekonomi harus didukung investasi, termasuk di dalamnya *Foreign Direct Investment* (FDI). Menurut penulis, faktor FDI dan nasionalisme dapat saling menguatkan, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi.

Terkait pengaruh sektor ekonomi dalam menjaga kepuasan rakyat terhadap pemerintah, dapat dilihat dari sejauh mana performa ekonomi kita. Ukuran kesehatan ekonomi Indonesia dapat dilihat di antaranya melalui rasio utang Indonesia yang sudah turun drastis menjadi 27 persen. Dari sisi penyikapan defisit fiskal, kinerja ekonomi Indonesia sangat terkendali dengan tingkat di bawah 2 persen. Atas sejumlah keberhasilan ekonomi Indonesia, pada bulan Agustus tahun 2010, Harian New York Times menulis bahwa ekonomi Indonesia telah benar-benar bangkit dari krisis keuangan global dengan reputasi baru yang mengejutkan, sekaligus sebagai anak emas ekonomi.

Zaenal memberikan banyak paparan mengenai prestasi dan kinerja positif kepemimpinan Presiden SBY secara rasional-objektif. Meskipun kinerja pemerintah banyak mendapat pujian dari dunia luar, akan tetapi dalam keadaan politik seperti saat ini, apresiasi terhadap hal positif dari dalam negeri terlihat sangat sepi. Buku ini membawa kita untuk mengetahui lebih jauh tentang kinerja dan pencapaian Presiden SBY dan mencoba untuk memberikan pandangan yang lebih objektif tanpa menghilangkan nalar yang kritis. Terdapat beberapa repetisi data dan teori, akan tetapi secara menyeluruh, buku ini menarik untuk dibaca.□



Pembukaan PPRALemhannas RI, Senin 18 Maret 2013



Sad. 48th Winder

20 Mei 2013

LEMHANNAS RI

Menyelenggarakan Kegiatan
Kebersamaan dengan Masyarakat

- **Gowes Sepeda (Sepeda Santai)**
19 Mei 2013
- **Pagelaran Wayang Kulit**
24 Mei 2013

